



BPHN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAPORAN KEUANGAN BPHN SATKER SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JL. MAYJEND SOETOYO NO. 10 CILILITAN JAKARTA TIMUR



Badan Pembinaan Hukum Nasional

Laporan Keuangan Semester I Satker

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
30 Juni 2024

**Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan
Jakarta Timur 13640**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 23 Juli 2024
Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
NIP. 19770509 200112 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	49
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	64
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	73
F. Pengungkapan Penting Lainnya	80
VI. Lampiran dan Daftar	84



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. May. Jend. Sutoyo-Cililitan No.10 Jakarta Timur

Telp. 021-8091908 Fax 021-8002265 website : www.bphn.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 23 Juli 2024

Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati b b b b b

NIP. 19770509 200112 2 001

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp237.155.783 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp20.547.014.328 atau mencapai 48 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp42.810.145.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp396.633.999.830 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp741.129.741; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.395.822.899.029; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp69.971.060;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.052.319.895 dan Rp394.581.679.935.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp27.547.806 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp24.946.658.024 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.24.919.110.218), Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp178.007.053 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp24.741.103.165.).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp.399.075.137.055 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp24.741.103.165 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp20.247.646.045 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp394.581.679.935

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Buletin Teknis SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan sesuai dengan PMK nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2024		% thd Angg	TAHUN 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		237.155.783	0	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	237.155.783	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	18.093.031.000	10.067.415.127	56	9.208.304.964
Belanja Barang	B.4	24.697.114.000	10.459.626.301	42	10.714.483.578
Belanja Modal	B.5	20.000.000	19.972.900	100	1.646.193.278
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
JUMLAH BELANJA		42.810.145.000	20.547.014.328	48	21.568.981.820

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NERACA

PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	625.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	59.148.730
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(295.744)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	116.129.741	181.076.570
Persediaan Belum Diregister	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		741.129.741	239.929.556
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.15	356.165.357.000	356.165.357.000
Peralatan dan Mesin	C.16	25.791.465.257	26.605.556.857
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.17	-	-
Gedung dan Bangunan	C.18	62.954.462.581	62.954.462.581
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.19	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.20	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.21	1.123.767.442	1.123.767.442
Konstruksi dalam pengerjaan	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.23	(50.212.153.251)	(47.938.133.273)
Aset Tetap yang belum diregister	C.24	-	-
Jumlah Aset Tetap		395.822.899.029	398.911.010.607
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.25	4.254.296.560	4.234.323.660
Dana yang dibatasi Penggunaannya	C.33	-	589.375.493
Aset Lain-Lain	C.26	731.141.600	430.984.260
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.27	(4.915.467.100)	(4.615.309.760)
Jumlah Aset Lainnya		69.971.060	639.373.653
JUMLAH ASET		396.633.999.830	399.790.313.816
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.28	625.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.29	1.167.847.708	687.628.955
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	-	27.547.806
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.31	259.472.187	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.052.319.895	715.176.761
JUMLAH KEWAJIBAN		2.052.319.895	715.176.761
EKUITAS			
Ekuitas	C.32	394.581.679.935	399.075.137.055
JUMLAH EKUITAS		394.581.679.935	399.075.137.055
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		396.633.999.830	399.790.313.816

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	27.547.806	9.358.395
JUMLAH PENDAPATAN		27.547.806	9.358.395
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.219.962.835	10.267.024.492
Beban Persediaan	D.3	240.445.993	198.007.057
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.207.746.847	5.026.695.080
Beban Pemeliharaan	D.5	1.726.708.168	1.828.494.749
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.526.190.847	5.195.805.720
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.025.899.078	2.956.525.650
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(295.744)	-
JUMLAH BEBAN		24.946.658.024	25.472.552.748
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(24.919.110.218)	(25.463.194.353)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	115.487.000	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		115.487.000	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		62.520.053	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		62.520.053	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		178.007.053	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(24.741.103.165)	(25.463.194.353)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPNP	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(24.741.103.165)	(25.463.194.353)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	399.075.137.055	400.237.667.014
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(24.741.103.165)	(25.463.194.353)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET NO REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	20.247.646.045	21.231.730.644
EKUITAS AKHIR	E.5	394.581.679.935	396.006.203.305

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan Hukum Nasional

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, BPHN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di Bidang Pembinaan Hukum Nasional
2. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum
3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum
4. Pelaksanaan administrasi BPHN
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik

4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bidang hukum dan HAM
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM yang dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pembentukan dan Penataan Regulasi; Pelayanan Publik di Bidang Hukum; Penegakan Hukum; Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan tata kelola pemerintahan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BPHN memiliki 5 (lima) unit Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Perencanaan Hukum Nasional;
3. Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum;
4. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional;
5. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.



A. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan HAM memiliki misi sebagai tindak lanjut atas visi yang telah ditetapkan oleh Presiden, adapun misi Kementerian Hukum dan HAM dalam menunjang visi Presiden dijabarkan dalam 7 (tujuh) hal yaitu:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdapat pada aplikasi SAKTI pada Modul Persediaan, Modul Aset tetap dan Modul GLP. Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Persediaan dan Modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-15/PB/PB.6/2024 tanggal 02 Juli 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2024.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian

Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

AsetLainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel

masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Berikut adalah tabel revisi DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester 1 Tahun Anggaran 2024:

KE	TANGGAL REVISI	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
1	30/01/2024	1. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-34/AG/AG.5/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Blokir Automatic Adjustment TA 2023 Kemenkumham 2. Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-17 Perihal Penyampaian Hasil Revisi Antar Program dan Automatic Adjustment	Revisi dalam rangka Blokir Automatic Adjustment , Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan pergeseran anggaran antar program sebesar Rp1.180.751.000
2	16/02/2024	Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-16 tanggal 19 Februari 2024 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi Bulan Februari	Update RPD Hal III DIPA Triwulan I TA 2024
3	20/03/2024	Nota Dinas Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-20 tanggal 18 Maret 2024 Perihal penyampaian Usulan Revisi RKA-KL Kelompok Substansi Keuangan	Pemenuhan Anggaran Belanja PPPK Tahun 2024
4	22/04/2024	Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-31 tanggal 24 April 2024 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi Revisi Anggaran DIPA BPHN TA 2024	Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA Triwulan II TA 2024 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional
5	21/05/2024	Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-37 tanggal 22 Mei 2024 Perihal penyampaian RKAKL Revisi Anggaran kegiatan PJA TA 2024	Pemenuhan anggaran kegiatan prioritas Badan Pembinaan Hukum Nasional Paralegal Justice Award (PJA)
6	28/06/2024	Surat Kepala Badan Pembinaan Nasional Nomor PHN-KU.01.02-03 perihal Penyampaian Data Dukung Revisi DIPA Anggaran Belanja Pegawai TA 2024	Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024 (Penambahan Anggaran Belanja Pegawai senilai Rp688.378.000)

Dokumen revisi tersedia pada lampiran laporan keuangan ini.

Berikut adalah Tabel perubahan pagu anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2024:

Uraian	30 Juni 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Pajak	0	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0
Penerimaan Hibah	0	
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	17.404.653.000	18.093.031.000
Belanja Barang	24.697.114.000	24.697.114.000
Belanja Modal	20.000.000	20.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	42.121.767.000	42.810.145.000

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	30 Juni 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI DAN REALOKASI
Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.502.291.000	1.293.206.000
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	1.987.390.000	1.633.219.000
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	3.259.505.000	2.642.010.000
Perencanaan Hukum Nasional	1.988.945.000	1.988.945.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	33.383.636.000	35.252.765.000
Total Belanja	42.121.767.000	42.810.145.000

Pada tahun 2024 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak memiliki anggaran penanganan Pandemi Covid-19.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp237.155.783 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pada Semester 1 Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi pendapatan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024 berupa 1 (satu) paket Eks Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat yaitu: 1 Mobil Mitsubishi Tahun 2004, Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2006 NTPN BC71D2G4VPKREJFV sebesar Rp115.487.000;
2. Penerimaan Kembali Kelebihan bayar pekerjaan konstruksi renovasi Lt 2 Gd annex ruang kerja pimpinan GD. SJDI dan Ruang Kerja Gd. Induk Kantor BPHN sesuai dengan Klarifikasi Kontrak Hasil Pemeriksaan Fisik oleh PT. Aisha Bangun Raya Nomor Kontrak PHN.1-PB.02.01-1093 tanggal 22 April 2024 NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI sebesar Rp47.080.355 sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
3. Penerimaan Kembali Kelebihan/Selisih Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Terkait Pengadaan Outsourcing Tahun 2023 NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 sebesar Rp12.068.375 sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
4. Penerimaan kembali kelebihan pembayaran kendaraan operasional sewa TA 2023 pada kantor BPHN NTPN 7F3E361QV3UJHP6K sebesar Rp62.520.000 sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
5. Pembulatan belanja pegawai sebesar Rp53 sesuai dengan SPM Nomor 00015T tanggal 9 Januari 2024.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel berikut:

***Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Per 30 Juni 2024***

Uraian	30 Juni 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	115.487.000	-
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-		-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	74.588.375	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		47.080.355	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	53	-
Jumlah	-	237.155.783	-

Berikut adalah perbandingan Realisasi Pendapatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebagai berikut:

***Perbandingan Realisasi Pendapatan
Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023***

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	115.487.000	-	100,00
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	-	
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	74.588.375	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	47.080.355		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	53	-	100,00
Jumlah	237.155.783	-	100,00

Realisasi Pendapatan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 30 Juni 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan periode sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran

2024 terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional baru terealisasi pada semester II.

Realisasi Belanja Negara **B.2 Belanja**

Rp20.547.014.328

Realisasi Belanja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp20.547.014.328 atau 48 % dari anggaran belanja sebesar Rp42.810.145.000. Berikut adalah Tabel Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional per 30 Juni 2024:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2024

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	18.093.031.000	10.067.415.127	56
Belanja Barang	24.697.114.000	10.459.626.301	42
Belanja Modal	20.000.000	19.972.900	100
Jumlah	42.810.145.000	20.547.014.328	48

Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.021.967.492 atau sebesar 4,74% dibandingkan realisasi belanja pada periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Pengurangan Anggaran Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 yang jauh berbeda dengan Anggaran Tahun 2023 yaitu pada Tahun 2023 terdapat Belanja Modal senilai Rp1.646.193.278 sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal hanya dianggarkan sebesar Rp20.000.000. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 disajikan pada Tabel berikut:

**Perbandingan Realisasi Belanja
Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023**

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	10.067.415.127	9.208.304.964	9,33
Belanja Barang	10.459.626.301	10.714.483.578	(2,38)
Belanja Modal	19.972.900	1.646.193.278	(98,79)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	20.547.014.328	21.568.981.820	(4,74)

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**
Rp10.067.415.127

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.067.415.127 dan Rp9.208.304.964. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berikut adalah tabel pagu dan realisasi belanja pegawai DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 30 Juni 2024:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
TA. 2024**

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	17.416.107.000	9.809.568.625	56,32
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	184.588.000	64.983.676	
Belanja Lembur	492.336.000	192.869.000	39,17
Total Belanja Pegawai	18.093.031.000	10.067.421.301	55,64

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp6.174 berupa Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji dan Tunjangan PNS melalui potongan SPM.

Perbandingan realisasi belanja pegawai periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023**

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.809.568.625	9.137.792.102	7,35
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	64.983.676	72.610.000	(10,50)
Belanja Lembur	192.869.000		
Jumlah Belanja Kotor	10.067.421.301	9.210.402.102	9,30
Pengembalian Belanja Pegawai	(6.174)	(2.097.138)	(99,71)
Jumlah Belanja	10.067.415.127	9.208.304.964	9,33

Perbandingan realisasi belanja pegawai Periode 30 juni 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp859.110.163 atau sebesar 9,3% dibandingkan realisasi belanja pada periode sebelumnya. Hal ini antara lain dikarenakan adanya Kenaikan Besaran Gaji PNS sebesar 8 persen dari besaran gaji sebelumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 4 Pegawai.

*Belanja Barang
Rp10.459.626.301*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.459.626.301 dan Rp10.714.483.578 . Belanja barang merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja terdiri dari belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.

Berikut adalah tabel pagu dan realisasi Belanja Barang DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 30 Juni 2024:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
TA. 2024**

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional	4.585.886.000	2.236.802.854	48,78
Belanja Barang Non Operasional	3.399.854.000	1.296.673.366	38,14
Belanja Barang Persediaan	457.557.000	214.757.926	46,94
Belanja Jasa	5.440.889.000	2.718.087.589	49,96
Belanja Pemeliharaan	3.413.279.000	1.633.608.406	47,86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.229.649.000	2.359.696.160	32,64
Belanja Perjalanan Luar Negeri	170.000.000	-	-
Total Belanja Barang	24.697.114.000	10.459.626.301	42,35
Pengembalian			
Belanja Barang (Netto)	24.697.114.000	10.459.626.301	42,35

Perbandingan realisasi belanja barang Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Perbandingan Belanja Barang
Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023**

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.236.802.854	1.637.427.251	36,60
Belanja Barang Non Operasional	1.296.673.366	713.097.005	81,84
Belanja Barang Persediaan	214.757.926	193.566.986	10,95
Belanja Jasa	2.718.087.589	2.164.633.768	25,57
Belanja Pemeliharaan	1.633.608.406	1.767.625.613	(7,58)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.359.696.160	4.246.552.863	(44,43)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	10.459.626.301	10.722.903.486	(2,46)
Pengembalian Belanja		(8.419.908,00)	
Jumlah Belanja	10.459.626.301	10.714.483.578	(2,38)

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp305.665.239 atau 2,84 persen dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024, hal ini dikarenakan adanya Blokir Automatic Adjustment atas belanja barang sebesar Rp960.765.000 dan beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di Semester 1 direvisi ke Semester 2 Tahun Anggaran 2024.

Belanja Modal
Rp19.972.900

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.972.900 dan Rp1.646.193.278 . Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 98.79 persen bila dibandingkan dengan periode 30 Juni 2023 dikarenakan pada Tahun anggaran 2024, Anggaran Belanja Modal yang tersedia hanya untuk pembelian 1 Paket Ebook JDIHN dan tidak terdapat anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

Berikut tabel perbandingan Realiasi Belanja Modal Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.394.106.782	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		246.201.096	0,00
Belanja Modal Lainnya	19.972.900	5.885.400	0,00
Jumlah Belanja Kotor	19.972.900	1.646.193.278	(98,79)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	19.972.900	1.646.193.278	-98,79

Berikut adalah tabel Pagu dan Realisasi Belanja Modal DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 30 Juni 2024:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
TA. 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Lainnya	20.000.000	19.972.900	99,86
Total Belanja Modal	20.000.000	19.972.900	99,86
Pengembalian		-	
Belanja Modal (Netto)	20.000.000	19.972.900	99,86

Realisasi Belanja Modal Periode 30 Juni 2024 sebesar Rp19.972.900 merupakan Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset pada Neraca, yang berupa 1 Paket Ebook JDIHN dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2024.

Berikut adalah rincian Realisasi Belanja Modal Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disajikan pada tabel:

Rincian Realisasi Belanja Modal Periode 30 Juni 2024

No	Akun	Nomor SP2D	Nilai SP2D	Keterangan
3	536111	241391303008216	19.972.900	1 Paket ebuku JDIHN hukum
JUMLAH			19.972.900	

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal
Tanah Rp0*

Realisasi Belanja Modal Tanah periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada anggaran atau pun realisasi belanja modal Tanah di Tahun Anggaran 2024.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp0*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.394.106.782 . Realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar 100 persen dari tahun anggaran sebelumnya,

dikarenakan pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023:

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023**

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.394.106.782	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	1.394.106.782	(100,00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	1.394.106.782	(100,00)

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp246.201.096. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester 1 Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan 100 persen dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Anggaran belanja gedung dan bangunan. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi belanja Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023:

**Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	246.201.096	100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	246.201.096	100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	246.201.096	100,00

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Lainnya
Rp19.972.900*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.972.900 dan Rp5.885.400 Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar 239,36 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pada semester 1 Tahun Anggaran 2024 dilakukan percepatan realisasi belanja.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BELANJA	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	Naik (Turun) %
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan (monografi)		5.885.400	100,00
Belanja Penambahan Nilai Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	19.972.900	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	19.972.900	5.885.400	239,36
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	19.972.900	5.885.400	239,36

Belanja Modal Lainnya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 30 Juni 2024 sebesar Rp19.972.900 adalah berupa pembelian 1 Paket Ebook JDIHN dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp625.000.000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp625.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Saldo UP	Rp 45.477.813	Rp -
Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp 254.522.187	Rp -
Saldo TUP	Rp 325.000.000	
Kuitansi TUP yang belum di SPJ-kan	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 625.000.000	Rp -

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara.

Piutang PNB
Rp0

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp59.148.730. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNB pada 31 Desember 2023 sebesar Rp59.148.730 adalah hasil tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

1. Koreksi Beban atas kelebihan/selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan Outsourcing tahun 2023 dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp12.068.375;
2. Koreksi atas kelebihan pekerjaan konstruksi renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SJDI serta Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp47.080.355.

Atas Piutang PNB tersebut telah dilakukan penjurnalan balik sehingga saldo Piutang PNB pada 30 Juni 2024 bernilai Rp0.

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelapora

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
(Rp0)*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp0) dan (Rp295.744). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023 adalah hasil tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

1. Penyisihan Piutang lainnya atas Koreksi Beban atas temuan Pengembalian Belanja Barang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp60.342;
2. Penyisihan Piutang lainnya atas Koreksi Aset atas kelebihan pembayaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan Penyisihan Piutang lainnya atas koreksi aset atas kelebihan pembayaran belanja modal yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp235.402.

Atas Penyisihan Piutang tersebut telah dilakukan penjurnalan balik sehingga saldo Penyisihan Piutang pada 30 Juni 2024 bernilai Rp0.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari

barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp116.129.741*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 Masing-masing adalah sebesar Rp116.129.741 dan Rp181.076.570 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Periode 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	116.129.741	181.076.570
Jumlah	116.129.741	181.076.570

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Hasil Opname Fisik Barang Persediaan Nomor PHN.I-PB.04.03-03 tanggal 3 Juli 2024.

*Persediaan Belum
diregister Rp0*

C.11 Persediaan Belum Diregister

Nilai Persediaan Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 Masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.13 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
(Rp0)*

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan (Rp295.744) Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp356.165.357.00
0*

C.15 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pembinaan Hukum Nasional per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp356.165.357.000 dan Rp356.165.357.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	356.165.357.000
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2024	356.165.357.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Periode 30 Juni 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	11.348 m2	Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur	356.165.357.000
Jumlah			356.165.357.000

Saldo aset tetap berupa Tanah seluas 11.348 m2 terletak di Jalan Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur sesuai Sertifikat Nomor 6938773 Tahun 1986 dan Nomor 09040402400106 tanggal 06 Desember 2019.

*Peralatan dan
Mesin*

Rp25.791.465.257

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp25.791.465.257 dan Rp26.605.556.857 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	26.605.556.857
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Perolehan Hasil tindak lanjut normalisasi	
Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan	0
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset	(731.141.600)
Transfer Keluar	(82.950.000)
Saldo per 30 Juni 2024	25.791.465.257
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(22.505.090.017)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	3.286.375.240

Mutasi kurang pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp814.091.600 adalah berasal dari:

1. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp731.141.600 adalah berupa:

- a. Penghentian Aset Dari Penggunaan Sedan senilai Rp404.107.340 sesuai dengan Berita Acara Nomor PHN.1-PB.05.05-03 Tanggal 31 Mei 2024;
 - b. Penghentian Aset dari Penggunaan Mini Bus senilai Rp 327.034.260 sesuai dengan Berita Acara Nomor PHN.1-PB.05.05-03 Tanggal 31 Mei 2024.
2. Transfer keluar ke kantor wilayah sebesar Rp82.950.000 yang terdiri dari:
- a. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-10 tanggal 29 Februari 2024;
 - b. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-11 tanggal 29 Februari 2024;
 - c. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-12 tanggal 29 Februari 2024;
 - d. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-13 tanggal 29 Februari 2024;
 - e. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-14 tanggal 29 Februari 2024;
 - f. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin

(Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-15 tanggal 29 Februari 2024;

*Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister
Rp0*

C.17 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

*Gedung dan
Bangunan
Rp62.954.462.581*

C.18 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp62.954.462.581 dan Rp62.954.462.581. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	62.954.462.581
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Saldo per 30 Juni 2024	62.954.462.581
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(27.707.063.234)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	35.247.399.347

*Gedung dan
Bangunan Belum
Diregister Rp0*

C.19 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dan Rp0.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp0*

C.20 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp1.123.767.442*

C.21 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp1.123.767.442 dan Rp1.123.767.442. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	1.123.767.442
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan	
Saldo per 30 Juni 2024	1.123.767.442
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	1.123.767.442

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.22 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp50.212.153.251)*

C.23 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp50.212.153.251) dan (Rp47.938.133.273). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Periode 30 Juni 2024**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	25.791.465.257	22.505.090.017	3.286.375.240
2	Gedung dan Bangunan	62.954.462.581	27.707.063.234	35.247.399.347
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	1.123.767.442	0	1.123.767.442
		89.869.695.280	50.212.153.251	39.657.542.029

*Aset Tak
Berwujud
Rp4.254.296.560*

C.24 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp4.254.296.560 dan Rp4.234.323.660 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi Tambah pada Aset Tak Berwujud senilai Rp19.972.900 adalah berupa pembelian 1 paket Ebook JDIHN guna menunjang pelayanan perpustakaan hukum nasional. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4.234.323.660
Mutasi tambah:	
Pembelian	19.972.900
Hibah	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi	-
Saldo per 30 Juni 2024	4.254.296.560
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	(4.184.325.500)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	69.971.060

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud periode 30 Juni 2024

Uraian	Nilai Perolehan
Software :	
- Software Komputer Aplikasi Absensi BPHN	25.300.000
- Aplikasi Integrasi Website BPHN	382.297.500
- Website BPHN	2.058.528.000
- Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Sidbankum)	1.483.830.000
- Aplikasi Absensi Berbasis Web	19.140.000
- Aplikasi JDIHN	215.230.000
Aset tak berwujud lainnya (Ebook JDIHN)	69.971.060
Jumlah	4.254.296.560

*Aset Lain-Lain
Rp731.141.600*

C.25 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp731.141.600 dan Rp430.984.260. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan yang berada dalam kondisi rusak berat sehingga tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan akan diajukan untuk proses penghapusan dari BMN . Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	430.984.260
Mutasi tambah:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	731.141.600
Mutasi kurang:	
Pencatatan Barang yang mau dihapuskan	(430.984.260)
Reklasifikasi ke Aset Tetap	
Saldo per 30 Juni 2024	731.141.600
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	(731.141.600)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Mutasi tambah sebesar Rp731.141.600 adalah berupa penghentian Aset dari penggunaan dengan cara merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang sesuai dengan Berita Acara Penghentian BMN dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.05.05-03 tanggal 31 Mei 2024, yang terdiri dari:

1. Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp327.034.260;
2. Penghentiaan Aset Dari Penggunaan Sedan sebesar Rp404.107.340.

Mutasi kurang sebesar Rp430.984.260 adalah berupa Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan, yang terdiri dari:

- a. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Sepeda Motor sebesar Rp19.500.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024;
- b. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) sebesar Rp124.922.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024;
- c. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Sepeda Motor sebesar Rp48.882.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024;
- d. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Sepeda Motor sebesar Rp19.500.000 sesuai Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024.
- e. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Sepeda Motor sebesar Rp19.500.000 sesuai Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024.
- f. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)sebesar Rp198.680.260 sesuai Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024.

Berikut adalah tabel rincian Aset Lain-lain pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode 30 Juni 2024:

Rincian Aset Lain-Lain Periode 30 Juni 2024

KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
3.02.01.01.001	Sedan	Unit	2	404.107.340
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	327.034.260
TOTAL			4	731.141.600

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp4.915.467.100)*

C.26 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp4.915.467.100) dan (Rp4.615.309.760). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

**Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Lainnya**

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	4.184.325.500	(4.184.325.500)	0
Jumlah	4.184.325.500	(4.184.325.500)	0
Aset Tak Berwujud Lainnya	69.971.060	-	69.971.060
Aset Lain-Lain	731.141.600	(731.141.600)	
Jumlah	4.985.438.160	(4.915.467.100)	69.971.060

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp625.000.000*

C.27 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp625.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Berikut adalah tabel uang muka dari KPP periode 30 Juni 2024:

Keterangan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Saldo UP	Rp 45.477.813	Rp -
Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp 254.522.187	Rp -
Saldo TUP	Rp 325.000.000	
Kuitansi TUP yang belum di SPJ-kan		Rp -
Jumlah	Rp 625.000.000	Rp -

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp1.167.847.708*

C.28 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.167.847.708 dan Rp687.628.955. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp687.628.955 telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2024.

Berikut adalah Tabel pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional:

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/ SP2D di 2024	589.375.493	Dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2024 sesuai SP2D nomor 249991304001179, 249991304001181,249991304001180, 249991304001140,249991303002562, 249991303002559,249991303002563, 249991303002543,249991303002561 dan 249991303002564
2	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100163555	59.552.282	Dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2024 sesuai dengan SP2D Nomor 241391303000316
3	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100717100 dan ID	37.728.322	
4	Utang atas tagihan telepon Bulan Desember 2023	972.858	
Jumlah Total		687.628.955	

Pada 30 Juni 2024 terdapat saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp1.167.847.708 yang dikarenakan adanya SPP yang sudah direkam pada Aplikasi SAKTI tetapi belum terbit SP2Dnya. Rincian utang pihak ketiga periode 30 Juni 2024 Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut :

NO	Satker	Jumlah	Keterangan
1	BPHN	2.362.202	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Kekurangan Gaji ke-13 Tahun 2024 sebanyak 6 Pegawai/14 Jiwa.
		15.150.518	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2024 sebanyak 4 PPPK/8 Jiwa
		1.135.034.988	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Gaji Induk Bulan Juli 2024 sebanyak 227 Pegawai/565 Jiwa.
		15.300.000	Pembayaran Belanja Barang sesuai SK Nomor PHN.1-45.KP.08.01 Tahun 2024 tanggal 01 Maret 2024. Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2024 untuk 3 Pegawai. Kantor BPHN TA. 2024
Jumlah		1.167.847.708	

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp259.472.187*

C.29 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp259.472.187 dan Rp0. Pada periode 30 Juni 2024 terdapat saldo Utang Yang Belum Ditagihkan sebesar Rp259.472.187 yang berupa

kuitansi-kuitansi yang sudah dicatat pada modul komitmen pada periode ini, tetapi SPPnya belum diterbitkan.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0*

C.30 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp27.547.806. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pada periode 30 Juni 2024 nilai pendapatan diterima dimuka Rp0, dikarenakan sudah dilakukan jurnal balik pada awal tahun.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.31 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.

*Ekuitas
Rp394.581.679.93
5*

C.32 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp394.581.679.935 dan Rp399.075.137.055. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB

Rp27.547.806

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp27.547.806 dan Rp9.358.395. Berikut adalah perbandingan rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	27.547.806	9.358.395	194,36
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	-
Jumlah	27.547.806	9.358.395	194,36

Pendapatan LO sebesar Rp27.547.806 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan pendapatan bukan pajak berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.547.806 yang merupakan jurnal balik penyesuaian atas Pendapatan Sewa Kantin BPHN tahun 2023 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-PB.03.01-34 Tanggal 12 September 2023 sebesar Rp31.514.000.

Beban Pegawai

Rp11.219.962.835

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.219.962.835 dan Rp10.267.024.492 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS),

dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berikut adalah rincian Beban Pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023:

Rincian Beban Pegawai
Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	7.683.030.400	7.068.817.080	8,69
Beban Pembulatan Gaji PNS	112.749	111.218	1,38
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	511.424.230	461.869.590	10,73
Beban Tunj Anak PNS	135.651.038	121.539.652	11,61
Beban Tunj. Struktural PNS	240.780.000	231.780.000	3,88
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.162.284.000	1.174.758.000	-1,06
Beban Tunj. PPh PNS	151.850.104	63.341.052	139,73
Beban Tunj. Beras PNS	364.707.120	361.737.900	0,82
Beban Uang Makan PNS	605.395.000	615.180.000	-1,59
Beban Tunjangan Umum PNS	91.725.000	95.280.000	-3,73
Beban Gaji Pokok PPPK	60.624.000	72.610.000	(17)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	834	-	100
Beban Tunjangan Suami/Istri P	2.858.800	-	100
Beban Tunjangan Anak PPPK	571.760	-	100
Beban Tunjangan Fungsional P	8.800.000	-	100
Beban Tunjangan Beras PPPK	2.896.800	-	100
Beban Uang Makan PPPK	4.382.000	-	100
Beban Uang Lembur	190.114.000	-	100
Beban Uang Lembur PPPK	2.755.000	-	100
Jumlah	11.219.962.835	10.267.024.492	9,28

Terdapat perbedaan sebesar Rp 1.152.547.708 antara belanja pegawai pada Laporan Realiasi Anggaran dan Beban Pegawai pada Laporan Operasional. Hal ini disebabkan karena SPP Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan Juli 2024 yang sudah diinput di aplikasi SAKTI pada bulan juni sehingga menimbulkan utang kepada pihak ketiga yang juga menambah beban pegawai pada Laporan Operasional. Berikut adalah

selisih belanja pegawai dan beban pegawai yang dijelaskan dalam tabel:

BELANJA PEGAWAI (LRA)	BEBAN PEGAWAI (LO)	SELISIH	KETERANGAN
10.067.415.127	11.219.962.835	-2.362.202	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Kekurangan Gaji ke-13 Tahun 2024 sebanyak 6 Pegawai/14 Jiwa.
		-15.150.518	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2024 sebanyak 4 PPPK/8 Jiwa
		-1.135.034.988	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Gaji Induk Bulan Juli 2024 sebanyak 227 Pegawai/565 Jiwa.
		-15.300.000	Pembayaran Belanja Barang sesuai SK Nomor PHN.1-45.KP.08.01 Tahun 2024 tanggal 01 Maret 2024. Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2024 untuk 3 Pegawai. Kantor BPHN TA. 2024
	Total	1.152.547.708	

Beban Persediaan
Rp240.445.993

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp240.445.993 dan Rp198.007.057. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Berikut adalah rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan ***Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023***

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	240.445.993	198.007.057	21,43
Beban Persediaan Bahan Baku	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	240.445.993	198.007.057	21,43

*Beban Barang dan
Jasa
Rp6.207.746.847*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.207.746.847 dan Rp5.026.695.080. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Berikut adalah Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.215.202.254	1.823.621.504	21,47
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0,00
Beban belanja barang - Penanganan Covid	0	53.464.000	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	41.100.000	12.283.300	234,60
Beban Barang Operasional Lainnya	9.652.600	19.912.667	
Beban Bahan	1.147.518.414	642.518.590	78,60
Beban Honor Output Kegiatan	129.264.000	67.010.000	92,90
Beban Barang Non Operasional Lainnya	45.175.452	113.808.345	(60,31)
Beban Langganan Listrik	487.436.864	512.475.063	(4,89)
Beban Langganan Telepon	4.681.579	6.201.607	(24,51)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	112.237.425	111.423.475	0,73
Beban Sewa	1.476.174.000	1.097.098.000	34,55
Beban Jasa Profesi	147.272.259	213.310.000	(30,96)
Belanja Jasa - Penanganan Covid		353.163.529	
Beban Jasa Lainnya	392.032.000	405.000	96698,02
Jumlah	6.207.746.847	5.026.695.080	23,50

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.726.708.168*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.726.708.168 dan Rp1.828.494.749. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian

beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	993.326.040	1.159.532.451	(14,33)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	663.181.328	602.597.798	10,05
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	70.200.800	66.364.500	5,78
Beban Persediaan suku Cadang		0	0,00
Jumlah	1.726.708.168	1.828.494.749	(5,57)

*Beban Perjalanan Dinas
Rp2.526.190.847*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.526.190.847 dan Rp5.195.805.720. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.698.122.092	3.080.370.289	-44,87
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	249.400.000	204.560.000	21,92
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	108.082.000	856.800.000	-87,39
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	361.297.868	1.054.075.431	-65,72
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	109.288.887	0	0,00
Jumlah	2.526.190.847	5.195.805.720	(51,38)

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk

barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp3.025.899.078

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.025.899.078 dan Rp2.956.525.650. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Pada Periode 30 Juni 2024 Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Rp0 dikarenakan belum dilakukan tutup buku pada modul aset aplikasi SAKTI (menunggu arahan dari Biro BMN). Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	942.184.847	960.412.724	(1,90)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.083.714.231	1.996.112.926	4,39
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	3.025.899.078	2.956.525.650	2,35
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.025.899.078	2.956.525.650	2,35

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp295.744)*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp295.744) dan (Rp0). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-295.744	0	
Jumlah	-295.744	0	

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp178.007.053*

D.11 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari

Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
Periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023**

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	115.487.000	0	0,00
Pendapatan dari Pemindahtangann BMN Lainnya	0	0	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	53	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	62.520.000	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	178.007.053	0	#DIV/0!

Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I Tahun 2024 sebesar Rp178.007.053 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024 berupa 1 (satu) paket Eks Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat yaitu: 1 Mobil Mitsubishi Tahun 2004, Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2006 NTPN BC71D2G4VPKREJFV sebesar Rp115.487.000;
2. Penerimaan kembali kelebihan pembayaran kendaraan operasional sewa TA 2023 pada kantor BPHN NTPN 7F3E361QV3UJHP6K sebesar Rp62.520.000 sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
3. Pembulatan belanja pegawai sebesar Rp53 sesuai dengan SPM Nomor 00015T tanggal 9 Januari 2024.

Pos Luar Biasa Rp0 **D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp399.075.137.055*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 dan 01 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp399.075.137.055 dan Rp400.237.667.014.

*Defisit LO
(Rp24.741.103.165)*

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar (Rp24.741.103.165) dan (Rp25.463.194.353). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp0*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai reklasifikasi aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan aset yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kurang atas reklasifikasi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0*

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi (Rp0)*

E.3.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp(0) dan Rp(0).

Berikut adalah Tabel rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 Juni 2024

No	Tanggal	Uraian	Nilai	Keterangan
1	-	-	-	-
		Jumlah	-	

*Koreksi Lain-Lain
(Rp0)*

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp20.247.646.045

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.247.646.045 dan Rp21.231.730.644. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Berikut adalah tabel rincian transaksi antar entitas periode 30 Juni 2024:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(237.155.783)
Ditagihkan ke Entitas Lain	20.547.014.328
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	(62.212.500)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	20.247.646.045

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024 adalah Rp237.155.783 yang terdiri dari:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024 berupa 1 (satu) paket Eks Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat yaitu: 1 Mobil Mitsubishi

- Tahun 2004, Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2006 NTPN BC71D2G4VPKREJFV sebesar Rp115.487.000;
2. Penerimaan Kembali Kelebihan bayar pekerjaan konstruksi renovasi Lt 2 Gd annex ruang kerja pimpinan GD. SJDI dan Ruang Kerja Gd. Induk Kantor BPHN sesuai dengan Klarifikasi Kontrak Hasil Pemeriksaan Fisik oleh PT. Aisha Bangun Raya Nomor Kontrak PHN.1-PB.02.01-1093 tanggal 22 April 2024 NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI sebesar Rp47.080.355 sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
 3. Penerimaan Kembali Kelebihan/Selisih Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Terkait Pengadaan Outsourcing Tahun 2023 NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 sebesar Rp12.068.375 sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
 4. Penerimaan kembali kelebihan pembayaran kendaraan operasional sewa TA 2023 pada kantor BPHN NTPN 7F3E361QV3UJHP6K sebesar Rp62.520.000 sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
 5. Pembulatan belanja pegawai sebesar Rp53 sesuai dengan SPM Nomor 00015T tanggal 9 Januari 2024.

Sedangkan DKEL sebesar Rp20.547.014.328 berupa transaksi belanja pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Periode 30 Juni 2024

Akun	Uraian	Transaksi belanja
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 9.809.562.451
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp 64.983.676
5122	Belanja Lembur	Rp 192.869.000
5211	Belanja Barang Operasional	Rp 2.236.802.854
5212	Belanja Barang Non Operasional	Rp 1.296.673.366
5218	Belanja Barang Persediaan	Rp 214.757.926
5221	Belanja Jasa	Rp 2.718.087.589
5231	Belanja Pemeliharaan	Rp 1.633.608.406
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 2.359.696.160
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp -
5361	Belanja Modal Lainnya	Rp 19.972.900
Jumlah Total		Rp 20.547.014.328

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada Periode 30 Juni 2024 tidak terdapat Transfer Masuk pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Berikut adalah Tabel Rincian Transfer Keluar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode 30 Juni 2024:

Transfer Masuk	Nilai
Peralatan dan Mesin	82.950.000
Penyusutan Transfer Masuk (Peralatan dan mesin)	(20.737.500)
Jumlah	62.212.500

Pada periode 30 Juni 2024 terdapat transfer keluar sebesar Rp62.212.500 berupa transfer peralatan dan mesin beserta akumulasi penyusutannya ke kantor wilayah. Berikut adalah Tabel rincian transfer keluar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode 30 Juni 2024:

No	Transfer Keluar	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk
1	Pencatatan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ULING PANDANG	13.875.000
2	Akumulasi Penyusutan Pelebaran dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ULING PANDANG	- 3.400.250
3	Pencatatan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	13.875.000
4	Akumulasi Penyusutan Pelebaran dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	- 3.400.250
5	Pencatatan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	13.875.000
6	Akumulasi Penyusutan Pelebaran dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	- 3.400.250
7	Pencatatan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	13.875.000
8	Akumulasi Penyusutan Pelebaran dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	- 3.400.250
9	Pencatatan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	13.875.000
10	Akumulasi Penyusutan Pelebaran dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	- 3.400.250
11	Pencatatan Mesin	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RAJ	13.875.000
12	Akumulasi Penyusutan Pelebaran dan Mesin	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RAJ	- 3.400.250
JUMLAH			69.219.500

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Ekuitas Akhir

Rp394.581.679.935

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp394.581.679.935 dan Rp396.006.203.305.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada tanggal 02 Januari 2024 telah dilakukan jurnal balik atas jurnal atas pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa kantin pada akhir tahun 2023 sebesar Rp27.547.806 (memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
2. Pada tanggal 08 Januari 2024 telah dilakukan pembayaran atas pengajuan BAST RPATA untuk SPM Pembayaran 2023 sebesar Rp589.375.493 sesuai SP2D Nomor 249991304001179, 249991304001181, 249991304001180, 249991304001140, 249991303002562, 249991303002559, 249991303002563, 249991303002543, 249991303002561 dan 249991303002564 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
3. Pada Tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan Jurnal Balik atas Koreksi beban atas Kelebihan Pembayaran Outsourcing dan telah disetorkan ke kas negara pada 2024 sebesar Rp12.068.375 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
4. Pada Tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI sebesar Rp47.080.355 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
5. Pada Tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan Jurnal Balik penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp295.744. Jurnal balik penyisihan piutang tidak

tertagih terdiri dari Penyisihan Piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp60.342 dan Penyisihan Piutang lainnya atas koreksi aset terkait kelebihan pembayaran belanja modal yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp235.402;

6. Pada tanggal 18 Januari 2024 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100163555 sebesar Rp59.552.282 sesuai SP2D nomor 241391303000316 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
7. Pada tanggal 18 Januari 2023 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100717100 dan ID 547102931079 sebesar Rp37.728.322 sesuai SP2D nomor 241391303000316 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
8. Pada tanggal 02 Februari 2024 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan telepon kantor BPHN sebesar Rp972.858 sesuai SP2D nomor 2413913303001196 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
9. Pada Neraca DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat penambahan aset karena adanya belanja modal lainnya yang telah terealisasi sebesar Rp19.972.900 Namun secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar (Rp3,156,313,986), hal tersebut disebabkan karena:
 - a. Penyelesaian RPATA sebesar Rp589.375.493;
 - b. Adanya Pemakaian Persediaan sebesar Rp64.946.829;
 - c. Adanya Penurunan Nilai Peralatan dan mesin sebesar Rp.814.091.600 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Adanya pengurangan nilai peralatan dan mesin sebesar (Rp82.950.000) berupa Transfer Keluar

Laptop Kantor Wilayah dengan rincian sebagai berikut :

- a) Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-10 tanggal 29 Februari 2024;
 - b) Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-11 tanggal 29 Februari 2024;
 - c) Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-12 tanggal 29 Februari 2024;
 - d) Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-13 tanggal 29 Februari 2024;
 - e) Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-14 tanggal 29 Februari 2024;
 - f) Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-15 tanggal 29 Februari 2024.
- 2) Adanya Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp731.141.600 berupa Penghentian Aset dari Penggunaan yang terdiri dari;
- a) Rincian Penghentian Aset Dari Penggunaan Sedan senilai Rp404.107.340 sesuai dengan

Berita Acara Nomor PHN.1-PB.05.05-03 Tanggal 31 Mei 2024;

b) Penghentian Aset dari Penggunaan Mini Bus senilai Rp 327.034.260 sesuai dengan Berita Acara Nomor PHN.1-PB.05.05-03 Tanggal 31 Mei 2024.

d. Akumulasi Penyusutan Aset sebesar Rp2.274.019.978;

e. Adanya Penurunan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp300.157.340.

10. Untuk Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional telah terjadi perubahan keanggotaan Tim Pengelola Keuangan dan Tim Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dengan Rincian sebagai berikut :

No	Nama	Semula		Menjadi	
		Jabatan	No. SK	Jabatan	No. SK
1	Tika Fidya Wati	Staff Pengelola Keuangan (Pengelola Keuangan)	PHN.1- 01.KU.02.03 Tanggal 2 Januari 2024	Anggota Tim SAI (Pranata Laporan Keuangan)	PHN.1- 01.KU.04.01 Tanggal 7 Mei 2024
2	Ratna Jamilah	Anggota Tim SAI (Penata Keuangan)	PHN.1- 01.KU.04.01 2 Januari 2024	PPABP (Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran)	PHN.1- 04.KU.02.03 Tanggal 2 Mei 2024
3	Khaliza Mutia	PPNPN	-	Staff Pengelola Keuangan (Arsiparis Ahli Pertama)	PHN.1- 04.KU.02.03 Tanggal 2 Mei 2024

F.3 Tindak Lanjut Temuan

Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut :

1. Kelebihan / selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan Outsourcing tahun 2023 dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN

9D5EA55DF96JNTN9 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp12.068.375;

2. Kelebihan pekerjaan konstruksi renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SJDI serta Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp47.080.355;
3. Kelebihan pembayaran kendaraan operasional sewa dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 7F3E561QV3UJHP6K tanggal 15 Mei 2024 sebesar Rp62.520.000.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	625,000,000	0	625,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	59,148,730	(59,148,730)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(295,744)	295,744	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	58,852,986	(58,852,986)	(100.00)
Persediaan	116,129,741	181,076,570	(64,946,829)	(35.87)
JUMLAH ASET LANCAR	741,129,741	239,929,556	501,200,185	208.89
ASET TETAP				
Tanah	356,165,357,000	356,165,357,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	25,791,465,257	26,605,556,857	(814,091,600)	(3.06)
Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	62,954,462,581	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442	1,123,767,442	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(50,212,153,251)	(47,938,133,273)	(2,274,019,978)	4.74
JUMLAH ASET TETAP	395,822,899,029	398,911,010,607	(3,088,111,578)	(0.77)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,254,296,560	4,234,323,660	19,972,900	0.47
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	589,375,493	(589,375,493)	(100.00)
Aset Lain-lain	731,141,600	430,984,260	300,157,340	69.64
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,915,467,100)	(4,615,309,760)	(300,157,340)	6.50
JUMLAH ASET LAINNYA	69,971,060	639,373,653	(569,402,593)	(89.06)
JUMLAH ASET	396,633,999,830	399,790,313,816	(3,156,313,986)	(0.79)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,167,847,708	687,628,955	480,218,753	69.84
Utang Yang Belum Ditagihkan	259,472,187	0	259,472,187	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	27,547,806	(27,547,806)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	625,000,000	0	625,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,052,319,895	715,176,761	1,337,143,134	186.97
JUMLAH KEWAJIBAN	2,052,319,895	715,176,761	1,337,143,134	186.97
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	394,581,679,935	399,075,137,055	(4,493,457,120)	(1.13)
JUMLAH EKUITAS	394,581,679,935	399,075,137,055	(4,493,457,120)	(1.13)
JUMLAH EKUITAS	394,581,679,935	399,075,137,055	(4,493,457,120)	(1.13)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	396,633,999,830	399,790,313,816	(3,156,313,986)	(0.79)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tgl Cetak : 23/07/24 7:41 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik oleh :
I GUSTI PUTU MILAWATI
197705092001122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	325,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	116,129,741	0
0.0	131111	Tanah	356,165,357,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	25,791,465,257	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	22,505,090,017
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	27,707,063,234
0.0	162151	Software	4,184,325,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	69,971,060	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	731,141,600	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	731,141,600
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,184,325,500
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	1,152,547,708
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	15,300,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	259,472,187
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	625,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	20,547,014,328
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	237,155,783	0
0.0	313211	Transfer Keluar	62,212,500	0
0.0	391111	Ekuitas	0	399,075,137,055
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	115,487,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	27,547,806
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	62,520,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	7,683,030,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	112,749	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	511,424,230	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	135,651,038	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	240,780,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,162,284,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	151,850,104	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	364,707,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	605,395,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	91,725,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	60,624,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:41 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	834	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,858,800	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	571,760	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8,800,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,896,800	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	4,382,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	190,114,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	2,755,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,215,202,254	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	41,100,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	9,652,600	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,147,518,414	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	129,264,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	45,175,452	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	487,436,864	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,681,579	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	112,237,425	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,476,174,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	147,272,259	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	392,032,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	993,326,040	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	663,181,328	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,698,122,092	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	249,400,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	108,082,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	361,297,868	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	109,288,887	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	942,184,847	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,083,714,231	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	240,445,993	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	70,200,800	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	295,744
JUMLAH			477,007,942,232	477,007,942,232

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



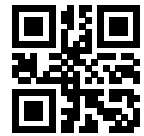
Ditandatangani secara elektronik oleh :
I GUSTI PUTU MILAWATI
197705092001122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:41 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

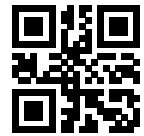
KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	20,547,014,328
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	237,155,783	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	115,487,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	74,588,375
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47,080,355
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6,828,083,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	107,231	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	453,652,470	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	120,475,902	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	211,775,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,037,016,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	147,646,742	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	324,007,080	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	605,395,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	81,410,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	48,499,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	588	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,287,040	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	457,408	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,040,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,317,440	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	4,382,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	190,114,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	2,755,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,199,902,254	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	27,248,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	9,652,600	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,127,721,914	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	125,776,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	43,175,452	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	154,722,300	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	60,035,626	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	584,717,468	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,654,437	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	112,237,425	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,476,174,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:41 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	147,272,259	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	392,032,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	942,865,040	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27,862,038	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	662,881,328	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,661,196,292	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	237,670,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	108,082,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	352,747,868	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	19,972,900	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	6,174
JUMLAH			20,784,176,285	20,784,176,285

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 23 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I GUSTI PUTU MILAWATI

197705092001122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:41 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	399,075,137,055	400,237,667,014	(1,162,529,959)	(0.29)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(24,741,103,165)	(25,463,194,353)	722,091,188	(2.84)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	20,247,646,045	21,231,730,644	(984,084,599)	(4.63)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,493,457,120)	(4,231,463,709)	(261,993,411)	6.19
EKUITAS AKHIR	394,581,679,935	396,006,203,305	(1,424,523,370)	(0.36)

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 23 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I GUSTI PUTU MILAWATI

197705092001122001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:40 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	27,547,806	9,358,395	18,189,411	194.365
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	27,547,806	9,358,395	18,189,411	194.365
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	27,547,806	9,358,395	18,189,411	194.365
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	11,219,962,835	10,267,024,492	952,938,343	9.282
Beban Persediaan	240,445,993	198,007,057	42,438,936	21.433
Beban Barang dan Jasa	6,207,746,847	5,026,695,080	1,181,051,767	23.496
Beban Pemeliharaan	1,726,708,168	1,828,494,749	(101,786,581)	(5.567)
Beban Perjalanan Dinas	2,526,190,847	5,195,805,720	(2,669,614,873)	(51.38)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:40 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,025,899,078	2,956,525,650	69,373,428	2.346
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(295,744)	0	(295,744)	()
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	24,946,658,024	25,472,552,748	(525,894,724)	(2.065)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(24,919,110,218)	(25,463,194,353)	544,084,135	(2.137)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	115,487,000	0	115,487,000	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	115,487,000	0	115,487,000	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	62,520,053	0	62,520,053	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	62,520,053	0	62,520,053	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	178,007,053	0	178,007,053	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(24,741,103,165)	(25,463,194,353)	722,091,188	(2.836)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(24,741,103,165)	(25,463,194,353)	722,091,188	(2.836)

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kupon Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik oleh :
I GUSTI PUTU MILAWATI
197705092001122001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 10
SATUAN KERJA : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 409288

Tgl Data : 23/07/24 12:28 AM
Tgl Cetak : 23/07/24 7:41 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	42,810,145,000	20,547,014,328	(22,263,130,672)	48	47,741,425,000	21,568,981,820	26,172,443,180	45
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik oleh
I GUSTI PUTU MILAWATI
197705092001122001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 10 **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 409288 **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 23/07/24 7:42 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	115,487,000	0	115,487,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	115,487,000	0	115,487,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53	0	53	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	74,588,375	0	74,588,375	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47,080,355	0	47,080,355	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	121,668,783	0	121,668,783	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	237,155,783	0	237,155,783	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	237,155,783	0	237,155,783	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**



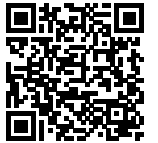
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 409288
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DKI JAKARTA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 23/07/24 7:41 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 23/7/24 7:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,156,816,000	11,911,736,000	6,828,083,200	0	6,828,083,200	57.32	5,083,652,800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	177,000	178,000	107,231	6,174	101,057	60.24	76,943
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	750,000,000	791,868,000	453,652,470	0	453,652,470	57.29	338,215,530
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	198,000,000	210,837,000	120,475,902	0	120,475,902	57.14	90,361,098
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	934,000,000	368,140,000	211,775,000	0	211,775,000	57.53	156,365,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	911,000,000	1,793,884,000	1,037,016,000	0	1,037,016,000	57.81	756,868,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	77,900,000	171,476,000	147,646,742	0	147,646,742	86.1	23,829,258
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	603,000,000	565,818,000	324,007,080	0	324,007,080	57.26	241,810,920
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,064,480,000	1,459,980,000	605,395,000	0	605,395,000	41.47	854,585,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	254,000,000	142,190,000	81,410,000	0	81,410,000	57.25	60,780,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	16,949,373,000	17,416,107,000	9,809,568,625	6,174	9,809,562,451	56.32	7,606,544,549
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	122,000,000	48,499,200	0	48,499,200	39.75	73,500,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	8,000	588	0	588	7.35	7,412
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,000,000	2,287,040	0	2,287,040	38.12	3,712,960
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,500,000	457,408	0	457,408	30.49	1,042,592
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	17,600,000	7,040,000	0	7,040,000	40	10,560,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	5,800,000	2,317,440	0	2,317,440	39.96	3,482,560
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	31,680,000	4,382,000	0	4,382,000	13.83	27,298,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	184,588,000	64,983,676	0	64,983,676	35.2	119,604,324
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	455,280,000	455,280,000	190,114,000	0	190,114,000	41.76	265,166,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	37,056,000	2,755,000	0	2,755,000	7.43	34,301,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	455,280,000	492,336,000	192,869,000	0	192,869,000	39.17	299,467,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	17,404,653,000	18,093,031,000	10,067,421,301	6,174	10,067,415,127	55.64	8,025,615,873
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,461,910,000	4,464,342,000	2,199,902,254	0	2,199,902,254	49.28	2,264,439,746
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	9,300,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80,256,000	81,744,000	27,248,000	0	27,248,000	33.33	54,496,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,500,000	30,500,000	9,652,600	0	9,652,600	31.65	20,847,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	4,581,966,000	4,585,886,000	2,236,802,854	0	2,236,802,854	48.78	2,349,083,146

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 409288
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DKI JAKARTA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 23/07/24 7:41 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 23/7/24 7:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,722,881,000	2,494,161,000	1,127,721,914	0	1,127,721,914	45.21	1,366,439,086
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	511,380,000	508,378,000	125,776,000	0	125,776,000	24.74	382,602,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	371,960,000	397,315,000	43,175,452	0	43,175,452	10.87	354,139,548
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,606,221,000	3,399,854,000	1,296,673,366	0	1,296,673,366	38.14	2,103,180,634
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	405,456,000	357,557,000	154,722,300	0	154,722,300	43.27	202,834,700
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	100,000,000	100,000,000	60,035,626	0	60,035,626	60.04	39,964,374
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	505,456,000	457,557,000	214,757,926	0	214,757,926	46.94	242,799,074
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,716,000,000	1,716,000,000	584,717,468	0	584,717,468	34.07	1,131,282,532
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	60,000,000	5,654,437	0	5,654,437	9.42	54,345,563
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	448,300,000	448,300,000	112,237,425	0	112,237,425	25.04	336,062,575
522141	Belanja Sewa	1,327,924,000	1,530,316,000	1,476,174,000	0	1,476,174,000	96.46	54,142,000
522151	Belanja Jasa Profesi	672,900,000	679,500,000	147,272,259	0	147,272,259	21.67	532,227,741
522191	Belanja Jasa Lainnya	285,344,000	1,006,773,000	392,032,000	0	392,032,000	38.94	614,741,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4,510,468,000	5,440,889,000	2,718,087,589	0	2,718,087,589	49.96	2,722,801,411
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,807,209,000	1,807,209,000	942,865,040	0	942,865,040	52.17	864,343,960
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	41,100,000	35,000,000	27,862,038	0	27,862,038	79.61	7,137,962
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,520,804,000	1,571,070,000	662,881,328	0	662,881,328	42.19	908,188,672
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,369,113,000	3,413,279,000	1,633,608,406	0	1,633,608,406	47.86	1,779,670,594
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,545,041,000	3,473,503,000	1,661,196,292	0	1,661,196,292	47.82	1,812,306,708
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	727,880,000	709,970,000	237,670,000	0	237,670,000	33.48	472,300,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,397,424,000	1,164,081,000	108,082,000	0	108,082,000	9.28	1,055,999,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,283,545,000	1,882,095,000	352,747,868	0	352,747,868	18.74	1,529,347,132
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	8,953,890,000	7,229,649,000	2,359,696,160	0	2,359,696,160	32.64	4,869,952,840
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	170,000,000	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	170,000,000	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	24,697,114,000	24,697,114,000	10,459,626,301	0	10,459,626,301	42.35	14,237,487,699
53	BELANJA MODAL							
5361	Belanja Modal Lainnya							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 409288
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DKI JAKARTA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 23/07/24 7:41 AM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 23/7/24 7:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
536111	Belanja Modal Lainnya	20,000,000	20,000,000	19,972,900	0	19,972,900	99.86	27,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	20,000,000	20,000,000	19,972,900	0	19,972,900	99.86	27,100
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	20,000,000	20,000,000	19,972,900	0	19,972,900	99.86	27,100
	JUMLAH BELANJA	42,121,767,000	42,810,145,000	20,547,020,502	6,174	20,547,014,328	48	22,263,130,672



LAMPIRAN

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024**

UAPB : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
UAKPB : 409288 **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl.Data : 23/07/24 6:20 AM
Tgl.Cetak : 23/07/24 7:48 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	116,129,741
131111	Tanah	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	25,791,465,257
133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581
135121	Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22,505,090,017)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(27,707,063,234)
162151	Software	4,184,325,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	69,971,060
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	731,141,600
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(731,141,600)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,184,325,500)
J U M L A H		396,008,999,830

Jakarta, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh
I Gusti Putu Milawati
197705092001122001



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024(SALDO AWAL)
 TAHUN ANGGARAN 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tanggal : 23/07/24 7:48 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	181,076,570
131111	Tanah	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	26,605,556,857
133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581
135121	Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22,314,784,270)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(25,623,349,003)
162151	Software	4,184,325,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	49,998,160
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	430,984,260
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(430,984,260)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,184,325,500)
J U M L A H		399,142,085,337

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAKPB : 409288

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tanggal : 23/07/24 7:45 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		6	4,184,325,500	0	0	0	0	6	4,184,325,500
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	6	4,184,325,500	0	0	0	0	6	4,184,325,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		519	49,998,160	202	19,972,900	0	0	721	69,971,060
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	519	49,998,160	202	19,972,900	0	0	721	69,971,060
TOTAL				4,234,323,660		19,972,900		0		4,254,296,560



Jakarta, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:45 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

UAPB : 013
UAKPB : 409288

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
20101	TANAH PERSIL	-	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin		4,037	26,732,140,857	0	0	10	814,091,600	4,027	25,918,049,257
30103	ALAT BANTU	-	19	2,335,666,500	0	0	0	0	19	2,335,666,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	29	5,297,865,190	0	0	4	731,141,600	25	4,566,723,590
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	2	10,380,492	0	0	0	0	2	10,380,492
30303	ALAT UKUR	-	3	4,507,972	0	0	0	0	3	4,507,972
30501	ALAT KANTOR	-	928	2,450,558,045	0	0	0	0	928	2,450,558,045
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,993	5,494,822,671	0	0	0	0	1,993	5,494,822,671
30601	ALAT STUDIO	-	141	2,581,340,592	0	0	0	0	141	2,581,340,592
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	149	440,948,420	0	0	0	0	149	440,948,420
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	22	16,649,160	0	0	0	0	22	16,649,160
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	26	330,083,510	0	0	0	0	26	330,083,510
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	454	6,465,408,956	0	0	6	82,950,000	448	6,382,458,956
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	263	1,249,370,029	0	0	0	0	263	1,249,370,029
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	22,977,620	0	0	0	0	1	22,977,620
133111	Gedung dan Bangunan		18	62,954,462,581	0	0	0	0	18	62,954,462,581
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	18	62,954,462,581	0	0	0	0	18	62,954,462,581
135121	Aset Tetap Lainnya		27,336	1,123,767,442	0	0	0	0	27,336	1,123,767,442
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	27,336	1,123,767,442	0	0	0	0	27,336	1,123,767,442
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		7	430,984,260	4	731,141,600	7	430,984,260	4	731,141,600
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	7	430,984,260	4	731,141,600	7	430,984,260	4	731,141,600
TOTAL				447,406,712,140		731,141,600		1,245,075,860		446,892,777,880



Jakarta, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:44 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
20101	TANAH PERSIL	-	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin		3,728	26,605,556,857	0	0	10	814,091,600	3,718	25,791,465,257
30103	ALAT BANTU	-	19	2,335,666,500	0	0	0	0	19	2,335,666,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	29	5,297,865,190	0	0	4	731,141,600	25	4,566,723,590
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	2	10,380,492	0	0	0	0	2	10,380,492
30303	ALAT UKUR	-	3	4,507,972	0	0	0	0	3	4,507,972
30501	ALAT KANTOR	-	928	2,450,558,045	0	0	0	0	928	2,450,558,045
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,792	5,388,591,671	0	0	0	0	1,792	5,388,591,671
30601	ALAT STUDIO	-	133	2,579,580,592	0	0	0	0	133	2,579,580,592
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	59	423,081,420	0	0	0	0	59	423,081,420
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	26	330,083,510	0	0	0	0	26	330,083,510
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	454	6,465,408,956	0	0	6	82,950,000	448	6,382,458,956
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	263	1,249,370,029	0	0	0	0	263	1,249,370,029
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	22,977,620	0	0	0	0	1	22,977,620
133111	Gedung dan Bangunan		18	62,954,462,581	0	0	0	0	18	62,954,462,581
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	18	62,954,462,581	0	0	0	0	18	62,954,462,581
135121	Aset Tetap Lainnya		27,336	1,123,767,442	0	0	0	0	27,336	1,123,767,442
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	27,336	1,123,767,442	0	0	0	0	27,336	1,123,767,442
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		7	430,984,260	4	731,141,600	7	430,984,260	4	731,141,600
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	7	430,984,260	4	731,141,600	7	430,984,260	4	731,141,600
TOTAL				447,280,128,140		731,141,600		1,245,075,860		446,766,193,880



Jakarta, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tanggal : 23/07/24 7:48 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker_

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		721	69,971,060	0	0	0	69,971,060
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	721	69,971,060	0	0	0	69,971,060
JUMLAH			727	4,254,296,560	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	69,971,060



Jakarta, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh:
I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tgl Cetak : 23/07/24 7:48 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		309	126,584,000	(121,530,200)	(5,017,500)	(126,547,700)	36,300
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	201	106,231,000	(101,249,800)	(4,981,200)	(106,231,000)	0
30601	ALAT STUDIO	-	8	1,760,000	(1,760,000)	0	(1,760,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	90	17,867,000	(17,867,000)	0	(17,867,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	10	726,000	(653,400)	(36,300)	(689,700)	36,300
JUMLAH			309	126,584,000	(121,530,200)	(5,017,500)	(126,547,700)	36,300



Jakarta, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh:
I Gusti Putu Milawati
NIP 19770509200112200 1

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tgl Cetak : 23/07/24 7:48 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah	-	11,348	356,165,357,000	0	0	0	356,165,357,000
20101	TANAH PERSIL	-	11,348	356,165,357,000	0	0	0	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	-	3,718	25,791,465,257	(22,314,784,270)	(190,305,747)	(22,505,090,017)	3,286,375,240
30103	ALAT BANTU	-	19	2,335,666,500	(2,322,068,286)	(13,598,214)	(2,335,666,500)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	25	4,566,723,590	(4,361,704,475)	633,923,743	(3,727,780,732)	838,942,858
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	5	3,241,700	(2,953,445)	(96,085)	(3,049,530)	192,170
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	2	10,380,492	(10,380,492)	0	(10,380,492)	0
30303	ALAT UKUR	-	3	4,507,972	(4,507,972)	0	(4,507,972)	0
30501	ALAT KANTOR	-	928	2,450,558,045	(2,208,167,552)	(44,373,738)	(2,252,541,290)	198,016,755
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,792	5,388,591,671	(4,495,907,916)	(200,897,805)	(4,696,805,721)	691,785,950
30601	ALAT STUDIO	-	133	2,579,580,592	(2,263,448,219)	(63,187,754)	(2,326,635,973)	252,944,619
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	59	423,081,420	(407,958,420)	(4,821,000)	(412,779,420)	10,302,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	12	15,923,160	(15,923,160)	0	(15,923,160)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	26	330,083,510	(308,047,638)	(4,576,946)	(312,624,584)	17,458,926
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1	26,125,000	(9,796,875)	(1,632,813)	(11,429,688)	14,695,312
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	1	2,195,000	(2,195,000)	0	(2,195,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	448	6,382,458,956	(4,800,419,956)	(437,785,625)	(5,238,205,581)	1,144,253,375
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	263	1,249,370,029	(1,078,327,244)	(53,259,510)	(1,131,586,754)	117,783,275
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	22,977,620	(22,977,620)	0	(22,977,620)	0
133111	Gedung dan Bangunan	-	18	62,954,462,581	(25,623,349,003)	(2,083,714,231)	(27,707,063,234)	35,247,399,347
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	18	62,954,462,581	(25,623,349,003)	(2,083,714,231)	(27,707,063,234)	35,247,399,347
135121	Aset Tetap Lainnya	-	27,336	1,123,767,442	0	0	0	1,123,767,442
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	27,336	1,123,767,442	0	0	0	1,123,767,442
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	4	731,141,600	(430,984,260)	(300,157,340)	(731,141,600)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	4	731,141,600	(430,984,260)	(300,157,340)	(731,141,600)	0
JUMLAH			42,424	446,766,193,880	(48,369,117,533)	(2,574,177,318)	(50,943,294,851)	395,822,899,029



Jakarta, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Digitandatangani secara elektronik oleh

I Gusti Putu Milawati

197705092001122001

**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KODE UAKPB : 409288

TANGGAL : 23-07-2024
Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 23 JULI 2024
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
NIP. 197705092001122001

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAKPB : 409288

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tanggal : 23/07/24 7:49 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	4,194,150
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	76,800
1010301003	Penjepit Kertas	98,100
1010301004	Penghapus/Korektor	138,300
1010301005	Buku Tulis	20,532,000
1010301006	Ordner Dan Map	9,277,700
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	496,000
1010301010	Alat Perekat	455,450
1010301012	Staples	424,000
1010301013	Isi Staples	371,250
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	868,050
1010302001	Kertas HVS	12,554,000
1010302002	Berbagai Kertas	2,619,400
1010302004	Amplop	1,142,600
1010304004	Tinta/Toner Printer	21,712,400
1010304006	USB/Flash Disk	1,287,800
1010304010	Mouse	452,800
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	567,000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	2,270,617
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	16,733,082
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	27,500
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	1,495,947
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	3,649,795
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14,685,000
Jumlah Barang Konsumsi		116,129,741
TOTAL		116,129,741

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
131111 Tanah

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
Halaman : 1 dari 27
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		11,348	356,165,357,000	11,348	356,165,357,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	M2	11,348	356,165,357,000	11,348	356,165,357,000	0	0
TOTAL				356,165,357,000		356,165,357,000		0



Jakarta, 23 July 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 2 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010302001	Elevator /Lift		2	1,490,098,000	2	1,490,098,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	1,490,098,000	2	1,490,098,000	0	0
3010303003	Stationary Compressor		1	3,210,000	1	3,210,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	3,210,000	1	3,210,000	0	0
3010304002	Portable Generating Set		1	4,042,500	1	4,042,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	4,042,500	1	4,042,500	0	0
3010304003	Stationary Generating Set		3	114,416,000	3	114,416,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	114,416,000	3	114,416,000	0	0
3010305002	Portable Water Pump		5	126,665,000	5	126,665,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	5	126,665,000	5	126,665,000	0	0
3010305003	Stationary Water Pump		4	129,748,000	4	129,748,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	4	129,748,000	4	129,748,000	0	0
3010305005	Sumersible Pump		3	467,487,000	3	467,487,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	467,487,000	3	467,487,000	0	0
3020101001	Sedan		4	979,265,360	4	979,265,360	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	6	1,383,372,700	6	1,383,372,700	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Unit	(2)	(404,107,340)	(2)	(404,107,340)	0	0
3020101002	Jeep		2	849,150,000	2	849,150,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	849,150,000	2	849,150,000	0	0
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)		1	250,000,000	1	250,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	250,000,000	1	250,000,000	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		11	2,168,178,230	11	2,168,178,230	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 3 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Unit	13	2,495,212,490	13	2,495,212,490	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Unit	(2)	(327,034,260)	(2)	(327,034,260)	0	0
3020104001	Sepeda Motor		6	88,992,500	6	88,992,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	6	88,992,500	6	88,992,500	0	0
3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya		1	231,137,500	1	231,137,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	231,137,500	1	231,137,500	0	0
3030103001	Battery Charge		3	1,921,700	3	1,921,700	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	1,921,700	3	1,921,700	0	0
3030103031	Tester Listrik/Telepon/Internet		2	1,320,000	2	1,320,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,320,000	2	1,320,000	0	0
3030205001	Tool Kit Set		1	5,506,969	1	5,506,969	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,506,969	1	5,506,969	0	0
3030212025	Mesin Pompa air PMK		1	4,873,523	1	4,873,523	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,873,523	1	4,873,523	0	0
3030301064	Memori Programmer		2	2,417,972	2	2,417,972	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	2,417,972	2	2,417,972	0	0
3030308012	Termometer Standar		1	2,090,000	1	2,090,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,090,000	1	2,090,000	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)		6	9,546,000	6	9,546,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	9,546,000	6	9,546,000	0	0
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik		2	3,940,000	2	3,940,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	3,940,000	2	3,940,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 4 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050102002	Mesin Hitung Listrik		14	21,126,980	14	21,126,980	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	14	21,126,980	14	21,126,980	0	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio		5	234,200,000	5	234,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	234,200,000	5	234,200,000	0	0
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio		2	74,800,000	2	74,800,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	74,800,000	2	74,800,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal		87	161,964,500	87	161,964,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	87	161,964,500	87	161,964,500	0	0
3050104002	Lemari Kayu		56	114,759,000	56	114,759,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	56	114,759,000	56	114,759,000	0	0
3050104003	Rak Besi		278	334,819,890	278	334,819,890	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	278	334,819,890	278	334,819,890	0	0
3050104004	Rak Kayu		57	88,344,984	57	88,344,984	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	57	88,344,984	57	88,344,984	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi		152	292,050,721	152	292,050,721	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	152	292,050,721	152	292,050,721	0	0
3050104007	Brandkas		8	4,775,000	8	4,775,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	4,775,000	8	4,775,000	0	0
3050104011	Rotary Filing		2	4,467,000	2	4,467,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	4,467,000	2	4,467,000	0	0
3050104016	Roll Opek		7	10,906,000	7	10,906,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	10,906,000	7	10,906,000	0	0
3050104020	Lemari Display		2	8,000,000	2	8,000,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 5 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	8,000,000	2	8,000,000	0	0
3050105001	Tabung Pemadam Api		90	66,102,500	90	66,102,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	90	66,102,500	90	66,102,500	0	0
3050105002	Hydrant		3	23,372,000	3	23,372,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	23,372,000	3	23,372,000	0	0
3050105003	Sprinkler		1	1,156,000	1	1,156,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,156,000	1	1,156,000	0	0
3050105004	Fire Alarm		3	3,615,000	3	3,615,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	3,615,000	3	3,615,000	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System		3	163,281,745	3	163,281,745	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	163,281,745	3	163,281,745	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama		2	155,020,150	2	155,020,150	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	155,020,150	2	155,020,150	0	0
3050105010	White Board		33	7,807,890	33	7,807,890	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	33	7,807,890	33	7,807,890	0	0
3050105013	Copy Board/Elektric White Board		1	2,732,000	1	2,732,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,732,000	1	2,732,000	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas		17	106,706,000	17	106,706,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	106,706,000	17	106,706,000	0	0
3050105017	Mesin Absensi		8	138,762,000	8	138,762,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	138,762,000	8	138,762,000	0	0
3050105024	Alat Pemetong Kertas		3	11,528,000	3	11,528,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 6 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	11,528,000	3	11,528,000	0	0
3050105025	Headmachine Besar		3	2,690,000	3	2,690,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	2,690,000	3	2,690,000	0	0
3050105031	Panel Pameran		4	3,887,000	4	3,887,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	3,887,000	4	3,887,000	0	0
3050105037	White Board Electronic		2	4,278,000	2	4,278,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	4,278,000	2	4,278,000	0	0
3050105038	Laser Pointer		11	11,440,000	11	11,440,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	11,440,000	11	11,440,000	0	0
3050105039	Display		2	9,900,000	2	9,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	9,900,000	2	9,900,000	0	0
3050105045	Penangkal Petir		1	6,931,000	1	6,931,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	6,931,000	1	6,931,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus		15	161,709,500	15	161,709,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	161,709,500	15	161,709,500	0	0
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)		23	43,300,000	23	43,300,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	23	43,300,000	23	43,300,000	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector		18	126,925,935	18	126,925,935	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	18	126,925,935	18	126,925,935	0	0
3050105062	Bel		3	24,475,000	3	24,475,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	24,475,000	3	24,475,000	0	0
3050105095	Wastafel Portable		1	9,996,250	1	9,996,250	0	0
000	Saldo Awal TAYL	unit	1	9,996,250	1	9,996,250	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 7 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya		3	1,242,000	3	1,242,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	3	1,242,000	3	1,242,000	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal		2	2,156,234	2	2,156,234	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	2,156,234	2	2,156,234	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu		230	229,130,781	230	229,130,781	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	230	229,130,781	230	229,130,781	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal		324	357,392,000	212	307,580,000	112	49,812,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	324	357,392,000	212	307,580,000	112	49,812,000
3050201004	Kursi Kayu		12	3,372,000	12	3,372,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	3,372,000	12	3,372,000	0	0
3050201005	Sice		31	381,625,416	31	381,625,416	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	31	381,625,416	31	381,625,416	0	0
3050201008	Meja Rapat		111	332,597,000	111	332,597,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	111	332,597,000	111	332,597,000	0	0
3050201009	Meja Komputer		78	18,233,000	59	13,183,000	19	5,050,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	78	18,233,000	59	13,183,000	19	5,050,000
3050201010	Tempat Tidur Besi		1	2,866,234	1	2,866,234	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,866,234	1	2,866,234	0	0
3050201013	Meja Telepon		44	5,038,000	44	5,038,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	44	5,038,000	44	5,038,000	0	0
3050201014	Meja Resepsionis		4	23,064,000	4	23,064,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	23,064,000	4	23,064,000	0	0
3050201016	Kasur/Spring Bed		8	38,385,000	8	38,385,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 8 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	38,385,000	8	38,385,000	0	0
3050201017	Sketsel		3	9,007,000	3	9,007,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	9,007,000	3	9,007,000	0	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		450	609,206,830	386	559,542,830	64	49,664,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	450	609,206,830	386	559,542,830	64	49,664,000
3050202003	Jam Elektronik		1	92,000	1	92,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	92,000	1	92,000	0	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		1	2,886,500	1	2,886,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,886,500	1	2,886,500	0	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput		3	13,972,500	3	13,972,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	13,972,500	3	13,972,500	0	0
3050203004	Mesin Cuci		1	2,970,000	1	2,970,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,970,000	1	2,970,000	0	0
3050203005	Air Cleaner		1	2,299,000	1	2,299,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,299,000	1	2,299,000	0	0
3050203999	Alat Pembersih Lainnya		1	412,500	1	412,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	412,500	1	412,500	0	0
3050204001	Lemari Es		17	83,064,910	17	83,064,910	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	83,064,910	17	83,064,910	0	0
3050204003	A.C. Window		8	234,610,000	8	234,610,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	234,610,000	8	234,610,000	0	0
3050204004	A.C. Split		126	1,598,786,641	126	1,598,786,641	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 9 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	126	1,598,786,641	126	1,598,786,641	0	0
3050204006	Kipas Angin		2	1,254,000	2	1,254,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,254,000	2	1,254,000	0	0
3050205019	Mixer		1	6,462,500	1	6,462,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	6,462,500	1	6,462,500	0	0
3050206002	Televisi		29	166,810,000	29	166,810,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	29	166,810,000	29	166,810,000	0	0
3050206007	Loudspeaker		18	76,250,500	18	76,250,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	18	76,250,500	18	76,250,500	0	0
3050206008	Sound System		6	334,180,200	6	334,180,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	334,180,200	6	334,180,200	0	0
3050206012	Wireless		3	12,498,000	3	12,498,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	12,498,000	3	12,498,000	0	0
3050206014	Microphone		12	29,480,000	12	29,480,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	29,480,000	12	29,480,000	0	0
3050206015	Microphone Table Stand		3	2,013,000	3	2,013,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	2,013,000	3	2,013,000	0	0
3050206016	Mic Conference		1	84,150,000	1	84,150,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	84,150,000	1	84,150,000	0	0
3050206017	Unit Power Supply		5	90,190,000	5	90,190,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	90,190,000	5	90,190,000	0	0
3050206019	Stabilisator		1	275,000	0	0	1	275,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	275,000	0	0	1	275,000

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 10 dari 27
 Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050206020	Camera Video		2	99,327,860	2	99,327,860	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	99,327,860	2	99,327,860	0	0
3050206021	Tustel		1	3,076,250	1	3,076,250	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,076,250	1	3,076,250	0	0
3050206034	Tangga Aluminium		7	14,086,105	7	14,086,105	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	14,086,105	7	14,086,105	0	0
3050206036	Dispenser		33	92,144,534	33	92,144,534	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	33	92,144,534	33	92,144,534	0	0
3050206046	Handy Cam		4	70,398,500	4	70,398,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	70,398,500	4	70,398,500	0	0
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))		1	666,232	1	666,232	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	666,232	1	666,232	0	0
3050206056	Karpet		2	59,605,000	2	59,605,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	59,605,000	2	59,605,000	0	0
3050206057	Vertikal Blind		51	72,705,184	51	72,705,184	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	51	72,705,184	51	72,705,184	0	0
3050206058	Gordyin/Kray		317	264,581,100	317	264,581,100	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	317	264,581,100	317	264,581,100	0	0
3050206059	Kabel Roll		10	7,700,000	10	7,700,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	7,700,000	10	7,700,000	0	0
3050206061	Keset Kaki		8	25,224,000	8	25,224,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	25,224,000	8	25,224,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 11 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050206068	DVD Player		1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
3050206071	Kabel		8	3,459,500	3	2,029,500	5	1,430,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	3,459,500	3	2,029,500	5	1,430,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan		10	25,117,660	10	25,117,660	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	25,117,660	10	25,117,660	0	0
3060101002	Audio Mixing Portable		1	5,802,500	1	5,802,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,802,500	1	5,802,500	0	0
3060101003	Audio Mixing Stationer		2	20,702,000	2	20,702,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	20,702,000	2	20,702,000	0	0
3060101017	Cassette Duplicator		3	34,824,000	3	34,824,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	34,824,000	3	34,824,000	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC		6	41,074,000	6	41,074,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	41,074,000	6	41,074,000	0	0
3060101039	Light Signal		1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)		5	61,821,288	5	61,821,288	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	61,821,288	5	61,821,288	0	0
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)		1	2,381,500	1	2,381,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,381,500	1	2,381,500	0	0
3060101060	Power Amplifier		2	11,000,000	2	11,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	11,000,000	2	11,000,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 12 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060101079	Microphone Cable		1	1,870,000	1	1,870,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,870,000	1	1,870,000	0	0
3060101085	Cable		8	1,760,000	0	0	8	1,760,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	1,760,000	0	0	8	1,760,000
3060101088	Voice Recorder		7	6,964,500	7	6,964,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	6,964,500	7	6,964,500	0	0
3060101091	Digital LED Running Text		6	23,499,300	6	23,499,300	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	23,499,300	6	23,499,300	0	0
3060102003	Camera Electronic		3	91,520,000	3	91,520,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	91,520,000	3	91,520,000	0	0
3060102012	Video Monitor		1	59,751,660	1	59,751,660	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	59,751,660	1	59,751,660	0	0
3060102013	Video Tape Recorder Portable		1	8,448,000	1	8,448,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	8,448,000	1	8,448,000	0	0
3060102016	Video Switcher		2	21,940,260	2	21,940,260	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	21,940,260	2	21,940,260	0	0
3060102020	Video Test Signal Generator		1	12,287,000	1	12,287,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	12,287,000	1	12,287,000	0	0
3060102034	Teleprompter		1	19,140,000	1	19,140,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	19,140,000	1	19,140,000	0	0
3060102045	Tripod Camera		19	58,388,958	19	58,388,958	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	19	58,388,958	19	58,388,958	0	0
3060102055	Lighting Stand Tripod		11	71,606,700	11	71,606,700	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 13 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	71,606,700	11	71,606,700	0	0
3060102056	Film Projector		5	146,646,000	5	146,646,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	146,646,000	5	146,646,000	0	0
3060102057	Slide Projector		1	3,190,000	1	3,190,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,190,000	1	3,190,000	0	0
3060102060	Camera Film		3	116,688,000	3	116,688,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	116,688,000	3	116,688,000	0	0
3060102061	Lensa Kamera		8	108,303,600	8	108,303,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	108,303,600	8	108,303,600	0	0
3060102099	Automatic Emergency Light		2	1,100,000	2	1,100,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,100,000	2	1,100,000	0	0
3060102107	Layar Film/Projector		1	16,400,000	1	16,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	16,400,000	1	16,400,000	0	0
3060102114	Standard True Signal/Master Rack		1	12,162,360	1	12,162,360	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	12,162,360	1	12,162,360	0	0
3060102118	Head Set		2	6,072,000	2	6,072,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	6,072,000	2	6,072,000	0	0
3060102128	Camera Digital		15	280,600,000	15	280,600,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	280,600,000	15	280,600,000	0	0
3060102129	Tas Kamera		1	2,400,200	1	2,400,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,400,200	1	2,400,200	0	0
3060102130	Lampu Blitz Kamera		2	8,231,500	2	8,231,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	8,231,500	2	8,231,500	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 14 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060102131	Lensa Filter		1	1,687,500	1	1,687,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,687,500	1	1,687,500	0	0
3060102135	LCD Monitor		7	1,204,207,689	7	1,204,207,689	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	1,204,207,689	7	1,204,207,689	0	0
3060102152	RF Cable		1	7,700,000	1	7,700,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	7,700,000	1	7,700,000	0	0
3060102165	Camera Conference		1	2,035,000	1	2,035,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,035,000	1	2,035,000	0	0
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya		4	44,145,077	4	44,145,077	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	4	44,145,077	4	44,145,077	0	0
3060104045	Mesin Barcode		1	3,740,000	1	3,740,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,740,000	1	3,740,000	0	0
3060199999	Alat Studio Lainnya		3	57,750,000	3	57,750,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	3	57,750,000	3	57,750,000	0	0
3060201001	Telephone (PABX)		2	241,354,500	2	241,354,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	241,354,500	2	241,354,500	0	0
3060201003	Pesawat Telephone		104	20,608,000	14	2,741,000	90	17,867,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	104	20,608,000	14	2,741,000	90	17,867,000
3060201006	Handy Talky (HT)		16	48,210,000	16	48,210,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	16	48,210,000	16	48,210,000	0	0
3060201010	Facsimile		11	35,178,000	11	35,178,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	35,178,000	11	35,178,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 15 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya		10	72,597,920	10	72,597,920	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	10	72,597,920	10	72,597,920	0	0
3060202999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya		4	9,800,000	4	9,800,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	4	9,800,000	4	9,800,000	0	0
3060206002	Wireless Amplifier		2	13,200,000	2	13,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	13,200,000	2	13,200,000	0	0
3060323022	Change Over Switch		12	15,923,160	12	15,923,160	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	15,923,160	12	15,923,160	0	0
3060346005	Conecctor		10	726,000	0	0	10	726,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	726,000	0	0	10	726,000
3070101001	Sterilisator		1	9,900,000	1	9,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	9,900,000	1	9,900,000	0	0
3070101005	Tensimeter		2	12,866,234	2	12,866,234	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	12,866,234	2	12,866,234	0	0
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)		1	658,000	1	658,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	658,000	1	658,000	0	0
3070101018	Instrumen Cabinet		1	935,000	1	935,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	935,000	1	935,000	0	0
3070101022	Lemari Steriil		1	4,565,000	1	4,565,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,565,000	1	4,565,000	0	0
3070101026	Tabung 02		2	3,088,635	2	3,088,635	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	3,088,635	2	3,088,635	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 16 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)		3	12,155,075	3	12,155,075	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	12,155,075	3	12,155,075	0	0
3070101127	Kursi Dorong		1	2,791,250	1	2,791,250	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,791,250	1	2,791,250	0	0
3070102002	Dental Unit		1	123,200,000	1	123,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	123,200,000	1	123,200,000	0	0
3070102019	Portable Dental Unit		1	14,107,500	1	14,107,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	14,107,500	1	14,107,500	0	0
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)		2	3,713,000	2	3,713,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	3,713,000	2	3,713,000	0	0
3070102118	Bein		1	671,293	1	671,293	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	671,293	1	671,293	0	0
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya		2	12,200,000	2	12,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	12,200,000	2	12,200,000	0	0
3070106096	Otoscope Halogen Lamp		2	2,811,234	2	2,811,234	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	2,811,234	2	2,811,234	0	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete		1	3,436,000	1	3,436,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,436,000	1	3,436,000	0	0
3070111999	Alat Kedokteran Poliklinik Lainnya		1	89,347,170	1	89,347,170	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	89,347,170	1	89,347,170	0	0
3070118011	Data Catridge		1	24,657,600	1	24,657,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	24,657,600	1	24,657,600	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 17 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya		2	8,980,519	2	8,980,519	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	8,980,519	2	8,980,519	0	0
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)		1	26,125,000	1	26,125,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	26,125,000	1	26,125,000	0	0
3080804009	DC / AC Power Supply		1	2,195,000	1	2,195,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,195,000	1	2,195,000	0	0
3100101004	Internet		2	5,500,000	2	5,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	5,500,000	2	5,500,000	0	0
3100102001	P.C Unit		189	2,451,847,000	189	2,451,847,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	189	2,451,847,000	189	2,451,847,000	0	0
3100102002	Lap Top		109	1,898,943,498	109	1,898,943,498	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	115	1,981,893,498	115	1,981,893,498	0	0
302	Transfer Keluar	Buah	(6)	(82,950,000)	(6)	(82,950,000)	0	0
3100102003	Note Book		17	309,832,000	17	309,832,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	309,832,000	17	309,832,000	0	0
3100102007	Net Book		118	1,567,210,000	118	1,567,210,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	118	1,567,210,000	118	1,567,210,000	0	0
3100102009	Tablet PC		11	87,779,458	11	87,779,458	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	87,779,458	11	87,779,458	0	0
3100102999	Personal Komputer Lainnya		2	61,347,000	2	61,347,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	61,347,000	2	61,347,000	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)		20	202,707,500	20	202,707,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	20	202,707,500	20	202,707,500	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 18 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)		3	24,170,500	3	24,170,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	24,170,500	3	24,170,500	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		142	435,984,500	142	435,984,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	142	435,984,500	142	435,984,500	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		11	122,421,650	11	122,421,650	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	122,421,650	11	122,421,650	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk		46	91,783,000	46	91,783,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	46	91,783,000	46	91,783,000	0	0
3100204001	Server		4	147,300,000	4	147,300,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	147,300,000	4	147,300,000	0	0
3100204002	Router		23	118,198,719	23	118,198,719	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	23	118,198,719	23	118,198,719	0	0
3100204004	Modem		7	5,666,100	7	5,666,100	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	5,666,100	7	5,666,100	0	0
3100204030	Network Cable Tester		6	8,580,000	6	8,580,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	8,580,000	6	8,580,000	0	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya		1	92,558,060	1	92,558,060	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	92,558,060	1	92,558,060	0	0
3190106003	Sepeda Olah Raga		1	22,977,620	1	22,977,620	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	22,977,620	1	22,977,620	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
Halaman : 19 dari 27
Kode Lap : lap_crbrmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				25,918,049,257		25,791,465,257		126,584,000



Jakarta, 23 July 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
 Halaman : 20 dari 27
 Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen		3	59,966,118,647	3	59,966,118,647	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	59,966,118,647	3	59,966,118,647	0	0
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen		4	154,108,000	4	154,108,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	4	154,108,000	4	154,108,000	0	0
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas		1	481,163,934	1	481,163,934	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	481,163,934	1	481,163,934	0	0
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		2	1,422,910,000	2	1,422,910,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	1,422,910,000	2	1,422,910,000	0	0
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen		1	82,559,000	1	82,559,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	82,559,000	1	82,559,000	0	0
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen		2	383,440,000	2	383,440,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	383,440,000	2	383,440,000	0	0
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen		5	464,163,000	5	464,163,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	5	464,163,000	5	464,163,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
Halaman : 21 dari 27
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				62,954,462,581		62,954,462,581		0



Jakarta, 23 July 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
135121 Aset Tetap Lainnya

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
Halaman : 22 dari 27
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010101001	Monografi		27,336	1,123,767,442	27,336	1,123,767,442	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	27,336	1,123,767,442	27,336	1,123,767,442	0	0
TOTAL				1,123,767,442		1,123,767,442		0



Jakarta, 23 July 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
136111 **Konstruksi Dalam pengerjaan**

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
Halaman : 23 dari 27
Kode Lap : lap_crbmn_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2	0	2	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	0	2	0	0	0
TOTAL				0		0		0



Jakarta, 23 July 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
162151 Software

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
Halaman : 24 dari 27
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8010101001	Software Komputer		6	4,184,325,500	6	4,184,325,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	6	4,184,325,500	6	4,184,325,500	0	0
TOTAL				4,184,325,500		4,184,325,500		0



Jakarta, 23 July 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
162191 Aset Tak Berwujud Lainnya

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32
Halaman : 25 dari 27
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8010101050	Buku Digital		721	69,971,060	721	69,971,060	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Edisi	519	49,998,160	519	49,998,160	0	0
101	Pembelian	Edisi	202	19,972,900	202	19,972,900	0	0
TOTAL				69,971,060		69,971,060		0



Jakarta, 23 July 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 23/07/2024 07.49.32

Halaman : 26 dari 27

Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3020101001	Sedan		2	404,107,340	2	404,107,340	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Unit	2	404,107,340	2	404,107,340	0	0
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	124,922,000	1	124,922,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Unit	(1)	(124,922,000)	(1)	(124,922,000)	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		2	327,034,260	2	327,034,260	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	198,680,260	1	198,680,260	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Unit	2	327,034,260	2	327,034,260	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Unit	(1)	(198,680,260)	(1)	(198,680,260)	0	0
3020104001	Sepeda Motor		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	5	107,382,000	5	107,382,000	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Unit	(5)	(107,382,000)	(5)	(107,382,000)	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 23/07/2024 07.49.33
Halaman : 27 dari 27
Kode Lap : lap_crbm_n_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				731,141,600		731,141,600		0



Jakarta, 23 July 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :
I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tanggal : 23/07/2024 07.49.41

Halaman : 1 dari 12

Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_satker_p

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

000 Saldo Awal TAYL

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131111	Tanah		7	430,984,260	7	430,984,260	0	0
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	11,348	356,165,357,000	11,348	356,165,357,000	0	0
132111	Peralatan dan Mesin		7	430,984,260	7	430,984,260	0	0
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	1,490,098,000	2	1,490,098,000	0	0
3010303003	Stationary Compressor	Unit	1	3,210,000	1	3,210,000	0	0
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	4,042,500	1	4,042,500	0	0
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	3	114,416,000	3	114,416,000	0	0
3010305002	Portable Water Pump	Unit	5	126,665,000	5	126,665,000	0	0
3010305003	Stationary Water Pump	Unit	4	129,748,000	4	129,748,000	0	0
3010305005	Sumersible Pump	Unit	3	467,487,000	3	467,487,000	0	0
3020101001	Sedan	Unit	6	1,383,372,700	6	1,383,372,700	0	0
3020101002	Jeep	Unit	2	849,150,000	2	849,150,000	0	0
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	1	250,000,000	1	250,000,000	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	13	2,495,212,490	13	2,495,212,490	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	6	88,992,500	6	88,992,500	0	0
3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	dummy	1	231,137,500	1	231,137,500	0	0
3030103001	Battery Charge	Buah	3	1,921,700	3	1,921,700	0	0
3030103031	Tester Listrik/Telepon/Internet	Buah	2	1,320,000	2	1,320,000	0	0
3030205001	Tool Kit Set	Buah	1	5,506,969	1	5,506,969	0	0
3030212025	Mesin Pompa air PMK	Buah	1	4,873,523	1	4,873,523	0	0
3030301064	Memori Programmer	Buah	2	2,417,972	2	2,417,972	0	0

3030308012	Termometer Standar	Buah	1	2,090,000	1	2,090,000	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Buah	6	9,546,000	6	9,546,000	0	0
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	2	3,940,000	2	3,940,000	0	0
3050102002	Mesin Hitung Listrik	Buah	14	21,126,980	14	21,126,980	0	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	5	234,200,000	5	234,200,000	0	0
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	Buah	2	74,800,000	2	74,800,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	87	161,964,500	87	161,964,500	0	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	56	114,759,000	56	114,759,000	0	0
3050104003	Rak Besi	Buah	278	334,819,890	278	334,819,890	0	0
3050104004	Rak Kayu	Buah	57	88,344,984	57	88,344,984	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	152	292,050,721	152	292,050,721	0	0
3050104007	Brandkas	Buah	8	4,775,000	8	4,775,000	0	0
3050104011	Rotary Filling	Buah	2	4,467,000	2	4,467,000	0	0
3050104016	Roll Opek	Buah	7	10,906,000	7	10,906,000	0	0
3050104020	Lemari Display	Buah	2	8,000,000	2	8,000,000	0	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	90	66,102,500	90	66,102,500	0	0
3050105002	Hydrant	Buah	3	23,372,000	3	23,372,000	0	0
3050105003	Sprinkler	Buah	1	1,156,000	1	1,156,000	0	0
3050105004	Fire Alarm	Buah	3	3,615,000	3	3,615,000	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	3	163,281,745	3	163,281,745	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	2	155,020,150	2	155,020,150	0	0
3050105010	White Board	Buah	33	7,807,890	33	7,807,890	0	0
3050105013	Copy Board/Elektrik White Board	Buah	1	2,732,000	1	2,732,000	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	17	106,706,000	17	106,706,000	0	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	8	138,762,000	8	138,762,000	0	0
3050105024	Alat Pemetong Kertas	Buah	3	11,528,000	3	11,528,000	0	0
3050105025	Headmachine Besar	Buah	3	2,690,000	3	2,690,000	0	0
3050105031	Panel Pameran	Buah	4	3,887,000	4	3,887,000	0	0
3050105037	White Board Electronic	Buah	2	4,278,000	2	4,278,000	0	0
3050105038	Laser Pointer	Buah	11	11,440,000	11	11,440,000	0	0
3050105039	Display	Buah	2	9,900,000	2	9,900,000	0	0
3050105045	Penangkal Petir	Buah	1	6,931,000	1	6,931,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	15	161,709,500	15	161,709,500	0	0
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	23	43,300,000	23	43,300,000	0	0

3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	18	126,925,935	18	126,925,935	0	0
3050105062	Bel	Buah	3	24,475,000	3	24,475,000	0	0
3050105095	Wastafel Portable	unit	1	9,996,250	1	9,996,250	0	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	3	1,242,000	3	1,242,000	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	2	2,156,234	2	2,156,234	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	230	229,130,781	230	229,130,781	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	324	357,392,000	212	307,580,000	112	49,812,000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	12	3,372,000	12	3,372,000	0	0
3050201005	Sice	Buah	31	381,625,416	31	381,625,416	0	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	111	332,597,000	111	332,597,000	0	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	78	18,233,000	59	13,183,000	19	5,050,000
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	1	2,866,234	1	2,866,234	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	44	5,038,000	44	5,038,000	0	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	4	23,064,000	4	23,064,000	0	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	8	38,385,000	8	38,385,000	0	0
3050201017	Sketsel	Buah	3	9,007,000	3	9,007,000	0	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	450	609,206,830	386	559,542,830	64	49,664,000
3050202003	Jam Elektronik	Buah	1	92,000	1	92,000	0	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	2,886,500	1	2,886,500	0	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	3	13,972,500	3	13,972,500	0	0
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	2,970,000	1	2,970,000	0	0
3050203005	Air Cleaner	Buah	1	2,299,000	1	2,299,000	0	0
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	1	412,500	1	412,500	0	0
3050204001	Lemari Es	Buah	17	83,064,910	17	83,064,910	0	0
3050204003	A.C. Window	Buah	8	234,610,000	8	234,610,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	126	1,598,786,641	126	1,598,786,641	0	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	2	1,254,000	2	1,254,000	0	0
3050205019	Mixer	Buah	1	6,462,500	1	6,462,500	0	0
3050206002	Televisi	Buah	29	166,810,000	29	166,810,000	0	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	18	76,250,500	18	76,250,500	0	0
3050206008	Sound System	Buah	6	334,180,200	6	334,180,200	0	0
3050206012	Wireless	Buah	3	12,498,000	3	12,498,000	0	0
3050206014	Microphone	Buah	12	29,480,000	12	29,480,000	0	0
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	3	2,013,000	3	2,013,000	0	0

3050206016	Mic Conference	Buah	1	84,150,000	1	84,150,000	0	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	5	90,190,000	5	90,190,000	0	0
3050206019	Stabilisator	Buah	1	275,000	0	0	1	275,000
3050206020	Camera Video	Buah	2	99,327,860	2	99,327,860	0	0
3050206021	Tustel	Buah	1	3,076,250	1	3,076,250	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	7	14,086,105	7	14,086,105	0	0
3050206036	Dispenser	Buah	33	92,144,534	33	92,144,534	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	4	70,398,500	4	70,398,500	0	0
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	666,232	1	666,232	0	0
3050206056	Karpet	Buah	2	59,605,000	2	59,605,000	0	0
3050206057	Vertikal Blind	Buah	51	72,705,184	51	72,705,184	0	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	317	264,581,100	317	264,581,100	0	0
3050206059	Kabel Roll	Buah	10	7,700,000	10	7,700,000	0	0
3050206061	Keset Kaki	Buah	8	25,224,000	8	25,224,000	0	0
3050206068	DVD Player	Buah	1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
3050206071	Kabel	Buah	8	3,459,500	3	2,029,500	5	1,430,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	10	25,117,660	10	25,117,660	0	0
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	5,802,500	1	5,802,500	0	0
3060101003	Audio Mixing Stationer	Buah	2	20,702,000	2	20,702,000	0	0
3060101017	Cassette Duplicator	Buah	3	34,824,000	3	34,824,000	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	6	41,074,000	6	41,074,000	0	0
3060101039	Light Signal	Buah	1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	5	61,821,288	5	61,821,288	0	0
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Buah	1	2,381,500	1	2,381,500	0	0
3060101060	Power Amplifier	Buah	2	11,000,000	2	11,000,000	0	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	1	1,870,000	1	1,870,000	0	0
3060101085	Cable	Buah	8	1,760,000	0	0	8	1,760,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	7	6,964,500	7	6,964,500	0	0
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	6	23,499,300	6	23,499,300	0	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	3	91,520,000	3	91,520,000	0	0
3060102012	Video Monitor	Buah	1	59,751,660	1	59,751,660	0	0
3060102013	Video Tape Recorder Portable	Buah	1	8,448,000	1	8,448,000	0	0
3060102016	Video Switcher	Buah	2	21,940,260	2	21,940,260	0	0
3060102020	Video Test Signal Generator	Buah	1	12,287,000	1	12,287,000	0	0

3060102034	Teleprompter	Buah	1	19,140,000	1	19,140,000	0	0
3060102045	Tripod Camera	Buah	19	58,388,958	19	58,388,958	0	0
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	11	71,606,700	11	71,606,700	0	0
3060102056	Film Projector	Buah	5	146,646,000	5	146,646,000	0	0
3060102057	Slide Projector	Buah	1	3,190,000	1	3,190,000	0	0
3060102060	Camera Film	Buah	3	116,688,000	3	116,688,000	0	0
3060102061	Lensa Kamera	Buah	8	108,303,600	8	108,303,600	0	0
3060102099	Automatic Emergency Light	Buah	2	1,100,000	2	1,100,000	0	0
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	1	16,400,000	1	16,400,000	0	0
3060102114	Standard True Signal/Master Rack	Buah	1	12,162,360	1	12,162,360	0	0
3060102118	Head Set	Buah	2	6,072,000	2	6,072,000	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	15	280,600,000	15	280,600,000	0	0
3060102129	Tas Kamera	Buah	1	2,400,200	1	2,400,200	0	0
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	2	8,231,500	2	8,231,500	0	0
3060102131	Lensa Filter	Buah	1	1,687,500	1	1,687,500	0	0
3060102135	LCD Monitor	Buah	7	1,204,207,689	7	1,204,207,689	0	0
3060102152	RF Cable	Buah	1	7,700,000	1	7,700,000	0	0
3060102165	Camera Conference	Buah	1	2,035,000	1	2,035,000	0	0
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	4	44,145,077	4	44,145,077	0	0
3060104045	Mesin Barcode	Buah	1	3,740,000	1	3,740,000	0	0
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	3	57,750,000	3	57,750,000	0	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	2	241,354,500	2	241,354,500	0	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	104	20,608,000	14	2,741,000	90	17,867,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	16	48,210,000	16	48,210,000	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	11	35,178,000	11	35,178,000	0	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	10	72,597,920	10	72,597,920	0	0
3060202999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	dummy	4	9,800,000	4	9,800,000	0	0
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	2	13,200,000	2	13,200,000	0	0
3060323022	Change Over Switch	Buah	12	15,923,160	12	15,923,160	0	0
3060346005	Conecctor	Buah	10	726,000	0	0	10	726,000
3070101001	Sterilisator	Buah	1	9,900,000	1	9,900,000	0	0
3070101005	Tensimeter	Buah	2	12,866,234	2	12,866,234	0	0
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	658,000	1	658,000	0	0
3070101018	Instrumen Cabinet	Buah	1	935,000	1	935,000	0	0

3070101022	Lemari Steriil	Buah	1	4,565,000	1	4,565,000	0	0
3070101026	Tabung O2	Buah	2	3,088,635	2	3,088,635	0	0
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	3	12,155,075	3	12,155,075	0	0
3070101127	Kursi Dorong	Buah	1	2,791,250	1	2,791,250	0	0
3070102002	Dental Unit	Buah	1	123,200,000	1	123,200,000	0	0
3070102019	Portable Dental Unit	Buah	1	14,107,500	1	14,107,500	0	0
3070102093	Tang Ekstrasi (Dewasa,Anak)	Buah	2	3,713,000	2	3,713,000	0	0
3070102118	Bein	Buah	1	671,293	1	671,293	0	0
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	dummy	2	12,200,000	2	12,200,000	0	0
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	Buah	2	2,811,234	2	2,811,234	0	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	Buah	1	3,436,000	1	3,436,000	0	0
3070111999	Alat Kedokteran Poliklinik Lainnya	dummy	1	89,347,170	1	89,347,170	0	0
3070118011	Data Catridge	Buah	1	24,657,600	1	24,657,600	0	0
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	dummy	2	8,980,519	2	8,980,519	0	0
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	26,125,000	1	26,125,000	0	0
3080804009	DC / AC Power Supply	Buah	1	2,195,000	1	2,195,000	0	0
3100101004	Internet	Buah	2	5,500,000	2	5,500,000	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	189	2,451,847,000	189	2,451,847,000	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	115	1,981,893,498	115	1,981,893,498	0	0
3100102003	Note Book	Buah	17	309,832,000	17	309,832,000	0	0
3100102007	Net Book	Buah	118	1,567,210,000	118	1,567,210,000	0	0
3100102009	Tablet PC	Buah	11	87,779,458	11	87,779,458	0	0
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	2	61,347,000	2	61,347,000	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	20	202,707,500	20	202,707,500	0	0
3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	Buah	3	24,170,500	3	24,170,500	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	142	435,984,500	142	435,984,500	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	11	122,421,650	11	122,421,650	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	46	91,783,000	46	91,783,000	0	0
3100204001	Server	Buah	4	147,300,000	4	147,300,000	0	0
3100204002	Router	Buah	23	118,198,719	23	118,198,719	0	0
3100204004	Modem	Buah	7	5,666,100	7	5,666,100	0	0
3100204030	Network Cable Tester	Buah	6	8,580,000	6	8,580,000	0	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	1	92,558,060	1	92,558,060	0	0
3190106003	Sepeda Olah Raga	Buah	1	22,977,620	1	22,977,620	0	0

133111	Gedung dan Bangunan		7	430,984,260	7	430,984,260	0	0
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3	59,966,118,647	3	59,966,118,647	0	0
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	4	154,108,000	4	154,108,000	0	0
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Unit	1	481,163,934	1	481,163,934	0	0
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	2	1,422,910,000	2	1,422,910,000	0	0
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	82,559,000	1	82,559,000	0	0
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	2	383,440,000	2	383,440,000	0	0
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	5	464,163,000	5	464,163,000	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		7	430,984,260	7	430,984,260	0	0
6010101001	Monografi	Buah	27,336	1,123,767,442	27,336	1,123,767,442	0	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan		7	430,984,260	7	430,984,260	0	0
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	dummy	2	0	2	0	0	0
162151	Software		7	430,984,260	7	430,984,260	0	0
8010101001	Software Komputer	dummy	6	4,184,325,500	6	4,184,325,500	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	—	7	430,984,260	7	430,984,260	0	0
8010101050	Buku Digital	Edisi	519	49,998,160	519	49,998,160	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		7	430,984,260	7	430,984,260	0	0
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	1	124,922,000	1	124,922,000	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	198,680,260	1	198,680,260	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	107,382,000	5	107,382,000	0	0
TOTAL				451,641,035,800		451,514,451,800		126,584,000



Jakarta, 30 December 2023
 Penanggung Jawab UAKPB
 Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
 197705092001122001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tanggal : 23/07/2024 07.49.41

Halaman : 8 dari 12

101 Pembelian

Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		202	19,972,900	202	19,972,900	0	0
8010101050	Buku Digital	Edisi	202	19,972,900	202	19,972,900	0	0
TOTAL				19,972,900		19,972,900		0



Jakarta, 30 December 2023

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati

197705092001122001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
188 Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

Tanggal : 23/07/2024 07.49.41
Halaman : 9 dari 12
Kode Lap : lap_crbrmn_jnstrn_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		4	731,141,600	4	731,141,600	0	0
3020101001	Sedan	Unit	2	404,107,340	2	404,107,340	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	327,034,260	2	327,034,260	0	0
TOTAL				731,141,600		731,141,600		0



Jakarta, 30 December 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
302 Transfer Keluar

Tanggal : 23/07/2024 07.49.41
Halaman : 10 dari 12
Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		(6)	(82,950,000)	(6)	(82,950,000)	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	(6)	(82,950,000)	(6)	(82,950,000)	0	0
TOTAL				(82,950,000)		(82,950,000)		0



Jakarta, 30 December 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tanggal : 23/07/2024 07.49.41

Halaman : 11 dari 12

401 Penghentian Aset Dari Penggunaan

Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		(4)	(731,141,600)	(4)	(731,141,600)	0	0
3020101001	Sedan	Unit	(2)	(404,107,340)	(2)	(404,107,340)	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	(2)	(327,034,260)	(2)	(327,034,260)	0	0
TOTAL				(731,141,600)		(731,141,600)		0



Jakarta, 30 December 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
197705092001122001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

911 Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan

Tanggal : 23/07/2024 07.49.41

Halaman : 12 dari 12

Kode Lap : lap_crbmn_jnstrn_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		(7)	(430,984,260)	(7)	(430,984,260)	0	0
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	(1)	(124,922,000)	(1)	(124,922,000)	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	(1)	(198,680,260)	(1)	(198,680,260)	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	(5)	(107,382,000)	(5)	(107,382,000)	0	0
TOTAL				(430,984,260)		(430,984,260)		0



Jakarta, 30 December 2023

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati

197705092001122001

**DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KODE UAKPB : 409288

TANGGAL : 23-07-2024
Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 23 JULI 2024
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
NIP. 197705092001122001

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KODE UAKPB : 409288

TANGGAL : 23-07-2024
Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 23 JULI 2024
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
NIP. 197705092001122001

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KODE UAKPB : 409288

TANGGAL : 23-07-2024
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							



JAKARTA, 23 JULI 2024
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
NIP. 197705092001122001

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER LAYER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAKPB : 409288

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tanggal : 23/07/24 7:49 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_layer_satker_poc

Kode	Uraian	Layer	Kuantitas	Jumlah
UAPKPB - 000 (BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL)				
1010301001 (Alat Tulis)				
1010301001000005	Spidol Art 70	5	1	115,000
1010301001000010	PENSIL 2 b stadler	12	1	44,500
1010301001000010	PENSIL 2 b stadler	13	2	89,000
1010301001000010	PENSIL 2 b stadler	14	4	178,000
1010301001000010	PENSIL 2 b stadler	15	2	114,800
1010301001000012	stabilo bos	22	4	60,400
1010301001000012	stabilo bos	23	8	120,800
1010301001000017	spidol whiteboard hitam	5	1	95,000
1010301001000017	spidol whiteboard hitam	6	1	111,000
1010301001000027	pulpen Gel K1 Kenko	80	2	104,300
1010301001000027	pulpen Gel K1 Kenko	81	3	156,450
1010301001000027	pulpen Gel K1 Kenko	82	2	104,300
1010301001000032	spidol Permanent Marker artline 70	9	1	148,200
1010301001000032	spidol Permanent Marker artline 70	10	1	148,200
1010301001000032	spidol Permanent Marker artline 70	11	2	296,400
1010301001000032	spidol Permanent Marker artline 70	12	1	148,200
1010301001000039	Pulpen Ball Liner Biru Pilot	28	1	204,450
1010301001000039	Pulpen Ball Liner Biru Pilot	29	1	204,450
1010301001000039	Pulpen Ball Liner Biru Pilot	30	2	408,900
1010301001000039	Pulpen Ball Liner Biru Pilot	31	1	204,450
1010301001000039	Pulpen Ball Liner Biru Pilot	32	1	204,450
1010301001000049	Balpoint sarasa Zebra 0,5 Biru	5	3	761,400
1010301001000051	Ballpoint Standard Boldliner elite 1.0 Blue	2	1	171,500
Jumlah Kode Barang 1010301001 (Alat Tulis)				4,194,150
1010301002 (Tinta Tulis, Tinta Stempel)				
1010301002000003	Tinta Stempel	7	7	67,200
1010301002000003	Tinta Stempel	8	1	9,600
Jumlah Kode Barang 1010301002 (Tinta Tulis, Tinta Stempel)				76,800
1010301003 (Penjepit Kertas)				
1010301003000030	Trgonal Clip no. 1 joikp Trigonol Clip No 1	10	1	26,500
1010301003000030	Trgonal Clip no. 1 joikp Trigonol Clip No 1	11	2	53,000
1010301003000047	Binder Clip No. 111	23	3	18,600
Jumlah Kode Barang 1010301003 (Penjepit Kertas)				98,100
1010301004 (Penghapus/Korektor)				
1010301004000011	Penghapus pensil Staedtler 526-B40	17	3	12,300
1010301004000017	Penghapus Pensil Staedtler 5-26 B-20	5	5	126,000
Jumlah Kode Barang 1010301004 (Penghapus/Korektor)				138,300
1010301005 (Buku Tulis)				
1010301005000002	Buku Agenda Polio	3	1	19,500
1010301005000002	Buku Agenda Polio	4	3	58,500
1010301005000006	Buku Agenda	1	80	19,840,000
1010301005000017	buku agenda folio	1	10	195,000
1010301005000018	buku ekspedisi	4	4	64,000
1010301005000018	buku ekspedisi	5	4	50,000

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER LAYER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAKPB : 409288

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tanggal : 23/07/24 7:49 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_sedia_layer_satker_poc

Kode	Uraian	Layer	Kuantitas	Jumlah
1010301005000018	buku ekspedisi	6	2	25,000
1010301005000031	Buku Agenda Folio 100 Lbr Kiky	1	10	280,000
Jumlah Kode Barang 1010301005 (Buku Tulis)				20,532,000
1010301006 (Ordner Dan Map)				
1010301006000026	Ordner Bantex 1452 PVC A5	8	9	360,000
1010301006000026	Ordner Bantex 1452 PVC A5	9	3	114,000
1010301006000026	Ordner Bantex 1452 PVC A5	10	2	74,100
1010301006000034	bussines file daichi F4	5	1	58,000
1010301006000040	STOP MAP PUTIH BERKOP BPHN	41	1	210,000
1010301006000040	STOP MAP PUTIH BERKOP BPHN	42	1	210,000
1010301006000040	STOP MAP PUTIH BERKOP BPHN	43	1	205,800
1010301006000040	STOP MAP PUTIH BERKOP BPHN	44	1	205,800
1010301006000060	Map Folder Ber Kop BPHN	1	400	7,840,000
Jumlah Kode Barang 1010301006 (Ordner Dan Map)				9,277,700
1010301008 (Cutter (Alat Tulis Kantor))				
1010301008000002	Cutter Besar L-500	14	2	31,000
1010301008000002	Cutter Besar L-500	15	5	77,500
1010301008000002	Cutter Besar L-500	16	1	16,500
1010301008000008	isi Cutter Besar L- 500	5	5	85,000
1010301008000008	isi Cutter Besar L- 500	6	5	85,000
1010301008000008	isi Cutter Besar L- 500	7	1	17,000
1010301008000008	isi Cutter Besar L- 500	8	5	85,000
1010301008000008	isi Cutter Besar L- 500	9	1	16,500
1010301008000008	isi Cutter Besar L- 500	10	2	33,000
1010301008000008	isi Cutter Besar L- 500	11	1	16,500
1010301008000013	Gunting kecil	17	1	8,250
1010301008000013	Gunting kecil	18	2	16,500
1010301008000013	Gunting kecil	19	1	8,250
Jumlah Kode Barang 1010301008 (Cutter (Alat Tulis Kantor))				496,000
1010301010 (Alat Perekat)				
1010301010000017	LAKBAN Hitam (2)	18	4	81,200
1010301010000021	tape dispencer besar	2	1	28,700
1010301010000021	tape dispencer besar	3	1	28,700
1010301010000022	tape dispencer kecil	1	1	21,500
1010301010000022	tape dispencer kecil	2	2	43,000
1010301010000029	Double tape 1 inch Joyko	10	1	8,250
1010301010000029	Double tape 1 inch Joyko	11	1	8,250
1010301010000029	Double tape 1 inch Joyko	12	1	8,250
1010301010000031	Solatif Bening Daimaru (12mm x 25yard)	11	4	22,000
1010301010000034	Lem Fox Stick	17	1	15,100
1010301010000034	Lem Fox Stick	18	3	45,300
1010301010000045	Lem UHU 35 Gram	8	4	92,000
1010301010000045	Lem UHU 35 Gram	9	1	23,000
1010301010000046	Lakban Cokelat 2 Inch Daimaru	8	2	30,200
Jumlah Kode Barang 1010301010 (Alat Perekat)				455,450
1010301012 (Staples)				

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER LAYER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAKPB : 409288

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tanggal : 23/07/24 7:49 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_sedia_layer_satker_poc

Kode	Uraian	Layer	Kuantitas	Jumlah
1010301012000002	Stapler HD 10 Max	10	2	40,000
1010301012000002	Stapler HD 10 Max	11	3	60,000
1010301012000002	Stapler HD 10 Max	12	5	100,000
1010301012000003	Head Machine Max HD 10 D (Stepler Kecil)	4	1	56,000
1010301012000003	Head Machine Max HD 10 D (Stepler Kecil)	5	1	56,000
1010301012000003	Head Machine Max HD 10 D (Stepler Kecil)	6	2	112,000
Jumlah Kode Barang 1010301012 (Staples)				424,000
1010301013 (Isi Staples)				
1010301013000007	Isi staples Kecil No. 10-1M max isi 20	11	2	148,500
1010301013000007	Isi staples Kecil No. 10-1M max isi 20	12	3	222,750
Jumlah Kode Barang 1010301013 (Isi Staples)				371,250
1010301999 (Alat Tulis Kantor Lainnya)				
1010301999000037	Punch Pembolong kertas No.40 XL Kenko	2	1	28,000
1010301999000037	Punch Pembolong kertas No.40 XL Kenko	3	1	28,000
1010301999000039	Box File Karton	1	3	55,500
1010301999000041	Box File Plastik Folio	5	4	160,000
1010301999000058	Remover Kertas	4	2	80,000
1010301999000064	Kalkulator	7	1	370,450
1010301999000067	Rautan Pensil angel A-5 (Kecil)	10	2	115,300
1010301999000070	Joyco Tape Cutter 119	2	1	30,800
Jumlah Kode Barang 1010301999 (Alat Tulis Kantor Lainnya)				868,050
1010302001 (Kertas HVS)				
1010302001000025	Kertas HVS BD F4 80 Gr	62	8	587,200
1010302001000025	Kertas HVS BD F4 80 Gr	63	10	734,000
1010302001000025	Kertas HVS BD F4 80 Gr	64	3	220,200
1010302001000025	Kertas HVS BD F4 80 Gr	65	5	367,000
1010302001000025	Kertas HVS BD F4 80 Gr	66	5	367,000
1010302001000025	Kertas HVS BD F4 80 Gr	67	5	367,000
1010302001000025	Kertas HVS BD F4 80 Gr	68	9	660,600
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	109	35	2,233,000
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	110	5	319,000
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	111	2	127,600
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	112	2	127,600
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	113	15	957,000
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	114	14	893,200
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	115	8	510,400
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	116	9	574,200
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	117	16	1,020,800
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	118	5	319,000
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	119	10	638,000
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	120	5	319,000
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	121	5	319,000
1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	122	14	893,200
Jumlah Kode Barang 1010302001 (Kertas HVS)				12,554,000
1010302002 (Berbagai Kertas)				
1010302002000011	Lembar Disposisi	2	100	2,470,000

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER LAYER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAKPB : 409288

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tanggal : 23/07/24 7:49 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_sedia_layer_satker_poc

Kode	Uraian	Layer	Kuantitas	Jumlah
1010302002000045	Post It 654	52	2	33,000
1010302002000064	Port it 3M 680-09 Sign Here	16	2	54,800
1010302002000065	Sticker Label Tom & Jerry No.120	6	8	61,600
Jumlah Kode Barang 1010302002 (Berbagai Kertas)				2,619,400
1010302004 (Amplop)				
1010302004000017	Amplop coklat Cabinet POLOS	1	8	257,600
1010302004000017	Amplop coklat Cabinet POLOS	2	2	65,000
1010302004000017	Amplop coklat Cabinet POLOS	3	1	32,500
1010302004000017	Amplop coklat Cabinet POLOS	4	4	130,000
1010302004000017	Amplop coklat Cabinet POLOS	5	2	65,000
1010302004000020	Amplop coklat KOP BPHN (FOLIO)	4	1	118,500
1010302004000020	Amplop coklat KOP BPHN (FOLIO)	5	1	118,500
1010302004000020	Amplop coklat KOP BPHN (FOLIO)	6	1	118,500
1010302004000020	Amplop coklat KOP BPHN (FOLIO)	7	2	237,000
Jumlah Kode Barang 1010302004 (Amplop)				1,142,600
1010304004 (Tinta/Toner Printer)				
1010304004000007	Tinta Hp Laser Jet 12 A	2	2	3,240,000
1010304004000037	Toner HP Laser Jet 85A	5	1	1,519,000
1010304004000072	EPSON T6642 CYAN	16	1	119,000
1010304004000072	EPSON T6642 CYAN	17	1	116,600
1010304004000073	EPSON T6643 MAGENTA	13	1	119,000
1010304004000073	EPSON T6643 MAGENTA	14	1	119,000
1010304004000073	EPSON T6643 MAGENTA	15	2	238,000
1010304004000074	EPSON T6643 YELLOW	2	1	119,000
1010304004000074	EPSON T6643 YELLOW	3	1	119,000
1010304004000074	EPSON T6643 YELLOW	4	2	238,000
1010304004000093	Tinta Epson 003 Black	24	1	116,600
1010304004000093	Tinta Epson 003 Black	25	1	116,600
1010304004000093	Tinta Epson 003 Black	26	5	583,000
1010304004000094	Tinta Epson 003 Cyan	17	2	238,000
1010304004000094	Tinta Epson 003 Cyan	18	1	119,000
1010304004000094	Tinta Epson 003 Cyan	19	1	116,600
1010304004000094	Tinta Epson 003 Cyan	20	1	116,600
1010304004000094	Tinta Epson 003 Cyan	21	1	116,600
1010304004000094	Tinta Epson 003 Cyan	22	1	116,600
1010304004000094	Tinta Epson 003 Cyan	23	5	583,000
1010304004000095	Tinta Epson 003 Magenta	17	2	238,000
1010304004000095	Tinta Epson 003 Magenta	18	1	119,000
1010304004000095	Tinta Epson 003 Magenta	19	1	116,600
1010304004000095	Tinta Epson 003 Magenta	20	1	116,600
1010304004000095	Tinta Epson 003 Magenta	21	1	116,600
1010304004000095	Tinta Epson 003 Magenta	22	5	583,000
1010304004000096	Tinta Epson 003 Yellow	18	1	119,000
1010304004000096	Tinta Epson 003 Yellow	19	1	116,600
1010304004000096	Tinta Epson 003 Yellow	20	1	116,600
1010304004000096	Tinta Epson 003 Yellow	21	1	116,600

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER LAYER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAKPB : 409288

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tanggal : 23/07/24 7:49 AM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_sedia_layer_satker_poc

Kode	Uraian	Layer	Kuantitas	Jumlah
1010304004000096	Tinta Epson 003 Yellow	22	1	116,600
1010304004000096	Tinta Epson 003 Yellow	23	5	583,000
1010304004000097	Tinta Epson 001 Black	56	1	198,950
1010304004000097	Tinta Epson 001 Black	57	2	397,900
1010304004000097	Tinta Epson 001 Black	58	5	994,750
1010304004000098	Tinta Epson 001 Cyan	56	2	274,400
1010304004000098	Tinta Epson 001 Cyan	57	5	686,000
1010304004000099	Tinta Epson 001 Magenta	55	1	137,200
1010304004000099	Tinta Epson 001 Magenta	56	1	137,200
1010304004000099	Tinta Epson 001 Magenta	57	2	274,400
1010304004000099	Tinta Epson 001 Magenta	58	5	686,000
1010304004000100	Tinta Epson 001 Yellow	52	1	137,200
1010304004000100	Tinta Epson 001 Yellow	53	2	274,400
1010304004000100	Tinta Epson 001 Yellow	54	5	686,000
1010304004000101	Toner HP Laserjet 79 A	4	1	1,485,000
1010304004000103	Tinta Epson 774 (Epson M100)	10	2	670,000
1010304004000103	Tinta Epson 774 (Epson M100)	11	1	253,800
1010304004000106	Tinta Epson 008 Black	1	1	354,000
1010304004000106	Tinta Epson 008 Black	2	2	718,000
1010304004000107	Tinta Epson 008 Cyan	1	2	614,000
1010304004000107	Tinta Epson 008 Cyan	2	1	292,600
1010304004000108	Tinta Epson 008 Magenta	1	2	614,000
1010304004000108	Tinta Epson 008 Magenta	2	1	292,600
1010304004000109	Tinta Epson 008 Yellow	1	2	614,000
1010304004000109	Tinta Epson 008 Yellow	2	1	292,600
Jumlah Kode Barang 1010304004 (Tinta/Toner Printer)				21,712,400
1010304006 (USB/Flash Disk)				
1010304006000015	Flashdisk 16 GB Sandisk	7	1	95,000
1010304006000015	Flashdisk 16 GB Sandisk	8	1	94,700
1010304006000015	Flashdisk 16 GB Sandisk	9	1	94,700
1010304006000015	Flashdisk 16 GB Sandisk	10	1	94,700
1010304006000015	Flashdisk 16 GB Sandisk	11	1	94,700
1010304006000017	Flashdisk OTG 32 GB Sandisk	21	4	576,000
1010304006000018	Flashdisk 128 GB Sandisk	8	1	238,000
Jumlah Kode Barang 1010304006 (USB/Flash Disk)				1,287,800
1010304010 (Mouse)				
1010304010000005	Mouse Wireless M220 Logitech Silent	9	2	452,800
Jumlah Kode Barang 1010304010 (Mouse)				452,800
1010304999 (Bahan Komputer Lainnya)				
1010304999000016	Pointer R 400 Logitech	1	1	567,000
Jumlah Kode Barang 1010304999 (Bahan Komputer Lainnya)				567,000
1010314001 (Obat Cair (Barang Konsumsi))				
1010314001000002	Betadine 15ml	5	2	35,432
1010314001000033	Sanadryl	9	10	232,440
1010314001000048	insto moist	6	5	78,925
1010314001000050	Insto Eye Drops 7.5 ml Hijau	5	7	115,619

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER LAYER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAKPB : 409288

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tanggal : 23/07/24 7:49 AM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_sedia_layer_satker_poc

Kode	Uraian	Layer	Kuantitas	Jumlah
1010314001000058	CHKM Ghimas	1	1	85,000
1010314001000061	Plossa Hanger Red Hot	4	12	148,944
1010314001000065	Otilon	4	5	283,385
1010314001000071	Minyak Tawon DD	2	2	73,110
1010314001000072	Forumen Tetes telinga	3	5	187,810
1010314001000081	Natrium Klorida 500 MI	2	1	9,336
1010314001000085	Chemi Dental Poland NaOcl 5.25% + Surfactant25	1	1	198,690
1010314001000093	Lidocain Injeksi	2	6	18,384
1010314001000094	Minosep 2% 60 MI	2	2	77,256
1010314001000095	Minyak Telon Konicare 60 MI	4	2	56,290
1010314001000108	OBH 100 MI (IKA)	1	41	628,038
1010314001000109	Plantacid Susp 100 MI	1	3	41,958
Jumlah Kode Barang 1010314001 (Obat Cair (Barang Konsumsi))				2,270,617
1010314002 (Obat Padat (Barang Konsumsi))				
1010314002000050	Blue Hard Stone	1	1	36,000
1010314002000078	Omeprazole Tab	3	11	374,550
1010314002000105	Allohex	5	2	131,000
1010314002000124	kalnex	2	1	5,200
1010314002000168	L-Vit D3 1000 IU @3 X 10 Tab	1	60	299,760
1010314002000178	Alleron	2	1	39,000
1010314002000179	Ambeven	2	1	231,000
1010314002000185	Propranolol	1	1	24,000
1010314002000202	Intunal Forte Tablet	2	200	215,800
1010314002000244	Acetylcysteine 200 Mg (Dus 100 KPS)	2	200	253,200
1010314002000245	Allohex 10 Mg Tab @50	1	100	131,000
1010314002000246	Allopurinol 100 MG Dus 100 Tab @ 100 GBN	1	100	40,600
1010314002000247	Allopurinol 300 Mg @ 100 Hexa	1	100	65,500
1010314002000247	Allopurinol 300 Mg @ 100 Hexa	2	200	133,200
1010314002000248	Amlodipine 10 Mg (Dus 50 Tab) BJN	3	450	299,700
1010314002000250	ARCOXIA 120MG TAB@30	1	30	735,750
1010314002000250	ARCOXIA 120MG TAB@30	2	30	748,230
1010314002000252	CEFIXIME 200MG CAP@100 GDX	2	200	976,800
1010314002000253	ATORVASTATIN CALC 10MG TABGHX	2	300	799,200
1010314002000256	BIORON TAB@100	2	100	142,600
1010314002000257	BRAXIDIN TAB	2	100	166,600
1010314002000258	CANDESARTAN 8MG TAB@30 GDX	2	150	899,100
1010314002000259	CAVIPLEX KAPLET @ 100 (ERELA)	3	500	466,000
1010314002000261	DEXTEEM PLUS TAB@100	2	200	106,600
1010314002000262	FENOFIBRATE 100MG CAP@50 GDX BPJS	2	50	133,200
1010314002000263	FLOXIFAR 500MG TAB@100	1	100	88,600
1010314002000263	FLOXIFAR 500MG TAB@100	2	100	92,900
1010314002000265	GLUCOSAMIN MPL 500 MG	2	300	669,300
1010314002000268	KALMETHASONE 0.5MG TAB@200	2	400	58,400
1010314002000269	LEVOFLOXACIN 500 MG GHX CAPL@50 BPJS	2	100	166,600
1010314002000270	METFORMIN TAB 500 MG @200 TAB (HEXA)	3	200	73,200
1010314002000271	METHYL PREDNISOLON 8MG GDX	2	700	496,300

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER LAYER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAKPB : 409288

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tanggal : 23/07/24 7:49 AM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_sedia_layer_satker_poc

Kode	Uraian	Layer	Kuantitas	Jumlah
1010314002000272	MUCOHEXIN 8MG TAB@100	2	200	153,200
1010314002000274	NEUROPYRON V TAB@100	2	200	253,200
1010314002000278	SCOPMA PLUS TAB	1	100	174,600
1010314002000278	SCOPMA PLUS TAB	2	500	888,000
1010314002000281	TREMENZA TAB@100	3	100	213,100
1010314002000282	VOLTADEX 50MG TAB@50	2	400	266,400
1010314002000283	Alpentin 100 Mg CAP @50	1	50	226,450
1010314002000284	Amlodipine 5 Mg (Dus 50 Tab) BJN	2	150	60,000
1010314002000286	Atorvastatin 20 MG Tab @30 GYA	1	150	799,200
1010314002000289	Cefadroxil 500 Mg Cap @100 GDX	1	100	119,900
1010314002000290	Cefixime 100 Mg Cap @100 GDX	1	200	579,800
1010314002000291	Cetirizine 10 MG (dua 30 Tab) -BJN	2	30	17,310
1010314002000295	Eflagen 50 Mg Tab @50	1	50	149,900
1010314002000297	Exaflam 25 Mg Tab @50 GDN	1	50	119,900
1010314002000299	Glucodex 80 Mg Tab @100	1	300	211,800
1010314002000300	Kettese 25 Mg Tab @ 50	1	30	369,660
1010314002000301	Lansoprazole 30 Mg 20 Capsul GNUL	2	180	294,660
1010314002000302	Lopamid Tablet @100	1	100	31,900
1010314002000303	Loratadine 10 Mg Tab @100 GHX	1	400	186,800
1010314002000304	Mecobalamin 500 Mcg Cap @ 100 GNOV	1	300	359,700
1010314002000304	Mecobalamin 500 Mcg Cap @ 100 GNOV	2	300	359,700
1010314002000310	Opistan 500 Mg KPL @ 100	1	100	71,000
1010314002000311	Plasminex Tab @100500 Mg	1	2	7,992
1010314002000312	Sanmol 500 Mg Tab	2	400	223,600
1010314002000313	Scopma 10 Mg Kpl @ 100	2	200	324,200
1010314002000314	Teosal Tab @100	2	100	25,300
1010314002000315	Titan 150 Mg Tab @100	1	300	239,700
1010314002000316	Vesperum 10 Mg Tab @100	2	100	39,200
1010314002000317	Welmove CPI @60	1	20	87,920
1010314002000320	Bisoprolol 5 Mg @100 Tab GHX BPJS	1	300	519,600
1010314002000322	Magasida Tablet (Dus 10 Tablet) BJN	1	200	186,400
1010314002000323	Omeprazole 20 Mg Cap @30 GNOV	1	150	74,100
Jumlah Kode Barang 1010314002 (Obat Padat (Barang Konsumsi))				16,733,082
1010314004 (Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi))				
1010314004000001	Fletcher	2	1	27,500
Jumlah Kode Barang 1010314004 (Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi))				27,500
1010314005 (Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi))				
1010314005000004	Erlamicetin (salep mata)	5	6	75,924
1010314005000008	Formyco Salep	7	10	265,070
1010314005000009	Bioplacento Gel	3	1	34,055
1010314005000009	Bioplacento Gel	4	1	34,629
1010314005000019	Nebacetin Salep	6	7	203,735
1010314005000020	Balsem Telon	3	1	13,085
1010314005000022	Acyclovir 5% Salep	5	20	100,280
1010314005000030	Caladine Lotion 60 MI	4	3	56,823
1010314005000046	Hot N Cream Tube 60 Grm	2	5	119,880

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER LAYER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAKPB : 409288

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tanggal : 23/07/24 7:49 AM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_bmn_sedia_layer_satker_poc

Kode	Uraian	Layer	Kuantitas	Jumlah
1010314005000049	HYDROCORTISONE 2.5%CR(DUS 24TUBE@ 5 Gr	2	11	50,666
1010314005000050	Painkila CR 30 Gr	2	9	248,760
1010314005000051	Elite Sement	1	1	293,040
Jumlah Kode Barang 1010314005 (Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi))				1,495,947
1010314999 (Obat Lainnya (Barang Konsumsi))				
1010314999000005	K-File No.15	2	2	325,600
1010314999000006	K-file No.20	2	1	162,800
1010314999000007	K-File No.25	2	1	165,000
1010314999000016	Z350 XT A3,5B	3	1	576,298
1010314999000018	Cotton Roll No.2 3	1	2	189,860
1010314999000025	Articulating Paper	2	1	126,540
1010314999000039	Fuji 9	3	1	1,205,127
1010314999000044	K-File 30	1	1	165,000
1010314999000081	One swabs 2 Ply	1	2	24,000
1010314999000086	Saliva	3	1	55,500
1010314999000115	Any-Etch	2	5	263,625
1010314999000136	K- File Niti 45-80/25 mm	1	1	154,290
1010314999000154	Gips Stone Biru Moldano	1	1	59,940
1010314999000157	Benang jahit Tanpa Jarum	1	1	13,661
1010314999000158	Saniter Wipes	1	4	48,536
1010314999000159	Kapas Pembalut 500 Grm	1	1	106,560
1010314999000160	Salonpas koyo @10	1	1	7,458
Jumlah Kode Barang 1010314999 (Obat Lainnya (Barang Konsumsi))				3,649,795
1010399999 (Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya)				
1010399999000008	Plakat	3	19	8,550,000
1010399999000008	Plakat	4	1	435,000
1010399999000026	Kalender	1	76	5,700,000
Jumlah Kode Barang 1010399999 (Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya)				14,685,000
Jumlah UAPKPB 000 (BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL)				116,129,741
TOTAL				116,129,741

**DAFTAR BARANG PERSEDIAAN TIDAK DIKUASAI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 23/07/24 6:20 AM
Tgl Cetak : 23/07/24 7:50 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_sedia_kuasa_poc

KODE	URAIAN	KUANTITAS	Surat Permohonan		NILAI
			Nomor	Tanggal	

LAMPIRAN DATA DUKUNG



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan Mayjen Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753
Laman: www.bphn.go.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
HASIL OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN
Nomor : PHN.I-PB.04.03-03**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu duapuluh empat, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami Tim Opname Fisik Barang Persediaan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Tri Sadewo Y.C
NIP : 198007112003121001
Jabatan : Plt.Kepala Bagian Umum

Nama : Nurmansyah
NIP : 198308242006041001
Jabatan : Petugas Gudang/Petugas Persediaan

Nama : Evi Imalia
NIP : 198402022006042001
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan telah dilakukan opname fisik atas barang Persediaan dengan cara mencatat kuantitas dan kondisi barang persediaan pada satker Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 3 Juli 2024 dengan hasil (rincian terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan pelaporan barang persediaan dan perekaman kedalam Aplikasi persediaan Semester II tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Juli 2024

Mengetahui,
Petugas Gudang/Petugas Persediaan

Nurmansyah
NIP 198308242006041001

Operator Persediaan

Evi Imalia
NIP 198402022006042001



Plt.Kepala Bagian Umum

Tri Sadewo Y.C
NIP 198007112003121001

**LAMPIRAN BERITA ACARA OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN
PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024**

No	Kode Barang	Uraian Barang	Jumlah	Satuan	Nilai	Kondisi
1	1010302004000020	Amplop coklat KOP BPHN (FOLIO)	5	Pak	592.500	Baik
2	1010302004000017	Amplop coklat Cabinet POLOS	17	Pak	550.100	Baik
3	1010301001000051	Ballpoint Standard Boldliner elite 1.0 Blue	1	Lusin	171.500	Baik
4	1010301001000049	Balpoint sarasa Zebra 0,5 Biru	3	Lusin	761.400	Baik
5	1010301003000047	Binder Clip No. 111	3	Dus	18.600	Baik
6	1010301999000039	Box File Karton	3	Pcs	55.500	Baik
7	1010301999000041	Box File Plastik Folio	4	Pcs	160.000	Baik
8	1010301005000006	Buku Agenda	80	Buah	19.840.000	Baik
9	1010301005000017	buku agenda folio	10	Buah	195.000	Baik
10	1010301005000031	Buku Agenda Folio 100 Lbr Kiky	10	Buah	280.000	Baik
11	1010301005000002	Buku Agenda Polio	4	Buah	78.000	Baik
12	1010301005000018	buku ekspedisi	10	Buah	139.000	Baik
13	1010301006000034	bussines file daichi F4	1	Buah	58.000	Baik
14	1010301008000002	Cutter Besar L-500	8	Buah	125.000	Baik
15	1010301010000029	Double tape 1 inch Joyko	3	Roll	24.750	Baik
16	1010304004000072	EPSON T6642 CYAN	2	Pcs	235.600	Baik
17	1010304004000073	EPSON T6643 MAGENTA	4	Pcs	476.000	Baik
18	1010304004000074	EPSON T6643 YELLOW	4	Pcs	476.000	Baik
19	1010304006000018	Flashdisk 128 GB Sandisk	1	Buah	238.000	Baik
20	1010304006000016	Flashdisk 16 GB Sandisk	5	Buah	473.800	Baik
21	1010304006000017	Flashdisk OTG 32 GB Sandisk	4	Buah	576.000	Baik
22	1010301008000013	Gunting kecil	4	Buah	33.000	Baik
23	1010301012000003	Head Machine Max HD 10 D (Stepler Kecil)	4	Buah	224.000	Baik
24	1010301008000008	isi Cutter Besar L- 500	20	Buah	338.000	Baik
25	1010301013000007	Isi staples Kecil No. 10-1M max isi 20	5	Buah	371.250	Baik
26	1010301999000070	Joyco Tape Cutter 119	1	Buah	30.800	Baik
27	1010399999000026	Kalender	76	Buah	5.700.000	Baik
28	1010301999000064	Kalkulator	1	Buah	370.450	Baik
29	1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	145	Rim	9.251.000	Baik
30	1010302001000025	Kertas HVS BD F4 80 Gr	45	Rim	3.303.000	Baik
31	1010301010000046	Lakban Cokelat 2 Inch Daimaru	2	Roll	30.200	Baik
32	1010301010000017	LAKBAN Hitam (2)	4	Roll	81.200	Baik
33	1010301010000034	Lem Fox Stick	4	Buah	60.400	Baik
34	1010301010000045	Lem UHU 35 Gram	5	Buah	115.000	Baik
35	1010302002000011	Lembar Disposisi	100	Buah	2.470.000	Baik
36	1010301006000060	Map Folder Ber Kop BPHN	400	Buah	7.840.000	Baik
37	1010304010000005	Mouse Wireless M220 Logitech Silent	2	Buah	452.800	Baik
38	1010301006000026	Ordner Bantex 1452 PVC A5	14	Buku	548.100	Baik
39	1010301004000017	Penghapus Pensil Staedtler 5-26 B-20	5	Buah	126.000	Baik

40	1010301004000011	Penghapus pensil Staedtler 526-B40	3	Buah	12.300	Baik
41	1010301001000010	PENSIL 2 b stadler	9	Buah	426.300	Baik
42	1010399999000008	Plakat	20	Buah	8.985.000	Baik
43	1010304999000016	Pointer R 400 Logitech	1	Buah	567.000	Baik
44	1010302002000064	Port it 3M 680-09 Sign Here	2	Pad	54.800	Baik
45	1010302002000045	Post It 654	2	Pad	33.000	Baik
46	1010301001000039	Pulpen Ball Liner Biru Pilot	6	Lusin	1.226.700	Baik
47	1010301001000027	pulpen Gel K1 Kenko	7	Lusin	365.050	Baik
48	1010301999000037	Punch Pembolong kertas No.40 XL Kenko	2	Buah	56.000	Baik
49	1010301999000067	Rautan Pensil angel A-5 (Kecil)	2	Buah	115.300	Baik
50	1010301999000058	Remover Kertas	2	Buah	80.000	Baik
51	1010301010000031	Solatif Bening Daimaru (12mm x 25yard)	4	Roll	22.000	Baik
52	1010301001000005	Spidol Art 70	1	Lusin	115.000	Baik
53	1010301001000032	spidol Permanent Marker artline 70	5	Lusin	741.000	Baik
54	1010301001000017	spidol whiteboard hitam	2	Dus	206.000	Baik
55	1010301001000012	stabilo bos	12	Buah	181.200	Baik
56	1010301012000002	Stapler HD 10 Max	10	Buah	200.000	Baik
57	1010302002000065	Sticker Label Tom & Jerry No.120	8	Buah	61.600	Baik
58	1010301006000040	STOP MAP PUTIH BERKOP BPHN	4	Pak	831.600	Baik
59	1010301010000021	tape dispencer besar	2	Buah	57.400	Baik
60	1010301010000022	tape dispencer kecil	3	Buah	64.500	Baik
61	1010304004000097	Tinta Epson 001 Black	8	Buah	1.591.600	Baik
62	1010304004000098	Tinta Epson 001 Cyan	7	Buah	960.400	Baik
63	1010304004000099	Tinta Epson 001 Magenta	9	Buah	1.234.800	Baik
64	1010304004000100	Tinta Epson 001 Yellow	8	Buah	1.097.600	Baik
65	1010304004000093	Tinta Epson 003 Black	7	Buah	816.200	Baik
66	1010304004000094	Tinta Epson 003 Cyan	12	Buah	1.406.400	Baik
67	1010304004000095	Tinta Epson 003 Magenta	11	Buah	1.289.800	Baik
68	1010304004000096	Tinta Epson 003 Yellow	10	Buah	1.168.400	Baik
69	1010304004000106	Tinta Epson 008 Black	3	Buah	1.072.000	Baik
70	1010304004000107	Tinta Epson 008 Cyan	3	Buah	906.600	Baik
71	1010304004000108	Tinta Epson 008 Magenta	3	Buah	906.600	Baik
72	1010304004000109	Tinta Epson 008 Yellow	3	Buah	906.600	Baik
73	1010304004000103	Tinta Epson 774 (Epson M100)	3	Buah	923.800	Baik
74	1010304004000007	Tinta Hp Laser Jet 12 A	2	Buah	3.240.000	Baik
75	1010301002000003	Tinta Stempel	8	Buah	76.800	Baik
76	1010304004000037	Toner HP Laser Jet 85A	1	Buah	1.519.000	Baik
77	1010304004000101	Toner HP Laserjet 79 A	1	Buah	1.485.000	Baik
78	1010301003000030	Trgonal Clip no. 1 joikp Trigonal Clip No 1	3	Buah	79.500	Baik
79	1010314002000244	Acetylcysteine 200 Mg (Dus 100 KPS)	200	Box	253.200	Baik
80	1010314005000022	Acyclovir 5% Salep	20	Tube	100.280	Baik
81	1010314002000178	Alleron	1	Box	39.000	Baik
82	1010314002000105	Allohex	2	Box	131.000	Baik

83	1010314002000245	Allohex 10 Mg Tab @50	100	Tablet	131.000	Baik
84	1010314002000246	Allopurinol 100 MG Dus 100 Tab @ 100 GBN	100	Tablet	40.600	Baik
85	1010314002000247	Allopurinol 300 Mg @ 100 Hexa	300	Gbn	198.700	Baik
86	1010314002000283	Alpentin 100 Mg CAP @50	50	Box	226.450	Baik
87	1010314002000179	Ambeven	1	Box	231.000	Baik
88	1010314002000248	Amlodipine 10 Mg (Dus 50 Tab) BJN	450	Box	299.700	Baik
89	1010314002000284	Amlodipine 5 Mg (Dus 50 Tab) BJN	150	Box	60.000	Baik
90	1010314999000115	Any-Etch	5	Buah	263.625	Baik
91	1010314002000250	ARCOXIA 120MG TAB@30	60	Tablet	1.483.980	Baik
92	1010314999000025	Articulating Paper	1	Box	126.540	Baik
93	1010314002000286	Atorvastatin 20 MG Tab @30 GYA	150	Box	799.200	Baik
94	1010314002000253	ATORVASTATIN CALC 10MG TABGHX	300	Box	799.200	Baik
95	1010314005000020	Balsem Telon	1	Pot	13.085	Baik
96	1010314999000157	Benang jahit Tanpa Jarum	1	Box	13.661	Baik
97	1010314001000002	Betadine 15ml	2	Botol	35.432	Baik
98	1010314005000009	Bioplacento Gel	2	Tube	68.684	Baik
99	1010314002000256	BIORON TAB@100	100	Tablet	142.600	Baik
100	1010314002000320	Bisoprolol 5 Mg @100 Tab GHX BPJS	300	Box	519.600	Baik
101	1010314002000050	Blue Hard Stone	1	Box	36.000	Baik
102	1010314002000257	BRAKIDIN TAB	100	Tablet	166.600	Baik
103	1010314005000030	Caladine Lotion 60 MI	3	Botol	56.823	Baik
104	1010314002000258	CANDESARTAN 8MG TAB@30 GDX	150	Box	899.100	Baik
105	1010314002000259	CAVIPLEX KAPLET @ 100 (ERELA)	500	Box	466.000	Baik
106	1010314002000289	Cefadroxil 500 Mg Cap @100 GDX	100	Cap	119.900	Baik
107	1010314002000290	Cefixime 100 Mg Cap @100 GDX	200	Cap	579.800	Baik
108	1010314002000252	CEFIXIME 200MG CAP@100 GDX	200	Cap	976.800	Baik
109	1010314002000291	Cetirizine 10 MG (dua 30 Tab) -BJN	30	Tube	17.310	Baik
110	1010314001000085	Chemi Dental Poland NaOcl 5.25% + Surfactant25	1	Box	198.690	Baik
111	1010314001000058	CHKM Ghimas	1	Kaplet	85.000	Baik
112	1010314999000018	Cotton Roll No.2 3	2	Buah	189.860	Baik
113	1010314002000261	DEXTEEM PLUS TAB@100	200	Buah	106.600	Baik
114	1010314002000295	Eflagen 50 Mg Tab @50	50	Box	149.900	Baik
115	1010314005000051	Elite Sement	1	Box	293.040	Baik
116	1010314005000004	Erlamicetin (salep mata)	6	Tube	75.924	Baik
117	1010314002000297	Exaflam 25 Mg Tab @50 GDN	50	Box	119.900	Baik
118	1010314002000262	FENOFIBRATE 100MG CAP@50 GDX BPJS	50	Buah	133.200	Baik
119	1010314004000001	Fletcher	1	Botol	27.500	Baik
120	1010314002000263	FLOXIFAR 500MG TAB@100	200	Tablet	181.500	Baik
121	1010314005000008	Formyco Salep	10	Tube	265.070	Baik
122	1010314001000072	Forummen Tetes telinga	5	Botol	187.810	Baik
123	1010314999000039	Fuji 9	1	Buah	1.205.127	Baik

124	1010314999000154	Gips Stone Biru Moldano	1	Buah	59.940	Baik
125	1010314002000299	Glucodex 80 Mg Tab @100	300	Box	211.800	Baik
126	1010314002000265	GLUCOSAMIN MPL 500 MG	300	Buah	669.300	Baik
127	1010314005000046	Hot N Cream Tube 60 Grm	5	Tube	119.880	Baik
128	1010314005000049	HYDROCORTISONE 2.5%CR(DUS 24TUBE@ 5 Gr	11	Tube	50.666	Baik
129	1010314001000050	Insto Eye Drops 7.5 ml Hijau	7	Botol	115.619	Baik
130	1010314001000048	insto moist	5	Fls	78.925	Baik
131	1010314002000202	Intunal Forte Tablet	200	Box	215.800	Baik
132	1010314999000136	K- File Niti 45-80/25 mm	1	Box	154.290	Baik
133	1010314002000268	KALMETHASONE 0.5MG TAB@200	400	Tablet	58.400	Baik
134	1010314002000124	kalnex	1	Tablet	5.200	Baik
135	1010314999000159	Kapas Pembalut 500 Grm	1	Box	106.560	Baik
136	1010314002000300	Kettesse 25 Mg Tab @ 50	30	Box	369.660	Baik
137	1010314999000044	K-File 30	1	Kotak	165.000	Baik
138	1010314999000005	K-File No.15	2	Box	325.600	Baik
139	1010314999000006	K-file No.20	1	Box	162.800	Baik
140	1010314999000007	K-File No.25	1	Box	165.000	Baik
141	1010314002000301	Lansoprazole 30 Mg 20 Capsul GNUL	180	Box	294.660	Baik
142	1010314002000269	LEVOFLOXACIN 500 MG GHX CAPL@50 BPJS	100	Box	166.600	Baik
143	1010314001000093	Lidocain Injeksi	6	Box	18.384	Baik
144	1010314002000302	Lopamid Tablet @100	100	Tablet	31.900	Baik
145	1010314002000303	Loratadine 10 Mg Tab @100 GHX	400	Box	186.800	Baik
146	1010314002000168	L-Vit D3 1000 IU @3 X 10 Tab	60	Box	299.760	Baik
147	1010314002000322	Magasida Tablet (Dus 10 Tablet) BJN	200	Dus	186.400	Baik
148	1010314002000304	Mecobalamin 500 Mcg Cap @ 100 GNOV	600	Box	719.400	Baik
149	1010314002000270	METFORMIN TAB 500 MG @200 TAB (HEXA)	200	Box	73.200	Baik
150	1010314002000271	METHYL PREDNISOLON 8MG GDX	700	Box	496.300	Baik
151	1010314001000094	Minosep 2% 60 MI	2	Botol	77.256	Baik
152	1010314001000071	Minyak Tawon DD	2	Botol	73.110	Baik
153	1010314001000095	Minyak Telon Konicare 60 MI	2	Botol	56.290	Baik
154	1010314002000272	MUCOHEXIN 8MG TAB@100	200	Tablet	153.200	Baik
155	1010314001000081	Natrium Klorida 500 MI	1	Botol	9.336	Baik
156	1010314005000019	Nebacetin Salep	7	Tube	203.735	Baik
157	1010314002000274	NEUROPYRON V TAB@100	200	Tablet	253.200	Baik
158	1010314001000108	OBH 100 MI (IKA)	41	Botol	628.038	Baik
159	1010314002000323	Omeprazole 20 Mg Cap @30 GNOV	150	Tablet	74.100	Baik
160	1010314002000078	Omeprazole Tab	11	Box	374.550	Baik
161	1010314999000081	One swabs 2 Ply	2	Box	24.000	Baik
162	1010314002000310	Opistan 500 Mg KPL @ 100	100	Tablet	71.000	Baik
163	1010314001000065	Otilon	5	Box	283.385	Baik
164	1010314005000050	Painkila CR 30 Gr	9	Box	248.760	Baik
165	1010314001000109	Plantacid Susp 100 MI	3	Botol	41.958	Baik
166	1010314002000311	Plasminex Tab @100500 Mg	2	Tablet	7.992	Baik

167	1010314001000061	Plossa Hanger Red Hot	12	Box	148.944	Baik
168	1010314002000185	Propranolol	1	Box	24.000	Baik
169	1010314999000086	Saliva	1	Pak	55.500	Baik
170	1010314999000160	Salonpas koyo @10	1	Box	7.458	Baik
171	1010314001000033	Sanadryl	10	Botol	232.440	Baik
172	1010314999000158	Saniter Wipes	4	Buah	48.536	Baik
173	1010314002000312	Sanmol 500 Mg Tab	400	Box	223.600	Baik
174	1010314002000313	Scopma 10 Mg Kpl @ 100	200	Box	324.200	Baik
175	1010314002000278	SCOPMA PLUS TAB	600	Box	1.062.600	Baik
176	1010314002000314	Teosal Tab @100	100	Tablet	25.300	Baik
177	1010314002000315	Titan 150 Mg Tab @100	300	Tablet	239.700	Baik
178	1010314002000281	TREMENZA TAB@100	100	Tablet	213.100	Baik
179	1010314002000316	Vesperum 10 Mg Tab @100	100	Tablet	39.200	Baik
180	1010314002000282	VOLTADEX 50MG TAB@50	400	Tablet	266.400	Baik
181	1010314002000317	Welmove CPI @60	20	Buah	87.920	Baik
182	1010314999000016	Z350 XT A3,5B	1	Box	576.298	Baik
JUMLAH			12.186		116.129.741	

Jakarta, 3 Juli 2024

Mengetahui,
Petugas Gudang/Petugas Persediaan



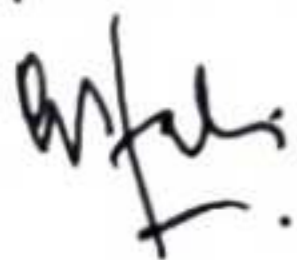
Nurmansyah
NIP 198308242006041001



Plt. Kepala Bagian Umum

Tri Sadewo Y.C
NIP 198007112003121001

Operator Persediaan



Evi Imalia
NIP 198402022006042001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753
Website. www.bphn.go.id email bphn@bphn.go.id

**BERITA ACARA
PENGHENTIAN BMN DARI PENGGUNAAN
Nomor : PHN.1-PB.05.05-02**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H, M.H.
NIP : 19730409 200212 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dengan cara merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca, pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dengan hasil (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penghentian BMN dari penggunaan pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza
NIP. 19730409 200212 1 001

Lampiran Penghentian BMN dari Penggunaan

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	21	Rusak Berat
2	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	24	Rusak Berat
3	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	26	Rusak Berat
4	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	28	Rusak Berat
5	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	29	Rusak Berat



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753
Laman.www.bphn.go.id email bphn@bphn.go.id

BERITA ACARA
PENGHENTIAN BMN DARI PENGGUNAAN
Nomor : PHN.1-PB.05.05-03

Pada hari ini Jum'at tanggal tigapuluh satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza,S.H,M.H.
NIP : 197304092002121008
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dengan cara merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca, pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal tigapuluh satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dengan hasil (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penghentian BMN dari penggunaan pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza
NIP. 19730409 200212 1 001

Lampiran Penghentian BMN dari Penggunaan

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1	3020101001	Sedan	2-3	Rusak Berat
2	3020102003	Mini Bus	9-10	Rusak Berat



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640

Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753

Laman. www.bphn.go.id email bphn@bphn.go.id

**Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Milik Negara
Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional
Nomor : PHN.1-PB.03.01-29**

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah selesai dilaksanakan cek kondisi fisik BMN pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, dari hasil cek fisik tersebut didapatkan sebanyak 5 (*lima*) unit barang perlu dilakukan perubahan kondisi pada SAKTI sebagai berikut :

No	Nama Barang	NUP	Kode Barang	Kondisi Sebelum Cek Fisik	Kondisi setelah Cek fisik	Keterangan
1	Sepeda Motor	21	3.02.01.04.001	Baik	Rusak Berat	Biaya Pemeliharaan lebih mahal dari manfaat yang diperoleh
2	Sepeda Motor	24	3.02.01.04.001	Baik	Rusak Berat	
3	Sepeda Motor	26	3.02.01.04.001	Baik	Rusak Berat	
4	Sepeda Motor	28	3.02.01.04.001	Baik	Rusak Berat	
5	Sepeda Motor	29	3.02.01.04.001	Baik	Rusak Berat	

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan perubahan kondisi barang dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza, S.H., M.H.
NIP. 19730409 200212 1 00



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753
Laman. www.bphn.go.id email bphn@bphn.go.id

Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Milik Negara
Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional
Nomor : PHN.1-PB.04.01-06

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah selesai dilaksanakan cek kondisi fisik BMN pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, dari hasil cek fisik tersebut didapatkan sebanyak 4 (empat) unit barang perlu dilakukan perubahan kondisi pada SAKTI sebagai berikut :

No	Nama Barang	NUP	Kode Barang	Kondisi Sebelum Cek Fisik	Kondisi setelah Cek fisik	Keterangan
1	Sedan	2	3020101001	Baik	Rusak Berat	Kondisi Barang sudah tidak berfungsi dan rusak berat
2	Sedan	3	3020101001	Baik	Rusak Berat	
3	Mini Bus	9	3020102003	Baik	Rusak Berat	
4	Mini Bus	10	3020102003	Baik	Rusak Berat	

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan perubahan kondisi barang dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza
NIP. 197304092002121008



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SEK.4-109.PB.05.05 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR DINAS OPERASIONAL KARENA PENJUALAN PADA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV Nomor S-56/MK.6/KNL.0704/2024 tanggal 27 Maret 2024;
 - b. bahwa persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditindaklanjuti dengan penjualan secara lelang pada KPKNL Jakarta IV yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024, serta telah dilakukan serah terima kepada pemenang lelang sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor PHN.1-PB.05.01-19 tanggal 8 Mei 2024;
 - c. bahwa memperhatikan surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.1-PB.05.05-03 tanggal 20 Mei 2024 hal Permohonan Surat Keputusan Penghapusan BMN selain tanah daan/atau bangunan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka perlu dilakukan penghapusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional karena Penjualan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.PB.03.01 Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pelimpahan Mandat Sekretaris Jenderal Selaku Pelaksana Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Tertentu di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DINAS OPERASIONAL KARENA PENJUALAN PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Menghapuskan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dengan nilai perolehan sebesar Rp323.602.260,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), nilai limit sebesar Rp 100.424.000,00 (seratus juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan nilai penjualan sebesar Rp115.487.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KEDUA : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaporkan Perubahan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan Kuasa Pengguna Barang sebagai akibat dari Penghapusan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Kebenaran materiil dan formil atas jenis, jumlah, nilai, dan tahun perolehan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL,
u.b.

KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DAN PENGADAAN BARANG/JASA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AMAN RIYADI
NIP. 196602231990011001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : SEK.4-109.PB.05.05 TAHUN 2024
Tanggal : 19 Juni 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DINAS OPERASIONAL YANG DIHAPUSKAN KARENA PENJUALAN
PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	MEREK/ TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI (Rp)			KETERANGAN
							PEROLEHAN	LIMIT	PENJUALAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	3020102002	4	Micro Bus	Mitsubhisi FE 349 Nomor Polisi : B 7196 MQ Nomor Mesin : 4D34478314	2004	1	124.922.000	50.555.000	115.487.000	Berita Acara Serah Terima Nomor PHN.1-PB.05.01-19 tanggal 8 Mei 2024
2	3020102003	12	Mini Bus	Toyota kijang Inova Nomor Polisi : B 2640 SQ Nomor Mesin: ITR6242788	2006	1	198.680.260	49.869.000		
TOTAL						2	323.602.260	100.424.000	115.487.000	

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL,
u.b.
KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DAN PENGADAAN BARANG/JASA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AMAN RIYADI
NIP. 196602231990011001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: SEK.3-KU.04.01-263

Pada hari ini Kamis tanggal 4 bulan Juli tahun 2024 telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 antara Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai dengan Sekretariat Jenderal sebagai UAPA.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 menggunakan Basis Akrual. Laporan Keuangan terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual, akun-akun dalam suatu Laporan Keuangan saling terhubung dengan akun pada Laporan Keuangan lainnya. Keterhubungan antar akun tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan salah saji pada Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis atas hubungan antar Laporan dan perhitungan akrual atas akun-akun pada Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca didapatkan uraian sebagai berikut :

ANALISA DATA ANTAR AKUN LAPORAN KEUANGAN

1 Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		30 Juni 2024
	Uraian	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	625.000.000,00
	Uang Muka dari KPPN	625.000.000,00
	Selisih	-
	Penjelasan :	

2 Aset = Kewajiban + Ekuitas		30 Juni 2024
	Uraian	
	Aset Tahun Berjalan	399.659.898.908,00
	Kewajiban Tahun Berjalan	2.052.489.895,00
	Ekuitas Tahun Berjalan	397.607.409.013,00
	Selisih	-
	Penjelasan :	

3 Saldo Akun Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE) = Total Belanja Netto pada LRA		30 Juni 2024
	Uraian	
	Ditagihkan ke Entitas Lain	20.547.014.328,00
	Total Belanja Netto pada LRA	20.547.014.328,00
	Selisih	-
	Penjelasan :	

4 Saldo akun Diterima dari Entitas Lain (LPE) = total Pendapatan Netto pada LRA		30 Juni 2024
	Uraian	
	Diterima dari Entitas Lain	237.155.783,00
	total Pendapatan Netto pada LRA	237.155.783,00

Selisih
Penjelasan :

5 Angka surplus/defisit pada LO = angka surplus/defisit pada LPE

	Uraian	30 Juni 2024
surplus/defisit pada LO	-	21.715.374.087,00
surplus/defisit pada LPE	-	21.715.374.087,00
Selisih		-
Penjelasan :		

6 Angka ekuitas awal pada LPE tahun berjalan = angka ekuitas akhir pada LPE dan Neraca TA sebelumnya

	Uraian	30 Juni 2024
ekuitas awal pada LPE tahun berjalan		399.075.137.055,00
ekuitas akhir pada LPE dan Neraca TA sebelumnya		399.075.137.055,00
Selisih		-
Penjelasan :		

7 Angka ekuitas akhir pada LPE = angka ekuitas pada Neraca tahun berjalan

	Uraian	30 Juni 2024
ekuitas akhir pada LPE		397.607.409.013,00
ekuitas pada Neraca tahun berjalan		397.607.409.013,00
Selisih		-
Penjelasan :		

Bogor, 4 Juli 2024
Operator Sakti GLP



(Tika Fidya Wati)
NIP. 19951005 201901 2 001

Operator GLP Aset & Persediaan



(Nurmansyah)
NIP. 19830824 200604 1 001

Mengetahui,

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Sekretariat Jenderal



(T. Suyono)
NIP. 19700615 199703 1 001



(Ahna Ernita)
NIP. 19770402 200112 2 001

Kolom Verifikasi	Nama	Paraf
1. Pembina/Koordinator Wilayah	Putra Arum R	
2. Pembina Unit Utama (Eselon I)	ELISA HGRIP	



REVIU LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

REVIU LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024

Catatan Hasil Reviu (CHR)

**Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Inspektorat Jenderal**

**CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
(selaku UAPPA-E1)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2024**

Kementerian Hukum dan HAM RI Inspektorat Jenderal		Disusun oleh/Tanggal	AT/ 17-07-2024
		Direviu oleh/Tanggal	KT/ 18-07-2024
		Disetujui oleh/Tanggal	PT/ 19-07-2024
UAPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Kementerian Hukum dan HAM	
UAPPA-E1	<input checked="" type="checkbox"/>	Badan Pembinaan Hukum Nasional	
UAPPA-W	<input type="checkbox"/>	-	
UAKPA	<input type="checkbox"/>	-	
URAIAN CATATAN HASIL REVIU			INDEKS KKR
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI			
-			KKR-HR
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN			
1. LRA			
<p>a. Pada LRA Pendapatan terdapat Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp131.307.990,00. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak BPHN, terdapat kesalahan penyetoran pendapatan atau kesalahan penggunaan akun atas penyetoran pengembalian belanja modal dari hasil temuan BPK senilai Rp Rp47.080.353,29, yang seharusnya dicatat pada akun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu. Sehingga, nilai akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu seharusnya adalah sebesar Rp84.227.636,71,00 dan akun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu adalah sebesar Rp47.080.353,29, namun telah dilakukan koreksi sesuai dengan Memo Penyesuaian No. 008 tanggal 30 Juni 2024.</p> <p>b. Realisasi Belanja pada Semester I TA. 2024 adalah sebesar Rp55.260.141.666 atau 47,24% dari total anggaran sebesar Rp116.989.153.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Pegawai sebesar Rp10.067.415.127 dengan persentase realisasi sebesar 55,64%. 2) Belanja Barang sebesar Rp44.969.104.039 dengan persentase realisasi sebesar 45,57%. 3) Belanja Modal sebesar Rp223.622.500 dengan persentase realisasi sebesar 99,69%. <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022, target Realisasi Belanja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yaitu Belanja Pegawai sebesar 50%, Belanja Barang sebesar 50% dan Belanja Modal sebesar 40%. Sehingga belanja barang tidak sesuai dengan target. Telah dijelaskan di CaLK.</p> <p>c. Terdapat anggaran belanja yang belum direalisasikan (0%) per 30 Juni 2024, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp9.300.000,00; 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri sebesar Rp170.000.000,00. 			KKR-LRA

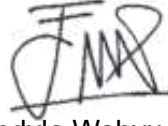
Telah dijelaskan di CaLK.	
2. LO	
-	KKR-LO
3. LPE	
-	KKR-LPE
4. NERACA	
Terdapat Aset Gedung Bangunan berupa Masjid/Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Kode Barang: 4010108001 NUP 1) yang berlokasi jauh dari lokasi kantor BPHN (di daerah Tangerang) yang terbangun di atas Tanah tercatat kepemilikan UAKPB Sekretariat Jenderal. UAKPB BPHN sudah tidak menganggarkan anggaran pemeliharaan terhadap Aset Gedung Bangunan berupa Masjid/Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen tersebut sejak selesai dibangun dan berencana akan menyerahkan Bangunan Masjid tersebut, nilai manfaat, dan status aset kepada UAKPB Sekretariat Jenderal. UAKPB BPHN telah melakukan pembahasan dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal dan ditindaklanjuti dengan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Cq. Kepala Biro Umum dengan Nomor PHN.1-PB.02.04-01 tanggal 09 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut atas Hasil Reviu Inspektorat Jenderal, namun sampai dengan saat ini belum terdapat tindak lanjut penyelesaian dari Biro Umum Sekretariat Jenderal.	KKR-NRC
5. MONITORING SAKTI	
Terdapat <i>to do list</i> diantaranya: a. Transaksi resiprokal antara Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan Universitas Singaperbangsa Karawang atas pencatatan belanja terkait Bantuan Hukum senilai Rp61.740.000,00 yang belum dicatat sebagai penerimaan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang selaku penerima dana bantuan hukum. Berdasarkan konfirmasi dengan pihak pengelola keuangan, diketahui bahwa <i>to do list</i> tersebut muncul dikarenakan terdapat kebijakan pada Universitas Singaperbangsa Karawang melakukan pengakuan sebesar 10% karena 90% anggaran tersebut diterima oleh OBH; b. Utang yang Belum Ditagihkan terdapat pada 4 (empat) satuan kerja yaitu Kanwil Bangka Belitung senilai Rp10.987.700, Kanwil Bengkulu senilai Rp28.568.000, Kanwil Jawa Timur senilai Rp188.800.000 dan BPHN senilai Rp259.472.187, telah dijelaskan di CaLK.	
6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
a. Pada Tabel Neraca halaman 7 terdapat perbedaan nilai Aset Tak Berwujud Tahun 2023, pada CaLK senilai Rp4.184.325.500, namun pada MonSAKTI senilai Rp4.234.323.660; b. Pada tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan (CaLK halaman 27), untuk uraian Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin belum disesuaikan	KKR-CaLK

<p>kenaikan persentase pendapatannya;</p> <p>c. Nilai total anggaran pada tabel Rincian Pembelian Buku dan Koleksi Penyusunan Perpustakaan periode 30 Juni 2024 (CaLK halaman 41) belum sesuai dengan total anggaran pada tabel Rincian Realisasi Belanja Modal (CaLK halaman 36) dan data LRA Belanja dari MonSAKTI;</p> <p>d. Terdapat ketidaksesuaian atas tabel Rincian Pembelian Buku dan Koleksi Penyusunan Perpustakaan periode 30 Juni 2024 (CaLK halaman 41) pada Kanwil Banten dan Kanwil Gorontalo dengan uraian nilai realisasi belanja modal masing-masing satuan kerja (CaLK halaman 38);</p> <p>e. Terdapat perbedaan nilai pada tabel Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin (CaLK halaman 48) pada akun akumulasi penyusutan sebesar Rp21.562.905.170,00, namun pada Neraca Percobaan Akruwal MonSAKTI nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp22.505.090.017,00;</p> <p>f. Terdapat perbedaan nilai pada tabel Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan (CaLK halaman 50) pada akun akumulasi penyusutan sebesar Rp25.623.349.003,00, namun pada Neraca Percobaan Akruwal MonSAKTI nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp27.707.063.234,00;</p> <p>g. Pada uraian saldo aset lain-lain per 30 Juni 2024 (CaLK halaman 55) tercantum sebesar Rp731.141.000 yang belum sesuai dengan Neraca Percobaan Akruwal MonSAKTI, seharusnya sebesar Rp731.141.600,00.</p> <p>h. Pada penjelasan terkait peningkatan realisasi pendapatan TA. 2024 (CaLK halaman 27 CaLK) yang bersumber dari pengembalian belanja karena temuan BPK belum menjelaskan koreksi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp131.307.990,00 yang seharusnya terdiri dari akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp84.227.636,71,00 dan akun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp47.080.353,29.</p> <p>i. Pada uraian penjelasan terkait realisasi belanja (CaLK halaman 32) mengalami kenaikan belum tepat dikarenakan realisasi belanja 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023.</p>	
KOREKSI/PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN DAN DISETUJUI	
-	
REKOMENDASI	
<p>Direkomendasikan agar Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Badan Pembinaan Hukum Nasional agar melakukan perbaikan terhadap Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sesuai Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:</p> <p>a. Agar terhadap Aset Gedung Bangunan UAKPB BPHN berupa Masjid/Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Kode Barang: 4010108001 NUP 1) yang terbangun di atas aset tanah yang kepemilikannya tercatat di UAKPB Sekretariat Jenderal dilakukan transfer keluar ke UAKPB Sekretariat Jenderal;</p>	

- b. Agar UAKPB BPHN membuat kebijakan/surat untuk mencegah transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI yang menginformasikan kepada Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum bahwa dalam proses penyusunan kontrak Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), jika menggunakan rekening Pemerintah maka harus mencatat sebagai pendapatan, dikecualikan bagi Pemberi Bantuan Hukum PTN yang menggunakan rekening Pemberi Bantuan Hukum selain rekening Pemerintah;
- c. Agar memperbaiki CaLK atas perbedaan pada nominal:
- 1) Nilai Aset Tak Berwujud Tahun 2023, pada CaLK senilai Rp4.184.325.500, namun pada MonSAKTI senilai Rp4.234.323.660;
 - 2) Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk uraian Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin belum disesuaikan kenaikan persentasenya;
 - 3) Nilai total anggaran pada tabel Rincian Pembelian Buku dan Koleksi Penyusunan Perpustakaan periode 30 Juni 2024 belum sesuai dengan total anggaran pada tabel Rincian Realisasi Belanja Modal dan data LRA Belanja dari MonSAKTI;
 - 4) Terdapat ketidaksesuaian atas tabel Rincian Pembelian Buku dan Koleksi Penyusunan Perpustakaan periode 30 Juni 2024 pada Kanwil Banten dan Kanwil Gorontalo dengan uraian nilai realisasi belanja modal masing-masing satuan kerja;
 - 5) Terdapat perbedaan nilai pada tabel Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin pada akun akumulasi penyusutan sebesar Rp21.562.905.170,00, namun pada Neraca Percobaan Akrual MonSAKTI nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp22.505.090.017,00;
 - 6) Terdapat perbedaan nilai pada tabel Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan pada akun akumulasi penyusutan sebesar Rp25.623.349.003,00, namun pada Neraca Percobaan Akrual MonSAKTI nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp27.707.063.234,00;
 - 7) Pada uraian saldo aset lain-lain per 30 Juni 2024 tercantum sebesar Rp731.141.000 yang belum sesuai dengan Neraca Percobaan Akrual MonSAKTI, seharusnya sebesar Rp731.141.600,00.
- d. Agar memperbaiki CaLK atas kurang rincinya penjelasan terkait:
- 1) peningkatan realisasi pendapatan TA. 2024 yang bersumber dari pengembalian belanja karena temuan BPK yaitu belum menjelaskan koreksi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp131.307.990,00 yang seharusnya terdiri dari akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp84.227.636,71,00 dan akun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp47.080.353,29.
 - 2) Kesalahan penjelasan realisasi belanja yang tertulis mengalami kenaikan, seharusnya realisasi belanja 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023.

 <p>Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional,</p>  <p>Ditandatangani secara elektronik oleh I Gusti Putu Milawati NIP 197705092001122001</p>	<p>Jakarta, 19 Juli 2024</p> <p>Inspektorat Jenderal Pengendali Teknis I,</p>  <p>Andriyanto Wahyu Prasetio NIP 197012181999031002</p>
---	--

Pengendali Teknis II,



Fandyla Wahyu Sasongko
NIP 198402112006041001

REKAPITULASI DATA REVISI BPHN SATKER
PERIODE S.D 30 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMOR DIPA	PAGU	REVISI KE	TANGGAL REVISI	JENIS REVISI		Nilai Revisi	KEWENANGAN				DOKUMEN PENDUKUNG	STATUS REVISI	KETERANGAN
							POK	DIPA		SATKER	ESELON I	KANWIL PERBEN	DJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
diisi nomor surat	diisi kode satker	diisi nama satker	diisi nomor DIPA satker	diisi pagu keseluruhan satker	diisi revisi yang dilakukan	diisi tanggal revisi	di ceklist	diceklist	diisi jumlah yang di revisi	di ceklist	diceklist	di ceklist	diceklist	diisi dokumen pendukung berupa surat atau nota dinas	diisi status revisi pada aplikasi OM SPAN	diisi maksud dan tujuan revisi
1	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	DIPA-013.10.1.409288/2023	Rp 42.121.767.000	1	30/01/2024		√	Rp 47.741.425.000				√	1. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-34/AG/AG.5/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Blokir <i>Automatic Adjustment</i> TA 2023 Kemenkumham 2. Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-17 Perihal Penyampaian Hasil Revisi Antar Program dan <i>Automatic Adjustment</i>	Posting	Revisi dalam rangka Blokir <i>Automatic Adjustment</i> , Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan pergeseran anggaran antar program sebesar Rp1.180.751.000
				Rp 42.121.767.000	2	16/02/2024		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-16 tanggal 19 Februari 2024 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi Bulan Februari	Posting	Update RPD Hal III DIPA Triwulan I TA 2024
				Rp 42.121.767.000	3	20/03/2024		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-20 tanggal 18 Maret 2024 Perihal penyampaian Usulan Revisi RKA-KL Kelompok Substansi Keuangan	Posting	Pemenuhan Anggaran Belanja PPPK Tahun 2024
				Rp 42.121.767.000	4	22/04/2024		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-31 tanggal 24 April 2024 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi Revisi Anggaran DIPA BPHN TA 2024	Posting	Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA Triwulan II TA 2024 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional
				Rp 42.121.767.000	5	21/05/2024		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-37 tanggal 22 Mei 2024 Perihal penyampaian RKAKL Revisi Anggaran kegiatan PJA TA 2024	Posting	Pemenuhan anggaran kegiatan prioritas Badan Pembinaan Hukum Nasional Paralegal Justice Award (PJA)
				Rp 42.121.767.000	6	28/06/2024		√	Rp 42.810.145.000				√	Surat Kepala Badan Pembinaan Nasional Nomor PHN-KU.01.02-03 perihal Penyampaian Data Dukung Revisi DIPA Anggaran Belanja Pegawai TA 2024	Posting	Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2024

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Tgl, No. SP : 28 November 2023 , DIPA-013.10.1.409288/2024

Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (01.51) DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT KPPN : (139) Jakarta V

Satuan Kerja : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 370.477.813,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01104/KW/409288/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	0,00	1.197.805.767,00	827.327.954,00	370.477.813,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	1.197.805.767,00	827.327.954,00	370.477.813,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	0,00	1.197.805.767,00	827.327.954,00	370.477.813,00
	1. BP UP*)	0,00	333.711.800,00	288.233.987,00	45.477.813,00
	2. BP TUP*)	0,00	705.000.000,00	380.000.000,00	325.000.000,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	159.093.967,00	159.093.967,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 254.522.187,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	370.477.813,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	370.477.813,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	370.477.813,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	370.477.813,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	45.477.813,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	254.522.187,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	325.000.000,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	325.000.000,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	325.000.000,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. -

2. -

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



HERU TRIAWAN
NIP 198506112008041001

KOTA JAKARTA PUSAT, Juni 2024

Bendahara Pengeluaran



UCI BAYU KURNIAWAN

NIP 198801272009121006

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)									
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)									
Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)									
Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-29	12:29:55	935535	TRANSFER KE . TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 376,050,213	Rp. 5,572,400	-	Rp. 370,477,813	(TELLER)	(Empty)
2024-06-28	11:55:04	971873	TRANSFER KE . TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 395,550,213	Rp. 19,500,000	-	Rp. 376,050,213	(TELLER)	(Empty)
2024-06-28	11:29:41	920925	TRANSFER KE . TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 440,243,280	Rp. 44,693,067	-	Rp. 395,550,213	(TELLER)	(Empty)
2024-06-28	11:29:41	920895	TRANSFER KE . TRF TO:00000000008835908 PEMINDAHAN KE 8835908 Sdri EMA ELVIYANI BR SEMBIRIN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 461,864,980	Rp. 21,621,700	-	Rp. 440,243,280	(TELLER)	(Empty)
2024-06-28	09:56:03	775766	TRANSFER DARI 0977000077 241391303022219000001 39130302221900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 458,039,980	-	Rp. 3,825,000	Rp. 461,864,980	(SPAN)	(Empty)
2024-06-28	09:41:06	262258	TRANSFER DARI 0977000077 241391303022168000001 39130302216800000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 450,970,213	-	Rp. 7,069,767	Rp. 458,039,980	(SPAN)	(Empty)
2024-06-28	09:41:06	262253	TRANSFER DARI 0977000077 241391303022167000001 39130302216700000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 405,500,213	-	Rp. 45,470,000	Rp. 450,970,213	(SPAN)	(Empty)
2024-06-28	09:41:06	262241	TRANSFER DARI 0977000077 241391303022166000001 39130302216600000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 395,550,213	-	Rp. 9,950,000	Rp. 405,500,213	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)									
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)									
Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)									
Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-27	14:23:16	380612	TRANSFER DARI 0977000077 241391303022296000001 39130302229600000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 70,550,213	-	Rp. 325,000,000	Rp. 395,550,213	(SPAN)	(Empty)
2024-06-27	14:03:06	954392	TRANSFER KE TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 81,234,166	Rp. 10,683,953	-	Rp. 70,550,213	(TELLER)	(Empty)
2024-06-27	11:12:26	957078	TRANSFER KE TRF TO:0000000001786237675 PEMINDAHAN KE 1786237675 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 83,889,366	Rp. 2,655,200	-	Rp. 81,234,166	(TELLER)	(Empty)
2024-06-27	11:12:26	957052	TRANSFER KE . TRF TO:0000000001695087289 PEMINDAHAN KE 1695087289 Sdri REFWETIKA ROZYFA PUTE 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 98,889,366	Rp. 15,000,000	-	Rp. 83,889,366	(TELLER)	(Empty)
2024-06-27	10:01:18	277743	TRANSFER DARI 0977000077 241391303021836000001 39130302183600000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 81,234,166	-	Rp. 17,655,200	Rp. 98,889,366	(SPAN)	(Empty)
2024-06-26	13:34:02	940651	TRANSFER KE . TRF TO:000000000514053663 PEMINDAHAN KE 514053663 Bpk BHAKTI PURNAMA LEONARDO 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 100,767,986	Rp. 19,533,820	-	Rp. 81,234,166	(TELLER)	(Empty)
2024-06-25	12:13:30	184149	TRANSFER DARI 0977000077 241391303021603000001 39130302160300000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 79,191,186	-	Rp. 21,576,800	Rp. 100,767,986	(SPAN)	(Empty)
2024-06-25	10:29:10	954060	TRANSFER KE . TRF TO:0000000001786237675 PEMINDAHAN KE 1786237675 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 106,217,986	Rp. 27,026,800	-	Rp. 79,191,186	(TELLER)	(Empty)
2024-06-25	10:29:10	954016	TRANSFER KE . TRF TO:00000000008835908 PEMINDAHAN KE 8835908 Sdri EMA ELVIYANI BR SEMBIRIN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 123,961,186	Rp. 17,743,200	-	Rp. 106,217,986	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-25	09:36:36	787330	TRANSFER DARI 0977000077 241391303021179000001 39130302117900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 108,587,986	-	Rp. 15,373,200	Rp. 123,961,186	(SPAN)	(Empty)
2024-06-25	09:36:36	787316	TRANSFER DARI 0977000077 241391303021178000001 39130302117800000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 100,767,986	-	Rp. 7,820,000	Rp. 108,587,986	(SPAN)	(Empty)
2024-06-24	14:21:11	994745	TRANSFER KE . TRF TO:000000000195479522 PEMINDAHAN KE 195479522 Sdri ENDANG WAHYUNI SETYAWA 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 129,439,486	Rp. 28,671,500	-	Rp. 100,767,986	(TELLER)	(Empty)
2024-06-24	13:55:45	989140	TRANSFER KE Pembayaran Honorarium TRF TO:000000001786237675 PEMINDAHAN KE 1786237675 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 134,439,486	Rp. 5,000,000	-	Rp. 129,439,486	(TELLER)	(Empty)
2024-06-20	16:12:04	963825	TRANSFER KE TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 142,639,486	Rp. 8,200,000	-	Rp. 134,439,486	(TELLER)	(Empty)
2024-06-20	16:12:03	990820	TRANSFER KE TRF TO:000000000190574500 PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 190,745,286	Rp. 48,105,800	-	Rp. 142,639,486	(TELLER)	(Empty)
2024-06-20	10:54:33	998380	TRANSFER KE . TRF TO:000000000145311727 PEMINDAHAN KE 145311727 Bpk KRISNA PRAMUDIA 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 197,366,286	Rp. 6,621,000	-	Rp. 190,745,286	(TELLER)	(Empty)
2024-06-20	10:54:33	964305	TRANSFER KE TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 201,191,286	Rp. 3,825,000	-	Rp. 197,366,286	(TELLER)	(Empty)
2024-06-20	09:10:21	215325	TRANSFER DARI 0977000077 241391303020608000001 39130302060800000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 153,085,486	-	Rp. 48,105,800	Rp. 201,191,286	(SPAN)	(Empty)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-19	12:16:32	563152	TRANSFER DARI 0977000077 241391303020554000001 39130302055400000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 149,260,486	-	Rp. 3,825,000	Rp. 153,085,486	(SPAN)	(Empty)
2024-06-16	19:25:54	937659	TRANSFER KE TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 161,760,486	Rp. 12,500,000	-	Rp. 149,260,486	(TELLER)	(Empty)
2024-06-14	12:20:07	918277	TRANSFER KE Pembayaran tiket TRF TO:000000000732573015 PEMINDAHAN KE 732573015 AYOMI CITRA WISATA 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 251,216,783	Rp. 71,161,297	-	Rp. 180,055,486	(TELLER)	(Empty)
2024-06-14	12:20:07	902505	TRANSFER KE TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 180,055,486	Rp. 18,295,000	-	Rp. 161,760,486	(TELLER)	(Empty)
2024-06-12	14:55:47	050568	TRANSFER DARI 0977000077 241391303019964000001 39130301996400000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 239,081,783	-	Rp. 12,135,000	Rp. 251,216,783	(SPAN)	(Empty)
2024-06-12	10:47:33	974039	TRANSFER KE TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 251,216,783	Rp. 12,135,000	-	Rp. 239,081,783	(TELLER)	(Empty)
2024-06-12	10:11:13	977065	TRANSFER KE TRF TO:000000000514053663 PEMINDAHAN KE 514053663 Bpk BHAKTI PURNAMA LEONARDO 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 262,196,783	Rp. 10,980,000	-	Rp. 251,216,783	(TELLER)	(Empty)
2024-06-12	09:42:02	982889	TRANSFER KE . TRF TO:000000000145311727 PEMINDAHAN KE 145311727 Bpk KRISNA PRAMUDIA 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 282,196,783	Rp. 20,000,000	-	Rp. 262,196,783	(TELLER)	(Empty)
2024-06-12	09:29:44	945740	TRANSFER KE . TRF TO:000000001156886661 PEMINDAHAN KE 1156886661 Sdri SHAHNAZ IRIANI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 282,860,783	Rp. 664,000	-	Rp. 282,196,783	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-12	09:29:44	945738	TRANSFER KE . TRF TO:000000001156886582 PEMINDAHAN KE 1156886582 Sdri DITA NORA YOLANDANI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 285,530,783	Rp. 2,670,000	-	Rp. 282,860,783	(TELLER)	(Empty)
2024-06-12	09:29:44	945737	TRANSFER KE . TRF TO:000000000008835908 PEMINDAHAN KE 8835908 Sdri EMA ELVIYANI BR SEMBIRIN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 288,250,783	Rp. 2,720,000	-	Rp. 285,530,783	(TELLER)	(Empty)
2024-06-12	09:29:43	945725	TRANSFER KE . TRF TO:000000000326040137 PEMINDAHAN KE 326040137 Sdri SYAFITRI MULIANI IPA 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 291,744,740	Rp. 3,493,957	-	Rp. 288,250,783	(TELLER)	(Empty)
2024-06-12	09:29:43	942708	TRANSFER KE . TRF TO:000000000802765083 PEMINDAHAN KE 802765083 Sdri FARIDA SAPTIYANI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 295,038,000	Rp. 3,293,260	-	Rp. 291,744,740	(TELLER)	(Empty)
2024-06-12	09:29:43	942706	TRANSFER KE . TRF TO:000000001156886718 PEMINDAHAN KE 1156886718 Sdri WAHIDA HABIBAH 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 296,398,000	Rp. 1,360,000	-	Rp. 295,038,000	(TELLER)	(Empty)
2024-06-12	09:29:43	942705	TRANSFER KE . TRF TO:000000000190574500 PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 300,000,000	Rp. 3,602,000	-	Rp. 296,398,000	(TELLER)	(Empty)
2024-06-11	13:49:29	925809	TRANSFER KE Pembayaran Tiket TRF TO:000000001786237675 PEMINDAHAN KE 1786237675 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 319,164,104	Rp. 19,164,104	-	Rp. 300,000,000	(TELLER)	(Empty)
2024-06-11	13:09:58	245867	TRANSFER DARI 0977000077 241391303019579000001 39130301957900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 296,097,404	-	Rp. 23,066,700	Rp. 319,164,104	(SPAN)	(Empty)
2024-06-11	13:09:57	245750	TRANSFER DARI 0977000077 241391303019565000001 39130301956500000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 19,164,104	-	Rp. 276,933,300	Rp. 296,097,404	(SPAN)	(Empty)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-11	12:53:21	945550	TRANSFER KE TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 24,164,104	Rp. 5,000,000	-	Rp. 19,164,104	(TELLER)	(Empty)
2024-06-11	12:53:21	929793	TRANSFER KE . TRF TO:000000000193721725 PEMINDAHAN KE 193721725 Bpk HERU TRIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 39,164,104	Rp. 15,000,000	-	Rp. 24,164,104	(TELLER)	(Empty)
2024-06-11	12:26:42	949749	TRANSFER KE . TRF TO:0000000001786237675 PEMINDAHAN KE 1786237675 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 44,364,104	Rp. 5,200,000	-	Rp. 39,164,104	(TELLER)	(Empty)
2024-06-11	12:26:42	949730	TRANSFER KE TRF TO:000000000460780846 PEMINDAHAN KE 460780846 ARIEF KHARIS MATUAR W K 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 75,047,095	Rp. 15,000,000	-	Rp. 60,047,095	(TELLER)	(Empty)
2024-06-11	12:26:42	929063	TRANSFER KE . TRF TO:000000000195479522 PEMINDAHAN KE 195479522 Sdri ENDANG WAHYUNI SETYAWA 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 60,047,095	Rp. 15,682,991	-	Rp. 44,364,104	(TELLER)	(Empty)
2024-06-10	12:00:49	911533	TRANSFER KE . TRF TO:000000000008835908 PEMINDAHAN KE 8835908 Sdri EMA ELVIYANI BR SEMBIRIN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 80,047,095	Rp. 5,000,000	-	Rp. 75,047,095	(TELLER)	(Empty)
2024-06-10	11:40:43	939478	TRANSFER KE . TRF TO:000000007031972038 PEMINDAHAN KE 7031972038 Ibu NURLAELA SARI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 95,047,095	Rp. 15,000,000	-	Rp. 80,047,095	(TELLER)	(Empty)
2024-06-10	10:58:59	976802	TRANSFER KE . TRF TO:0000000001171500828 PEMINDAHAN KE 1171500828 Ibu NUR PRAMESTI ARMIDA 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 97,547,095	Rp. 2,500,000	-	Rp. 95,047,095	(TELLER)	(Empty)
2024-06-10	10:58:59	976784	TRANSFER KE ATK BMN TRF TO:0000000001156886661 PEMINDAHAN KE 1156886661 Sdri SHAHNAZ IRIANI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 113,075,850	Rp. 15,528,755	-	Rp. 97,547,095	(TELLER)	(Empty)
2024-06-10	08:51:48	951599	TRANSFER KE . TRF TO:000000000190574500 PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 115,075,850	Rp. 2,000,000	-	Rp. 113,075,850	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)									
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)									
Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)									
Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-10	08:51:47	951585	TRANSFER KE Pembayaran Honorarium TRF TO:000000000195479522 PEMINDAHAN KE 195479522 Sdri ENDANG WAHYUNI SETYAWA 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 121,025,850	Rp. 5,950,000	-	Rp. 115,075,850	(TELLER)	(Empty)
2024-06-10	08:51:47	951584	TRANSFER KE . TRF TO:000000000008835908 PEMINDAHAN KE 8835908 Sdri EMA ELVIYANI BR SEMBIRIN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 131,275,850	Rp. 10,250,000	-	Rp. 121,025,850	(TELLER)	(Empty)
2024-06-09	10:09:48	994112	TRANSFER KE Pembayaran Tiket TRF TO:000000001786237675 PEMINDAHAN KE 1786237675 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 149,275,850	Rp. 18,000,000	-	Rp. 131,275,850	(TELLER)	(Empty)
2024-06-07	15:40:05	954354	TRANSFER KE TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 164,275,850	Rp. 15,000,000	-	Rp. 149,275,850	(TELLER)	(Empty)
2024-06-06	12:36:01	947415	TRANSFER KE TRF TO:000000000460780846 PEMINDAHAN KE 460780846 ARIEF KHARIS MATUAR W K 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 169,275,850	Rp. 5,000,000	-	Rp. 164,275,850	(TELLER)	(Empty)
2024-06-05	13:57:09	999835	TRANSFER KE . TRF TO:000000000514053663 PEMINDAHAN KE 514053663 Bpk BHAKTI PURNAMA LEONARDO 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 174,275,850	Rp. 5,000,000	-	Rp. 169,275,850	(TELLER)	(Empty)
2024-06-05	11:09:37	949316	TRANSFER KE . TRF TO:000000000460780846 PEMINDAHAN KE 460780846 ARIEF KHARIS MATUAR W K 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 189,275,850	Rp. 15,000,000	-	Rp. 174,275,850	(TELLER)	(Empty)
2024-06-05	09:27:29	976984	TRANSFER KE . TRF TO:000000000129226831 PEMINDAHAN KE 129226831 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 211,405,850	Rp. 2,130,000	-	Rp. 209,275,850	(TELLER)	(Empty)
2024-06-05	09:27:29	911217	TRANSFER KE . TRF TO:000000000145311727 PEMINDAHAN KE 145311727 Bpk KRISNA PRAMUDIA 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 199,275,850	Rp. 10,000,000	-	Rp. 189,275,850	(TELLER)	(Empty)
2024-06-05	09:27:29	911202	TRANSFER KE . TRF TO:000000000008835908 PEMINDAHAN KE 8835908 Sdri EMA ELVIYANI BR SEMBIRIN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 209,275,850	Rp. 10,000,000	-	Rp. 199,275,850	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-04	13:42:33	949867	TRANSFER KE Pembayaran Tiket TRF TO:000000000860329014 PEMINDAHAN KE 860329014 Sdr ERWIN DWI AGUSTIAN HARI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 245,067,550	Rp. 33,661,700	-	Rp. 211,405,850	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	10:16:53	979314	TRANSFER KE . TRF TO:000000000802765141 PEMINDAHAN KE 802765141 Sdri NASTITI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 274,987,550	Rp. 29,920,000	-	Rp. 245,067,550	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	10:16:53	979306	TRANSFER KE . TRF TO:000000000190574500 PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 295,265,500	Rp. 1,515,600	-	Rp. 293,749,900	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	10:16:53	902779	TRANSFER KE . TRF TO:00000000008835908 PEMINDAHAN KE 8835908 Sdri EMA ELVIYANI BR SEMBIRIN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 278,329,900	Rp. 3,342,350	-	Rp. 274,987,550	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	10:16:53	902772	TRANSFER KE . TRF TO:0000000001156886718 PEMINDAHAN KE 1156886718 Sdri WAHIDA HABIBAH 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 293,749,900	Rp. 15,420,000	-	Rp. 278,329,900	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	10:16:53	902770	TRANSFER KE . TRF TO:0000000001156886661 PEMINDAHAN KE 1156886661 Sdri SHAHNAZ IRIANI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 297,405,500	Rp. 2,140,000	-	Rp. 295,265,500	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	10:16:52	902736	TRANSFER KE . TRF TO:0000000001156886582 PEMINDAHAN KE 1156886582 Sdri DITA NORA YOLANDANI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 305,456,300	Rp. 8,050,800	-	Rp. 297,405,500	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	10:16:52	902731	TRANSFER KE . TRF TO:000000000190574500 PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 341,756,300	Rp. 35,425,000	-	Rp. 306,331,300	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	10:16:52	902723	TRANSFER KE . TRF TO:000000000113188224 PEMINDAHAN KE 113188224 Sdr RINTO MANURUNG 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 306,331,300	Rp. 875,000	-	Rp. 305,456,300	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	10:16:52	902721	TRANSFER KE . TRF TO:0000000001786237675 PEMINDAHAN KE 1786237675 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 369,256,300	Rp. 27,500,000	-	Rp. 341,756,300	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-04	10:16:52	902719	TRANSFER KE . TRF TO:00000000802764975 PEMINDAHAN KE 802764975 Sdri TIKA FIDYA WATI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 378,376,300	Rp. 9,120,000	-	Rp. 369,256,300	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	10:16:52	902718	TRANSFER KE . TRF TO:00000000195479522 PEMINDAHAN KE 195479522 Sdri ENDANG WAHYUNI SETYAWA 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 380,000,000	Rp. 1,623,700	-	Rp. 378,376,300	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	09:40:06	068618	TRANSFER DARI 0977000077 241391303017619000001 39130301761900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 0	-	Rp. 380,000,000	Rp. 380,000,000	(SPAN)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 827,327,954	Rp. 1,197,805,767	Rp. 370,477,813		

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Jumat tanggal 28 bulan Juni tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9890884092881000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 370.477.813 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 01104/KW/409288/2024

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	370.477.813
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	370.477.813

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	45.477.813
2 Saldo BP TUP	Rp.	325.000.000
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	370.477.813

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	370.477.813
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	370.477.813

B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)

Rp. 0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	45.477.813
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	254.522.187
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	300.000.000
2 a. Saldo TUP	Rp.	325.000.000
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	325.000.000
3 Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	625.000.000

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	300.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	325.000.000
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	625.000.000

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)

Rp. 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

-

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

-

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

UCI BAYU KURNIAWAN
NIP 198801272009121006

Mengetahui



HERU TRIAWAN
NIP 198509112006041001

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 409288

BULAN : JUNI 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9890884092881000	BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	1	20	S-1215/WPB.12/KP.05/2020	23-06-2020	2024-06-28	370,477,813.00

BENDAHARA PENGELUARAN



UCI BAYU KURNIAWAN
NIP 198801272009121006

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JUNI 2024

Kementerian / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (01.51) DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT
 Satuan Kerja : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL40928800-
 No Rekening : 9890884092881000
 Nama Rekening : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI
 Nama Bank : 1
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2024			0,00
04-06-2024	FPK-PENG-s4ALChPbmezCnPD	Sp2D TUP	380.000.000,00	0,00	380.000.000,00
05-06-2024	00930/KW/409288/2024	Biaya transport lokal penyalarsan NA rapat pembahasan tindak lanjut pembentukan NA RUU pemindahan narapidana antar negara 220524 sesuai kuitansi no. 030.290 an. Sandy Suwardhy, Cs	0,00	510.000,00	379.490.000,00
05-06-2024	00931/KW/409288/2024	Biaya transport lokal penyalarsan NA rapat pembahasan tindak lanjut pembentukan NA RUU pemindahan narapidana antar negara 210524 sesuai kuitansi no. 030.291 an. Sandy Suwardhy, Cs	0,00	510.000,00	378.980.000,00
11-06-2024	FPK-PENG-kNBjsHOatJ3kr4S	Sp2D GUP	276.933.300,00	0,00	655.913.300,00
11-06-2024	FPK-PENG-Dp7oAZ7T8NTM7wd	Sp2D GUP	23.066.700,00	0,00	678.980.000,00
11-06-2024	01056/KW/409288/2024	Biaya perawatan gedung kantor bphn	0,00	2.461.000,00	676.519.000,00
12-06-2024	FPK-PENG-Fxy493hjn3JDnmU	Sp2D GUP KKP	12.135.000,00	0,00	688.654.000,00

1	2	3	4	5	6
12-06-2024	00933/KW/409288/2024	biaya sewa bus pariwisata tujuan MA PP kegiatan paralegal justice awards sesuai kuitansi 020.200 an Pt Sinar Jaya langgeng Utama	0,00	21.200.000,00	667.454.000,00
12-06-2024	00940/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan kudapan pagi dan sore) rapat persiapan penyusunan prolegnas 110624 sesuai kuitansi no. 030.348 s.d 030.350 an. KendiXpress, Cs	0,00	10.100.000,00	657.354.000,00
12-06-2024	00990/KW/409288/2024	Biaya konsumsi makan dan snack kegiatan layanan urusan kerumahtanggaan dalam rangka gladi bersih upacara peringatan hari lahir pancasila sesuai kuitansi nomor 040.819 s/d 040.820 an Isakuiki,cs	0,00	7.700.000,00	649.654.000,00
12-06-2024	00993/KW/409288/2024	Biaya pembelian peralatan komputer pada kantor BPHN Kemenkumham RI sesuai kuitansi nomor 040.822 s/d 040.823 an Sis Computer,cs	0,00	7.055.000,00	642.599.000,00
12-06-2024	01004/KW/409288/2024	Biaya pembelianpanasonic lampu led neo bulb 5 watt, 11 watt, dan 15 watt pada kantro BPHN Kemenkumham RI sesuai kuitansi nomor 040.831 an Tokopedia	0,00	6.932.538,00	635.666.462,00
12-06-2024	00982/KW/409288/2024	Biaya perjadi dalam rangka mengklarifikasi dan konfirmasi hasil pemeriksaan hukdis dan etika PNS terkait pemikahan siri di Padang sesuai kuitansi nomor 040.812 s/d 040.813 an Widya Oesman,cs	0,00	5.032.475,00	630.633.987,00
12-06-2024	01008/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack layanan umum dalam rangka kegiatan BPHN Fest 2024 di lingkungan BPHN sesuai kuitansi nomor 040.835 an Fonns	0,00	4.800.000,00	625.833.987,00
12-06-2024	01001/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan penyusunan pokja PPLH SDALH sesuai kuitansi no 010.533 an lalu mas solihin,cs,cs	0,00	4.250.000,00	621.583.987,00
12-06-2024	00939/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan kudapan) rapat finalisasi pembahasan perencanaan Rpepres 060624 sesuai kuitansi no. 030.346 s.d 030.347 an. KendiXpress, Cs	0,00	3.850.000,00	617.733.987,00
12-06-2024	00969/KW/409288/2024	Biaya konsumsi makan dan snack pelantikan dan pengambilan sumpah janji JF AH di BPHN Kemenkumham RI sesuai kuitansi nomor 040.801 s/d 040.802 an RM Pagi Sore,cs	0,00	3.078.000,00	614.655.987,00
12-06-2024	01012/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan snack) kegiatan	0,00	3.065.000,00	611.590.987,00

1	2	3	4	5	6
		rapat narsum pokja polhukamkesra sesuai kuitansi no 010.540 s.d. 010.541 an Iga bakar warungan,cs			
12-06-2024	01006/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan layanan urusan kerumahtanggaan sesuai kuitansi nomor 040.832 s/d 040.834 an Arief Kharisma,cs	0,00	3.060.000,00	608.530.987,00
12-06-2024	00936/KW/409288/2024	Biaya honor narasumber kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan prolegnas jangka menengah 110624 sesuai kuitansi no. 030.308 an. RM Dewo Broto Joko Putranto	0,00	3.000.000,00	605.530.987,00
12-06-2024	01011/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan snack) kegiatan FGD pokja PPLH SDALH sesuai kuitansi no 010.538 s.d. 010.539 an D' Warung,cs	0,00	2.680.000,00	602.850.987,00
12-06-2024	00997/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack layanan kesehatan dalam rangka kegiatan pembinaan jasmani dan kesehatan pegawai di lingkungan BPHN sesuai kuitansi nomor 040.826 an Toko Kue Danis	0,00	2.160.000,00	600.690.987,00
12-06-2024	00988/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack layanan kesehatan dala rangka kegiatan pembinaan jasmani dan kesehatan pegawai di lingkungan BPHN sesuai kuitansi nomor 040.818 an Fonns	0,00	2.160.000,00	598.530.987,00
12-06-2024	00994/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan pelaksanaan AEH didang polhukamkesra sesuai kuitansi no 010.528 s.d.010.530 an kolonel sus,cs	0,00	2.040.000,00	596.490.987,00
12-06-2024	00937/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan kudapan) rapat penyalarsan NA RUU ttg metrologi legal 150524 sesuai kuitansi no. 030.317 s.d 030.318 an. Iga Bakar Warungan, Cs	0,00	1.875.000,00	594.615.987,00
12-06-2024	00943/KW/409288/2024	Biaya trnasport lokal kegiatan koordinasi keprotokoleran Kementerian sesuai kuitansi nomor 040.780 s/d 040.782 an Soundy Wijaya,cs	0,00	1.870.000,00	592.745.987,00
12-06-2024	00977/KW/409288/2024	Biaya konsumsi makan dan snack kegiatan audiensi penjajakan kerjasama terkait layanan inklusif bagi disabilitas tuli sesuai kuitansi nomor 040.807 s/d 040.808 anRM Taman Surya,cs	0,00	1.694.000,00	591.051.987,00
12-06-2024	00986/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan snack) kegiatan rapattim kajian pembentukan organisasi profesi JF AH sesuai kuitansi no 010.522 s.d.010.523 an IGA BAKAR WARUNGAN	0,00	1.401.000,00	589.650.987,00

1	2	3	4	5	6
12-06-2024	00984/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan snack) kegiatan rapat narsum pokja industri kreatif sesuai kuitansi no 010.520 s.d.010.521 an RM. pagi sore,cs	0,00	1.320.000,00	588.330.987,00
12-06-2024	00951/KW/409288/2024	Biaya pembelian BBM utk bln April 2024 pd kantor BPHN Kemenkumham RI dg nopolis B 1186 TQN sesuai kuitansi nomor 040.790	0,00	1.250.000,00	587.080.987,00
12-06-2024	00953/KW/409288/2024	Biaya pembelian BBM utk bln April 2024 pd kantor BPHN Kemenkumham RI dg nopolis B 2642 SQ sesuai kuitansi nomor 040.792	0,00	1.250.000,00	585.830.987,00
12-06-2024	00956/KW/409288/2024	Biaya pembelian BBM utk bln April 2024 pd kantor BPHN Kemenkumham RI dg nopolis B 2979 SQ sesuai kuitansi nomor 040.794	0,00	1.250.000,00	584.580.987,00
12-06-2024	00945/KW/409288/2024	Biaya pembelian BBM utk bln April 2024 pd kantor BPHN Kemenkumham RI dg nopolis B 1024 TQA sesuai kuitansi nomor 040.786	0,00	1.250.000,00	583.330.987,00
12-06-2024	00952/KW/409288/2024	Biaya pembelian BBM utk bln April 2024 pd kantor BPHN Kemenkumham RI dg nopolis B 1027 TQA sesuai kuitansi nomor 040.791	0,00	1.250.000,00	582.080.987,00
12-06-2024	00949/KW/409288/2024	Biaya pembelian BBM utk bln April 2024 pd kantor BPHN Kemenkumham RI dg nopolis B 2980 SQ sesuai kuitansi nomor 040.788	0,00	1.250.000,00	580.830.987,00
12-06-2024	00950/KW/409288/2024	Biaya pembelian BBM utk bln April 2024 pd kantor BPHN Kemenkumham RI dg nopolis B 1028 TQA sesuai kuitansi nomor 040.789	0,00	1.250.000,00	579.580.987,00
12-06-2024	00938/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan kudapan) rapat persiapan penyelarasan NA RUU ttg pengesahan perjanjian batas maritim RI-Vietnam 070624 sesuai kuitansi no. 030.344 s.d 030.345 an. Iga Bakar Warungan, Cs	0,00	1.218.400,00	578.362.587,00
12-06-2024	00979/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan snack) kegiatan rapat tim penyusunan tentang pembentukan permen sesuai kuitansi no 010.516 s.d.010.517 an RM. FATMAWATI	0,00	1.169.500,00	577.193.087,00
12-06-2024	00941/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan kudapan) rapat persiapan penyelarasan NA RUU ttg pengesahan perjanjian batas maritim RI-Vietnam 040624 sesuai kuitansi no. 030.351 s.d 030.352 an. Bebek Kaleyoy, Cs	0,00	1.161.700,00	576.031.387,00
12-06-2024	00983/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan snack) kegiatan	0,00	1.102.500,00	574.928.887,00

1	2	3	4	5	6
		rapat dewan redaksi JRV sesuai kuitansi no 010.518 s.d.010.519 an RM. Hokben			
12-06-2024	00960/KW/409288/2024	Biaya fotocopy rapat narsum pokja AE polhukamkesra sesuai kuitansi no 010.507 s.d.010.509 an FC. Karya Sari	0,00	1.100.000,00	573.828.887,00
12-06-2024	00995/KW/409288/2024	Biaya perbaikan laptop HP 14s pada kantor BPHN Kemenkumham RI sesuai kuitansi nomor 040.824 s/d 040.825 an Sis Computer,cs	0,00	1.020.000,00	572.808.887,00
12-06-2024	00932/KW/409288/2024	Biaya transport lokal penyusunan NA rapat RUU ttg narkoba dan psicotropika 140524 sesuai kuitansi no. 030.320 an. Raymon, Cs	0,00	1.020.000,00	571.788.887,00
12-06-2024	00942/KW/409288/2024	Biaya transport lokal rapat penyusunan revisi buku tanya jawab seputar pembentukan PP 310524 sesuai kuitansi no. 030.353 an. Adharinalti, Cs	0,00	1.020.000,00	570.768.887,00
12-06-2024	00989/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan snack) kegiatan PEMBERIAN RERKOMENDASI DALAM RANGKA UKOM sesuai kuitansi no 010.524 s.d.010.525 an delivery pondok bambu	0,00	1.008.000,00	569.760.887,00
12-06-2024	01003/KW/409288/2024	Biaya pembelian kopi, teh, dan kental manis untuk keperluan sehari-hari pada kantor BPHN TA 2024 sesuai kuitansi nomor 040.830 an Alfamidi	0,00	896.300,00	568.864.587,00
12-06-2024	01009/KW/409288/2024	Biaya transport lokal orang luar kegiatan rapat Koordinasi persiapan ukom sesuai kuitansi no 010.536 an Rachmat KR,cs	0,00	850.000,00	568.014.587,00
12-06-2024	01010/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan rapat pengembangan kompetensi AH sesuai kuitansi no 010.537 an Apri Listiyanto,cs	0,00	850.000,00	567.164.587,00
12-06-2024	00946/KW/409288/2024	Biaya pembelian BBM utk bln April 2024 pd kantor BPHN Kemenkumham RI dg nopolis B 1025 TQA sesuai kuitansi nomor 040.787	0,00	850.000,00	566.314.587,00
12-06-2024	01007/KW/409288/2024	Biaya transport lokal orang luar kegiatan rapat tim kajian pembentukan OP JF AH sesuai kuitansi no 010.535 an CICI sRI sUNINGSIH,cs	0,00	850.000,00	565.464.587,00
12-06-2024	01005/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan rapat persiapan pelatihan fungsional AH sesuai kuitansi no 010.534 an Alice angelica,cs	0,00	850.000,00	564.614.587,00
12-06-2024	00975/KW/409288/2024	Biaya honor rohaniwan pelantikan dan	0,00	800.000,00	563.814.587,00

1	2	3	4	5	6
		pengambilan sumpah/janji PNS BPHN sesuai kuitansi nomor 040.805 an H.Imran Hatumena,cs			
12-06-2024	00954/KW/409288/2024	Biaya pembelian BBM utk bln April 2024 pd kantor BPHN Kemenkumham RI dg nopolis B 2639 SQ sesuai kuitansi nomor 040.793	0,00	800.000,00	563.014.587,00
12-06-2024	00963/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas sesuai kuitansi nomor 040.798 an Holland Bakery	0,00	725.000,00	562.289.587,00
12-06-2024	00934/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (kudapan) Fasilitas pengelolaan perpustakaan hukum rapat penyusunan perubahan PP no 33 tahun 2012 ttg JDIH 070624 sesuai kuitansi no. 000.074 an. Nhayya Cake Shop, Cs	0,00	720.000,00	561.569.587,00
12-06-2024	00991/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan pelaksanaan AEH bidang ekuindagtur sesuai kuitansi no 010.526 s.d.010.527 an reza fikri,cs	0,00	680.000,00	560.889.587,00
12-06-2024	00996/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan pelaksanaan AEH bidang SDALH sesuai kuitansi no 010.530 s.d.010.531 an Yerico,cs	0,00	680.000,00	560.209.587,00
12-06-2024	00999/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan penyusunan permen peraturan pelaksanaan perpress AEH dengan tujuan BSK sesuai kuitansi no 010.532 an Viona wijaya,cs	0,00	680.000,00	559.529.587,00
12-06-2024	00998/KW/409288/2024	Biaya perbaikan printer epon L4150 pada kantor BPHN Kemenkumham RI sesuai kuitansi nomor 040.827 an Sis Computer	0,00	625.000,00	558.904.587,00
12-06-2024	00987/KW/409288/2024	Biaya honorarium instruktur senam kegiatan pembinaan jasmani dan kesehatan pegawai di kantor BPHN sesuai kuitansi nomor 040.816 an 040.817 an Anastasya Gabriela,cs	0,00	600.000,00	558.304.587,00
12-06-2024	00959/KW/409288/2024	Biaya fotocopy rapat tim kajian pemebentukan organisasi profesi jafung AH sesuai kuitansi no 010.506 an FC. Karya Sari	0,00	500.000,00	557.804.587,00
12-06-2024	00976/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat monev mutasi pegawai sesuai kuitansi nomor 040.806 an Cheesecake	0,00	480.000,00	557.324.587,00
12-06-2024	01002/KW/409288/2024	Biaya pembelian gula pasir untk keperluan	0,00	415.500,00	556.909.087,00

1	2	3	4	5	6
		sehari-hari pada kantor BPHN TA 2024 sesuai kuitansi nomor 040.829 an Tokopedia			
12-06-2024	00968/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (snack) kegiatan rapat tim penyusunan tentang pembentukan permen sesuai kuitansi no 010.512 an Fun fresh	0,00	352.500,00	556.556.587,00
12-06-2024	00971/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (snack) kegiatan rapat persiapan tim penyusunan tentang pembentukan permen sesuai kuitansi no 010.513 an Fun fresh	0,00	352.500,00	556.204.087,00
12-06-2024	00972/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (snack) kegiatan rapat tim penyusunan tentang pembentukan permen sesuai kuitansi no 010.514 an Fun fresh	0,00	340.500,00	555.863.587,00
12-06-2024	00973/KW/409288/2024	Biaya transportasi lokal pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sesuai kuitansi nomor 040.804 an H.Imran Hatumena	0,00	340.000,00	555.523.587,00
12-06-2024	00985/KW/409288/2024	Biaya transportasi lokal kegiatan layanan kesehatan sesuai kuitansi nomor 040.814 s/d 040.815 an Anastasya Gabriela,cs	0,00	340.000,00	555.183.587,00
12-06-2024	00944/KW/409288/2024	Biaya perjadi dalam rangka penyusunan postur RKAKL di lingkungan Kemenkumham TA 2025 di Jabar sesuai kuitansi nomor 040.785 an Deny Kurniawan	0,00	319.660,00	554.863.927,00
12-06-2024	00948/KW/409288/2024	Biaya fotocopy rapat koordinasi pembentukan organisasi profesi JF AH sesuai kuitansi no 010.503 an FC. Karya Sari	0,00	300.000,00	554.563.927,00
12-06-2024	00947/KW/409288/2024	Biaya fotocopy rapat pembahasan teknis mengenai fitur dan sub fitur sesuai kuitansi no 010.502 an FC. Karya Sari	0,00	300.000,00	554.263.927,00
12-06-2024	00955/KW/409288/2024	Biaya fotocopy rapat koordinasi persiapan pelaksanaan ukom JF AH sesuai kuitansi no 010.504 an FC. Karya Sari	0,00	300.000,00	553.963.927,00
12-06-2024	00974/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (snack) kegiatan rapat pengelolaan JRV sesuai kuitansi no 010.515 an Holland bakery	0,00	292.000,00	553.671.927,00
12-06-2024	00967/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (snack) rapat pembentukan organisasi profesi JF AH sesuai kuitansi no 010.511 an FC. Karya Sari	0,00	288.000,00	553.383.927,00
12-06-2024	00961/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas	0,00	261.600,00	553.122.327,00

1	2	3	4	5	6
		sesuai kuitansi nomor 040.796 an Roti O			
12-06-2024	00958/KW/409288/2024	Biaya fotocopy rapat penyusunan rapermen pembinaan kepatuhan hukum sesuai kuitansi no 010.505 an FC. Karya Sari	0,00	258.000,00	552.864.327,00
12-06-2024	00965/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (snack) rapat pembahasan teknis mengenai fitur dan sub fitur pengisian update sesuai kuitansi no 010.510 an Shintana Bakery	0,00	212.000,00	552.652.327,00
12-06-2024	00970/KW/409288/2024	Biaya pengandaan dan penjiilidan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF AH ahli muda di BPHN Kemenkumham sesuai kuitansi nomor 040.803 an FC Wijaya	0,00	200.000,00	552.452.327,00
12-06-2024	00981/KW/409288/2024	Biaya transportasi lokal kegiatan administrasi kepegawaian sesuai kuitansi nomor 040.811 an Putri Rahmalya	0,00	170.000,00	552.282.327,00
12-06-2024	00935/KW/409288/2024	Biaya transportasi lokal kegiatan persiapan penyusunan prolegnas 030624 sesuai kuitansi no. 030.303 an. Nunuk Febrianingsih	0,00	170.000,00	552.112.327,00
12-06-2024	00980/KW/409288/2024	Biaya transportasi lokal kegiatan pelantikan dan sumpah jabatan sesuai kuitansi nomor 040.810 an Wahidah Habibah	0,00	170.000,00	551.942.327,00
12-06-2024	00957/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas sesuai kuitansi nomor 040.795 an Holland Bakery	0,00	136.700,00	551.805.627,00
12-06-2024	00966/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas sesuai kuitansi nomor 040.780 an Holland Bakery	0,00	136.700,00	551.668.927,00
12-06-2024	01000/KW/409288/2024	Biaya pembelian pakan ikan taisho 1kg 5mm dalam rangka keperluan sehari-hari pada kantor BPHN Kemenkumham RI sesuai kuitansi nomor 040.828 an Tokopedia	0,00	126.020,00	551.542.907,00
12-06-2024	00978/KW/409288/2024	Biaya fotokopi kegiatan audiensi penjajakan kerjasama terkait layanan inklusif bagi disabilitas tuli sesuai kuitansi nomor 040.809 an FC Wijaya	0,00	100.000,00	551.442.907,00
12-06-2024	00992/KW/409288/2024	Biaya pengecekan iPad Pro (2nd gen) pada	0,00	100.000,00	551.342.907,00

1	2	3	4	5	6
		kantor BPHN Kemenkumham RI sesuai kuitansi nomor 040.821 an lbox			
12-06-2024	00962/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas sesuai kuitansi nomor 040.797 an Roti O	0,00	85.000,00	551.257.907,00
12-06-2024	00964/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas sesuai kuitansi nomor 040.799 an Roti O	0,00	75.000,00	551.182.907,00
13-06-2024	FPK-PENG-aJExpCyvpEBbD3G	Pembayaran KKP	0,00	12.135.000,00	539.047.907,00
19-06-2024	FPK-PENG-i7bNut3xSwllleg2	Sp2d LS Bendahara	3.825.000,00	0,00	542.872.907,00
19-06-2024	01053/KW/409288/2024	Biaya perawatan gedung bertingkat kantor BPHN Kemenkumham RI sesuai kuitansi nomor 040.870 an PT Kencana Haruni Sejahtera	0,00	48.632.000,00	494.240.907,00
19-06-2024	01035/KW/409288/2024	Biaya pembuatan piagam dan bingkainya anubhawa sasana desa/ kelurahan sadar hukum sesuai kuitansi no 020.201 s.d.020.210 an Eben Haezer,cs	0,00	6.400.000,00	487.840.907,00
19-06-2024	01034/KW/409288/2024	Biaya sewa langganan lisensi aplikasi Zoom periode 24/05/2024-23/06/2024 pada kantor BPHN TA 2024 sesuai kuitansi nomor 040.863 an Zoom Video Communication	0,00	3.986.036,00	483.854.871,00
19-06-2024	01017/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat penguatan rb terkait pelaksanaan assessment tim kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan BPHN Th 2024 sesuai kuitansi nomor 040.842 an Tip Top	0,00	3.371.250,00	480.483.621,00
19-06-2024	01051/KW/409288/2024	Biaya transport lokal TEMU SADAR HUKUM sesuai kuitansi no 020.223 an Satrio NurHuda,cs	0,00	3.230.000,00	477.253.621,00
19-06-2024	01043/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan snack) rapat koordinasi pelaksanaan bantuan hukum tingkat pusat sesuai kuitansi no 020.213.s.d 020.214 an kebuli abuya	0,00	3.043.600,00	474.210.021,00
19-06-2024	01018/KW/409288/2024	Biaya konsumsi makan dan snack rapat penguatan RB terkait sosialisasi pengukuran	0,00	2.462.000,00	471.748.021,00

1	2	3	4	5	6
		indeks kualitas kebijakan tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan sesuai kuitansi nomor 040.843 s/d 040.844 an Mie Ayam Achle,cs			
19-06-2024	01044/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan snack) rapat koordinasi penguatan paralegal peningkatan kualitas penyelenggaraan bankum sesuai kuitansi no 020.214.s.d 020.215 an Pagi Sore,cs	0,00	2.235.000,00	469.513.021,00
19-06-2024	01046/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (makan dan snack) rapat koordinasi penguatan paralegal peningkatan kualitas penyelenggaraan bankum sesuai kuitansi no 020.216.s.d 020.217 an pawon teh lenny,cs	0,00	1.867.000,00	467.646.021,00
19-06-2024	01021/KW/409288/2024	Biaya perjadiin menghadiri dan mendampingi pimpinan konsinyering bidang perencanaan legislasi sesuai kuitansi nomor 040.847 s/d 040.848 an Ema Elviyani Br Sembiring,cs	0,00	1.860.000,00	465.786.021,00
19-06-2024	01045/KW/409288/2024	Biaya sewa langganan lisensi aplikasi Zoom periode 26/05/2024-25/06/2024 pada kantor BPHN TA 2024 sesuai kuitansi nomor 040.864 an Zoom Video Communication	0,00	1.631.385,00	464.154.636,00
19-06-2024	01049/KW/409288/2024	Biaya transport lokal pembinaan tugas pokok PH dengan tujuan setjend kemenkumham sesuai kuitansi no 020.221 an Dicky,cs	0,00	1.530.000,00	462.624.636,00
19-06-2024	01054/KW/409288/2024	Biaya TRANSPORT LOKAL KEGIATAN RAPAT KOORDINASI JAFUNG AH dengan tujuan Ditjen AHU sesuai kuitansi no 010.543 an Apri Listiyanto,cs	0,00	1.360.000,00	461.264.636,00
19-06-2024	01047/KW/409288/2024	Biaya transport lokal pengembangan kompetensi JF PH sesuai kuitansi no 020.218.s.d 020.219 an Dicky,cs	0,00	1.360.000,00	459.904.636,00
19-06-2024	01015/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan layanan BMN sesuai kuitansi nomor 040.838 s/d 040.839 an Evi lmalia,cs	0,00	1.020.000,00	458.884.636,00
19-06-2024	01032/KW/409288/2024	Biaya jasa telekomunikasi bulan Juni 2024 sesuai kuitansi nomor 040.861 an PT Telkom Indonesia	0,00	995.197,00	457.889.439,00
19-06-2024	01042/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (snack) rapat koordinasi pelaksanaan bantuan hukum tingkat pusat sesuai kuitansi no 020.213 an agita cakes	0,00	959.000,00	456.930.439,00

1	2	3	4	5	6
19-06-2024	01014/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack dalam rangka pelaksanaan lelang bongkaran fisik BPHN sesuai kuitansi nomor 040.837 s/d 040.837A an Fonns,cs	0,00	749.510,00	456.180.929,00
19-06-2024	01050/KW/409288/2024	Biaya transport lokal pemeberian rekomendasi dan pelaksanaan ukom dengan tujuan BPSDM kemenkumham sesuai kuitansi no 020.222 an Dicky,cs	0,00	680.000,00	455.500.929,00
19-06-2024	01031/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan layanan urusan kerumahtangaan sesuai kuitansi nomor 040.860 an Andhika,cs	0,00	680.000,00	454.820.929,00
19-06-2024	01048/KW/409288/2024	Biaya transport lokal pembinaan JF PH dengan tujuan setjend kemenkumham sesuai kuitansi no 020.220 an Dicky,cs	0,00	680.000,00	454.140.929,00
19-06-2024	01016/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan layanan BMN sesuai kuitansi nomor 040.840 sd 040.841 an Nurmansyah,cs	0,00	680.000,00	453.460.929,00
19-06-2024	01041/KW/409288/2024	Biaya trasnport lokal kegiatan layanan BMN sesuai kuitansi nomor 040.868 s/d 040.869 an Nurmansyah,cs	0,00	680.000,00	452.780.929,00
19-06-2024	01019/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat penyusunan dan penerapan menejemen risiko terkait monev SPIP, menejemen risiko, dan benturan kepentingan TW II Th 2024 sesuai kuitansi nomor 040.845 an Mie AYam Achie	0,00	650.000,00	452.130.929,00
19-06-2024	01022/KW/409288/2024	Biaya trasnport lokal kegiatan penguatan RB terkait gladi bersih upacara peringatan hari lahir pancasila di lingkungan Kemenkumham Th 2024 sesuai kuitansi nomor 040.850 s/d 040.851 an Reynaldo Lengkong,cs	0,00	510.000,00	451.620.929,00
19-06-2024	01040/KW/409288/2024	Biaya trasnport lokal kegiatan rapat koordinasi capaian kinerja sesuai kuitansi nomor 040.867 an Nunuk Febriananingsih	0,00	510.000,00	451.110.929,00
19-06-2024	01039/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (snack) rapat koordinasi pelaksanaan bantuan hukum tingkat pusat sesuai kuitansi no 020.212 an fonns	0,00	504.000,00	450.606.929,00
19-06-2024	01038/KW/409288/2024	Biaya konsumsi (snack) rapat koordinasi pelaksanaan bantuan hukum tingkat pusat sesuai kuitansi no 020.211 an tummy kitcen	0,00	459.000,00	450.147.929,00
19-06-2024	01020/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat penguatan RB	0,00	440.000,00	449.707.929,00

1	2	3	4	5	6
		terkait koordinasi pelaksanaan pengunggahan data dukung indeks reformasi hukum pada K/L dan Pemda sesuai kuitansi nomor 040.846 an Mie Ayam Achie			
19-06-2024	01025/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas sesuai kuitansi nomor 040.854 an Holland Bakery	0,00	357.000,00	449.350.929,00
19-06-2024	01036/KW/409288/2024	Biaya trnasport lokal kegiatan pembahasan dan penyusunan dokumen rencana kerja sesuai kuitansi nomor 040.865 an Deny Kumiawan,cs	0,00	340.000,00	449.010.929,00
19-06-2024	01037/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan monev capaian kinerja BPHN sesuai kuitansi nomor 040.866 an Hayati,cs	0,00	340.000,00	448.670.929,00
19-06-2024	01013/KW/409288/2024	Biaya trnasport lokal kegiatan penatausahaan perbendaharaan sesuai kuitansi nomor 040.836 an Eva Kurnia,cs	0,00	340.000,00	448.330.929,00
19-06-2024	01052/KW/409288/2024	Biaya pembuatan spanduk kegiatan FGD SDALH sesuai kuitansi no 010.542 an CV. ALMIRA	0,00	300.000,00	448.030.929,00
19-06-2024	01024/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan pelaksanaan ketatausahaan dan arsip sesuai kuitansi nomor 040.853 an Soundy Wijaya	0,00	170.000,00	447.860.929,00
19-06-2024	01023/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan tata laksana kelembagaan sesuai kuitansi nomor 040.852 an Hayati	0,00	170.000,00	447.690.929,00
19-06-2024	01026/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas sesuai kuitansi nomor 040.855 an Holland Bakery	0,00	141.200,00	447.549.729,00
19-06-2024	01030/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas sesuai kuitansi nomor 040.859 an Holland Bakery	0,00	113.500,00	447.436.229,00
19-06-2024	01028/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas sesuai kuitansi nomor 040.857 an Roti O	0,00	103.000,00	447.333.229,00

1	2	3	4	5	6
19-06-2024	01033/KW/409288/2024	Biaya BPJS ketenagakerjaan bulan juni TA 2024 pada kantor BPHN Kemenkumham RI sesuai kuitansi nomor 040.862 an Bank BRI	0,00	82.620,00	447.250.609,00
19-06-2024	01027/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas sesuai kuitansi nomor 040.856 an Roti O	0,00	75.000,00	447.175.609,00
19-06-2024	01029/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat konsultasi anggota JDIH dalam rangka ketatausahaan dan penguatan substansi teknis Pusjardokumnas sesuai kuitansi nomor 040.858 an Roti O	0,00	71.000,00	447.104.609,00
20-06-2024	FPK-PENG-W1CmWKvKiZt13Zz	Sp2d LS Bendahara	48.105.800,00	0,00	495.210.409,00
21-06-2024	00038/KWTI/409288/2024	Sp2d LS Bendahara	0,00	48.105.800,00	447.104.609,00
21-06-2024	01055/KW/409288/2024	Biaya perjadiin melakukan peliputan kegiatan peresmian desa/kelurahan sadar hukum di Lampung sesuai kuitansi nomor 040.871 an Marthina Widyastuti	0,00	3.883.000,00	443.221.609,00
21-06-2024	00037/KWTI/409288/2024	Sp2d LS Bendahara	0,00	3.825.000,00	439.396.609,00
24-06-2024	01060/KW/409288/2024	Biaya Sewa Kamar Asrama AL Peserta kegiatan paralegal justice award sesuai kuitansi no 020.227 an simponi BPSDM	0,00	73.950.000,00	365.446.609,00
24-06-2024	01058/KW/409288/2024	Biaya Sewa Ruang Kelas kegiatan paralegal justice award sesuai kuitansi no 020.226 an simponi BPSDM	0,00	21.760.000,00	343.686.609,00
24-06-2024	01057/KW/409288/2024	Biaya Sewa Auditorium Atas kegiatan paralegal justice award sesuai kuitansi no 020.225 an simponi BPSDM	0,00	18.564.000,00	325.122.609,00
24-06-2024	01061/KW/409288/2024	Biaya Kamar Penginapan Panitia kegiatan paralegal justice award sesuai kuitansi no 020.228 an simponi BPSDM	0,00	9.450.000,00	315.672.609,00
24-06-2024	01059/KW/409288/2024	Biaya Sewa Ruang GUEST HOUSE KEGIATAN PARALEGAL JUSTICE AWARD SESUAI KUITANSI NO 010.226 AN SIMPONI BPSDM	0,00	7.080.000,00	308.592.609,00
24-06-2024	01063/KW/409288/2024	Biaya perjalanan dinas Desa sadar hukum jawa timur	0,00	6.953.609,00	301.639.000,00

1	2	3	4	5	6
24-06-2024	01062/KW/409288/2024	Biaya Kamar Penginapan Panitia kegiatan paralegal justice award sesuai kuitansi no 020.229 an simponi BPSDM	0,00	4.100.000,00	297.539.000,00
25-06-2024	FPK-PENG- kd75mOhJv7ZBTpP	Sp2d KKP	21.576.800,00	0,00	319.115.800,00
25-06-2024	FPK-PENG- A6elYvsu4BTeXvP	Sp2d LS Bendahara	15.373.200,00	0,00	334.489.000,00
25-06-2024	FPK-PENG- 723gpkWnNJKYI9T	Sp2d LS Bendahara	7.820.000,00	0,00	342.309.000,00
25-06-2024	FPK-PENG- 4Kga5Bb3Jq0LAtG	Pembayaran KKP	0,00	21.576.800,00	320.732.200,00
25-06-2024	00040/KWTI/409288/20 24	Sp2d LS Bendahara	0,00	15.373.200,00	305.359.000,00
25-06-2024	00039/KWTI/409288/20 24	Sp2d LS Bendahara	0,00	7.820.000,00	297.539.000,00
25-06-2024	01068/KW/409288/2024	Biaya trnasport lokal kegiatan layanan urusan kerumahtanggaan sesuai kuitansi nomor 040.883 s/d 040.888 an Achmad Fauzi,cs	0,00	3.570.000,00	293.969.000,00
25-06-2024	01066/KW/409288/2024	Biaya perjadiin kegiatan penelaahan kebutuhan belanja pegawai di lingkungan Kemenkumham TA 2024, sosialisasi Perdirjen PB No.PER-5/PB/2024 ttg juknis penilaian IKPA dan rekon data keuangan BPHN tingkat satker di Bogor sesuai k	0,00	2.730.000,00	291.239.000,00
25-06-2024	01076/KW/409288/2024	Biaya langganan keanggotaan APJHI Tahun 2024 Indonesian Law Journal 200624 sesuai kuitansi no. 000.075 an. APJHI	0,00	1.000.000,00	290.239.000,00
25-06-2024	01077/KW/409288/2024	Biaya langganan keanggotaan APJHI Tahun 2024 Majalah Hukum Nasional 200624 sesuai kuitansi no. 000.076 an. APJHI	0,00	1.000.000,00	289.239.000,00
25-06-2024	01069/KW/409288/2024	Biaya konsumsi makan dan sanck rapat audiensi justitia sesuai kuitansi nomor 040.889 s/d 040.890 an RM Sederhana,cs	0,00	976.000,00	288.263.000,00
25-06-2024	01065/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran, refreshment dan asistensi penyelesaian rekonsiliasi eksternal bulan April 2024 sesuai kuitansi nomor 040.878 s/d 040.879 an Ira Yustisia Smarayoni	0,00	680.000,00	287.583.000,00
25-06-2024	01073/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat penghargaan sesuai kuitansi nomor 040.895 an Fun Fresh	0,00	608.000,00	286.975.000,00

1	2	3	4	5	6
		Everyday			
25-06-2024	01071/KW/409288/2024	Biaya fotokopi bahan koordinasi penyusunan postur kegiatan indeks pembangunan hukum sesuai kuitansi nomor 040.892 s/d 040.893 an FC Karya Sari,cs	0,00	500.000,00	286.475.000,00
25-06-2024	01064/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rpaat penyusunan rencana anggaran terkait penyusunan pagu indikatif unti BPHN TA 2025 sesuai kuitansi nomor 040.872 an Nhayya	0,00	495.500,00	285.979.500,00
25-06-2024	01070/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat koodinasi kegiatan dang anggaran Tahun 2025 sesuai kuitansi nomor 040.891 an Holland Bakery	0,00	388.500,00	285.591.000,00
25-06-2024	01074/KW/409288/2024	Biaya tmasport lokal kegiatan pelaksanaan keprotokoleran kementerian sesuai kuitansi nomor 040.896 s/d 040.897 an Soundy Wijaya,cs	0,00	340.000,00	285.251.000,00
25-06-2024	01072/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan admnistrasi kepegawaian (pemberian layanan kepegawaian) sesuai kuitansi nomor 040.894 an Indah Rolengkap Sinambela,cs	0,00	340.000,00	284.911.000,00
25-06-2024	01075/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan pelaksanaan ketatausahaan dan arsip sesuai kuitansi nomor 040.898 an Arinta Dewi	0,00	340.000,00	284.571.000,00
25-06-2024	01067/KW/409288/2024	Biaya perbaikan service kendaraan dinas operasonal roda 2 pada kantor BPHN Kemenkumham RI dengan nopolis B 6639 TQA sesuai kuitansi nomor 040.882 an Mumu Jaya Motor	0,00	300.000,00	284.271.000,00
26-06-2024	01078/KW/409288/2024	Biaya perawatan gedung bertingkat pekerjaan perbaikan bak sampah kantor BPHN	0,00	48.000.000,00	236.271.000,00
26-06-2024	01081/KW/409288/2024	Biaya penggandaan dan penjilidan laporan kegiatan bidang SDALH sesuai kuitansi no 010.544 an CV.TSM	0,00	4.000.000,00	232.271.000,00
26-06-2024	01080/KW/409288/2024	Biaya penggandaan dan penjilidan laporan kegiatan bidang perekonomian sesuai kuitansi no 010.545 an CV.TSM	0,00	4.000.000,00	228.271.000,00
26-06-2024	01079/KW/409288/2024	Biaya penggandaan dan penjilidan laporan kegiatan bidang polhukamkesra sesuai kuitansi no 010.544 an CV.TSM	0,00	4.000.000,00	224.271.000,00
26-06-2024	01083/KW/409288/2024	Biaya transpoer lokal orang luar kegiatan	0,00	2.890.000,00	221.381.000,00

1	2	3	4	5	6
		Pengembangan Kompetensi Analis Hukum sesuai kuitansi no 010.548 an melia fauzyah,cs			
26-06-2024	01084/KW/409288/2024	biaya fotocopy kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum sesuai kuitansi no 010.248 an FC.Karya Sari	0,00	1.000.000,00	220.381.000,00
26-06-2024	01082/KW/409288/2024	Biaya penggandaan dan penjiilidan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum sesuai kuitansi no 010.547 an FC. Karya Sari	0,00	1.000.000,00	219.381.000,00
26-06-2024	FPK-PENG-tRYLHwkXC3TLOki	NIHIL	0,00	0,00	219.381.000,00
26-06-2024	FPK-PENG-8hbP3Jf8AwEgRnu	NIHIL	0,00	0,00	219.381.000,00
26-06-2024	FPK-PENG-sCGNwUNRdsfnWld	NIHIL	0,00	0,00	219.381.000,00
26-06-2024	FPK-PENG-yYj2cfBThL8AoTE	NIHIL	0,00	0,00	219.381.000,00
26-06-2024	FPK-PENG-HDXhCjiHEPJkYcD	NIHIL	0,00	0,00	219.381.000,00
27-06-2024	FPK-PENG-FZDAEENpm1dxsQQ	Sp2d TUP	325.000.000,00	0,00	544.381.000,00
27-06-2024	FPK-PENG-6PzhBLSdsMQnHGY	Sp2d LS bendahara	17.655.200,00	0,00	562.036.200,00
27-06-2024	01095/KW/409288/2024	Biaya perjadiin kegiatan pendampingan anggaran TA 2024 dalam rangka mendampingi Kepala BPHN di Swiss sesuai kuitansi 040.910 an Bhakti Pumama Leonardo	0,00	48.900.000,00	513.136.200,00
27-06-2024	01096/KW/409288/2024	Biaya perjadiin kegiatan pendampingan anggaran TA 2024 dalam rangka mendampingi Kepala BPHN di Swiss sesuai kuitansi 040.911	0,00	44.023.693,00	469.112.507,00
27-06-2024	00041/KWTI/409288/2024	Sp2d LS bendahara	0,00	17.655.200,00	451.457.307,00
27-06-2024	01097/KW/409288/2024	Biaya perjadiin luar negeri kegiatan pendampingan anggaran TA 2024 dalam rangka mendampingi Kepala BPHN di Swiss sesuai kuitansi 040.912	0,00	16.365.194,00	435.092.113,00
27-06-2024	01094/KW/409288/2024	Biaya honor pengangkatan pengelola keuangan untuk bulan Mei-Juni 2024 sesuai kuitansi nomor 040.908 an I Gusti Putu	0,00	13.852.000,00	421.240.113,00

1	2	3	4	5	6
		Milawati,cs			
27-06-2024	01098/KW/409288/2024	Biaya perjalan dinas koordinasi terkait bankum di papua barat	0,00	9.792.400,00	411.447.713,00
27-06-2024	01104/KW/409288/2024	Biaya perjalanan dinas desa sadar hukum di papua barat	0,00	9.792.400,00	401.655.313,00
27-06-2024	01103/KW/409288/2024	Biaya perjalanan dinas (uang harian fullboard) kegiatan konsinyering penyusunan NA di Jawa Barat sesuai kuitansi no. 030.354 s.d 030.372 an. Adharinalti, Cs	0,00	8.550.000,00	393.105.313,00
27-06-2024	01093/KW/409288/2024	Biaya perjadiin kegiatan rekonsiliasi dara LK dan BMN Semester I Th 2024 tingkat satker pusat Kemenkumham Th 2024 di Bogor sesuai kuitansi nomor040.913 s/sd 040.915 an Ira Yustisia Smarayoni,cs	0,00	7.986.000,00	385.119.313,00
27-06-2024	01099/KW/409288/2024	Biaya perjalanan dinas rekonsiliasi laporan keuangan di jawa barat	0,00	5.880.000,00	379.239.313,00
27-06-2024	01092/KW/409288/2024	Biaya honor sekretariat perwakilan tim teknis pendukung pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk bulan Mei-Juni 2024 sesuai kuitansi nomor 040.909 an Krisna Pramudia,cs	0,00	3.488.000,00	375.751.313,00
27-06-2024	01085/KW/409288/2024	Biaya konsumsi makan dan snack rapat pelaksanaan kerjasama hukum terkait finalisasi PKS antara Bappenas dengan BPHN sesuai kuitansi nomor 040.899 s/d 040.900 an Dapur Bu Sastro,cs	0,00	1.781.500,00	373.969.813,00
27-06-2024	01090/KW/409288/2024	Biaya perjadiin dalam rangka menghadiri kegiatan workshop penyusunan kurikulum di FH Sultan Ageng Tirtayasa (Banten) sesuai kuitansi nomor 040.905 s/d 040.906 an Arfan Faiz Muhlizi,cs	0,00	745.000,00	373.224.813,00
27-06-2024	01091/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat monev realisasi anggaran triwulan II dan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran BPHN Triwulan I TA 2024 sesuai kuitansi nomor 040.907 an Oey Dessert	0,00	695.000,00	372.529.813,00
27-06-2024	01088/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan administrasi kepegawaian (pemeberi layanan kepegawaian) sesuai kuitansi nomor 040.903 an Indah Rolengkap Sinambela,cs	0,00	510.000,00	372.019.813,00
27-06-2024	01086/KW/409288/2024	Biaya konsumsi snack rapat reduksi	0,00	352.000,00	371.667.813,00

1	2	3	4	5	6
		podcast/talkshow BPHTalks menuju PJA Th 2024 sesuai kuitansi nomor 040.901 an Holland Bakery			
27-06-2024	01102/KW/409288/2024	Biaya transport lokal penyusunan NA rapat panitia antarkementerian RUU ttg perubahan atas UU No. 37 Th 2004 ttg kepaillitan dan PKPU 070624 sesuai kuitansi no. 030.330 an. Tilawarman Sudrajat, Cs	0,00	340.000,00	371.327.813,00
27-06-2024	01101/KW/409288/2024	Biaya transport lokal penyusunan NA rapat panitia antarkementerian RUU ttg perubahan atas UU No. 37 Th 2004 ttg kepaillitan dan PKPU 060624 sesuai kuitansi no. 030.329 an. Tilawarman Sudrajat, Cs	0,00	340.000,00	370.987.813,00
27-06-2024	01089/KW/409288/2024	Biaya transport lokal kegiatan layanan kesehatan sesuai kuitansi nomor 040.904 an Ni Ketut Arianiasih	0,00	170.000,00	370.817.813,00
27-06-2024	01087/KW/409288/2024	Biaya trasnport lokal kegiatan rapat pendalaman terkait PKRI Th 2024 dan kompetensi inovasi pelayanan publik sesuai kuitansi nomor 040.902 an Marthina Widyastuti	0,00	170.000,00	370.647.813,00
27-06-2024	01100/KW/409288/2024	Biaya transport lokal persiapan penyusunan prolegnas 050624 sesuai kuitansi no. 030.328 an. Andrian Erickatama	0,00	170.000,00	370.477.813,00
28-06-2024	FPK-PENG-HmOEO5DFbWxkbi	Sp2d LS Bendahara	45.470.000,00	0,00	415.947.813,00
28-06-2024	FPK-PENG-2URa1J0b6bx1Dhb	Sp2d LS Bendahara	9.950.000,00	0,00	425.897.813,00
28-06-2024	FPK-PENG-zaZxpdrZBhmlm8L	Sp2d LS Bendahara	7.069.767,00	0,00	432.967.580,00
28-06-2024	FPK-PENG-WWJiflo05nc8rjZ	Sp2d LS Bendahara	3.825.000,00	0,00	436.792.580,00
28-06-2024	00043/KWTI/409288/2024	Sp2d LS Bendahara	0,00	45.470.000,00	391.322.580,00
28-06-2024	00042/KWTI/409288/2024	Sp2d LS Bendahara	0,00	9.950.000,00	381.372.580,00
28-06-2024	00044/KWTI/409288/2024	Sp2d LS Bendahara	0,00	7.069.767,00	374.302.813,00
28-06-2024	00045/KWTI/409288/2024	Sp2d LS Bendahara	0,00	3.825.000,00	370.477.813,00

1	2	3	4	5	6	
			Jumlah	1.197.805.767,00	827.327.954,00	370.477.813,00



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
No. Dokumen : 001
Tanggal : 02 Januari 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal balik Awal Tahun Pendapatan diterima dimuka atas sewa kantin

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1	√	Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	27.547.806	-
2	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	27.547.806

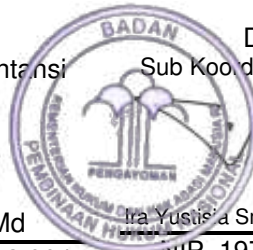
Keterangan:
Jurnal balik Awal Tahun Pendapatan diterima dimuka atas sewa kantin

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyah, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 02 Januari 2024



Disetujui oleh :
Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 02 Januari 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 02 Januari 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 002
 Tanggal : 18 Januari 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal balik Pembayaran Utang Listrik bulan Desember T.A. 2023 dengan No ID 547100163555

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		17	
2	Pendapatan Diterima Di Muka	18	Transfer Masuk
3	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	19	Transfer Keluar
4	Belanja Dibayar Di Muka	20	Koreksi Beban Aset
5	√ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	21	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
6	Penyisihan Piutang	22	Kas Lainnya di BLU
7	Penghapusan Piutang	23	Uang Muka Belanja
8	Penyusutan Aset	24	Perolehan Aset
9	Kas Di Bendahara Penerimaan	25	Koreksi Piutang/utang
10	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	26	Hibah Langsung
11	Persediaan	27	
12	Koreksi Antar Beban	28	
13	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	29	
14	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	30	Penyesuaian Neraca
15	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	31	Jurnal Koreksi
16	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	32	Jurnal Umum
	Pembentukan Piutang Jangka Pendek		

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang masih Harus Dibayar	59.552.282	-
2	K	522111	Beban Langganan Listrik	-	59.552.282

Keterangan:
 Jurnal balik Pembayaran Utang Listrik bulan Desember T.A. 2023 dengan No ID 547100163555

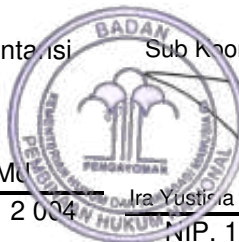
Dibuat oleh :
 Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyan
 Rizky Awaliyan, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 18 Januari 2024

Disetujui oleh :
 Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustira Smarayoni

 Ira Yustira Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 18 Januari 2024

Direkam oleh :
 Petugas Komputer

Tika Fidya Wati
 Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 18 Januari 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 003
 Tanggal : 18 Januari 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik Pembayaran Utang Listrik II bulan Desember T.A. 2023 dengan nomor ID 5471100717100 dan 547102931079

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	v	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	37.728.322	-
2	K	522111	Beban Langganan Listrik	-	37.728.322

Keterangan:

Jurnal Balik Pembayaran Utang Listrik II bulan Desember T.A. 2023 dengan nomor ID 5471100717100 dan 547102931079

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyan, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 18 Januari 2024

Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan



Ira Yustitia Smarayani, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 18 Januari 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer



Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 18 Januari 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 004
 Tanggal : 02 Februari 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal balik pembayaran Utang Telepon Bulan Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	972.858	-
2	K	522112	Beban Langganan Telepon	-	972.858

Keterangan:
 Jurnal balik pembayaran Utang Telepon Bulan Desember 2023

Dibuat oleh :
 Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyah, A.Md.
 NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 02 Februari 2024

Disetujui oleh :
 Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan



Ira Yustisia Smarayani, S.Kom., SH., M.Si
 NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 02 Februari 2024

Direkam oleh :
 Petugas Komputer

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 02 Februari 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 005
 Tanggal : 30 Juni 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran 2023 yang sudah dibayarkan/SP2D di Januari 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212191	Utang kepada pihak ketiga lainnya	589.375.493	-
2	K	218111	Utang yang belum diterima tagihannya	-	589.375.493

Keterangan:

Jurnal Balik atas Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran 2023 yang sudah dibayarkan/SP2D di Januari 2024

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyah, A.Md.
NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 30 Juni 2024

Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si.
NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 006
 Tanggal : 06 Mei 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Koreksi Beban atas Kelebihan pembayaran Outsourcing dan telah disetorkan ke kas negara pada 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	12.068.375	-
2	K	115212	Piutang Lainnya	-	12.068.375

Jurnal Balik atas Koreksi Beban atas Kelebihan pembayaran Outsourcing dan telah disetorkan ke kas negara pada 2024

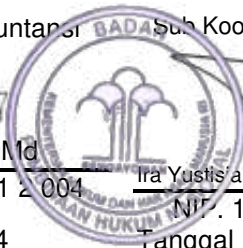
Dibuat oleh : Petugas Verifikasi/Akuntansi
 Disetujui oleh : Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Direkam oleh : Petugas Komputer

Rizky Awaliyah, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 06 Mei 2024



Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 06 Mei 2024

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 06 Mei 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
No. Dokumen : 010
Tanggal : 06 Mei 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Balik atas penyisihan piutang lainnya atas koreksi beban atas temuan pengembalian belanja barang yang tidak sesuai ketentuan

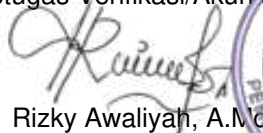
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang lainnya	60.342	-
2	K	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-piutang lainnya	-	60.342

Jurnal Balik atas penyisihan piutang lainnya atas koreksi beban atas temuan pengembalian belanja barang yang tidak sesuai ketentuan

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi


Rizky Awaliyah, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 06 Mei 2024

Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan


Ira Yustina Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 06 Mei 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer


Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 06 Mei 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 008
 Tanggal : 30 Juni 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	47.080.355	-
2	K	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	47.080.355

Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyah, A.M.

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 30 Juni 2024



Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustisa Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 008
 Tanggal : 06 Mei 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Penyisihan Piutang lainnya atas koreksi aset atas kelebihan pembayaran belanja modal yang tidak sesuai ketentuan

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	V	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	235.402	-
2	K	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	235.402

Jurnal Balik atas Penyisihan Piutang lainnya atas koreksi aset atas kelebihan pembayaran belanja modal yang tidak sesuai ketentuan

Dibuat oleh : Petugas Verifikasi/Akuntansi
 Disetujui oleh : Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Direkam oleh : Petugas Komputer

Rizky Awaliyah, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 06 Mei 2024



Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 06 Mei 2024

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 06 Mei 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 011
 Tanggal : 30 Juni 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	47.080.355	-
2	K	115212	Piutang Lainnya	-	47.080.355

Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 30 Juni 2024

Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan



Ira Yustisa Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer



Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 007
 Tanggal : 06 Mei 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	47.080.355	-
2	K	115212	Piutang Lainnya	-	47.080.355

Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyah, A.Md.

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 30 Juni 2024

Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustisi Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 013
 Tanggal : 30 Juni 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal balik untuk menghilangkan akun 425913 (yang telah diralat) ke piutang lainnya.

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

	Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
	Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
	Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
	Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
	Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
	Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
	Persediaan	26		
	Koreksi Antar Beban	27		
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	47.080.355	-
2	K	115212	Piutang Lainnya	-	47.080.355

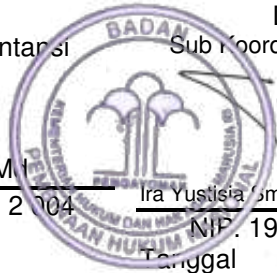
Jurnal balik untuk menghilangkan akun 425913 (yang telah diralat) ke piutang lainnya.

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyah, A.M.

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 30 Juni 2024



Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001


Tanggal : 30 Juni 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

	BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN TERINCI ATAS LKKL KEMENKUMHAM TA 2023	Halaman	:	1
		Satker	:	BPHN
		Direviu Oleh	:	

Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SDJI dan Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Kondisi

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 telah menganggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 untuk kegiatan belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan renovasi gedung dan bangunan seluas 1800 m² sebesar Rp3.348.248.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.744.897.000,00 atau 81,98% dari alokasi anggarannya.


Pekerjaan Konstruksi berupa renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan SDJI, dan ruang kerja pimpinan gedung induk di TA 2023 dilaksanakan oleh PT. Aisha Bangun Raya (PT. ABR) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor PHN.1-PB.02.01-1093 tanggal 18 September 2023 senilai Rp2.744.897.000,00 (termasuk PPN). Pelaksanaan pekerjaan renovasi Rumah Negara di Jalan Swadharma tersebut telah dinyatakan selesai sesuai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor PHN.1.PB.02.01-1348 1 Desember 2023. Adapun jangka waktu pelaksanaan kontrak pemeliharaan gedung adalah 75 hari kalender dan telah dibayar lunas sesuai SP2D terakhir nomor 231391303054394 tanggal 12 Desember 2024.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Surat Perjanjian Kontrak berikut laporan pelaksanaannya, Dokumen pembayaran, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), BAST, dan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan pihak penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjukkan bahwa masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp47.080.353,29 (rincian perhitungan pada *Lampiran*).

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya”;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - 1) Pasal 4 huruf a. yang menyatakan bahwa ”Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.”;
 - 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa ”Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel”;

	BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN TERINCI ATAS LKKL KEMENKUMHAM TA 2023	Halaman :	2
		Satker :	BPHN
		Direviu Oleh :	

- 3) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) huruf a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara"; dan
- c. Kontrak masing-masing pekerjaan, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dan dokumen lain yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak.

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp47.080.353, 29.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran pada BPHN kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- b. PPK BPHN tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan; dan
- c. PT. ABR tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam dokumen kontrak.

Tanggapan Instansi

(Terlampir)

Klarifikasi Hasil Pemeriksaan Fisik

Nama pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SDJI dan Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Pelaksana Pekerjaan : PT Aisha Bangun Raya
 Nomor kontrak : PHN.1-PB.02.01-1093
 Nilai Kontrak : Rp2.744.897.000,00
 Jangka Waktu Kontrak : 75 Hari kalender

No	Item Pekerjaan	Sat	Harga Satuan MC-100 (Rp)	Harga Satuan Terkoreksi (Rp)	Volume MC-100	Volume Terpasang	Nilai MC-100 (Rp)	Nilai Terpasang (Rp)	Lebih Bayar (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h = dxf	i = exg	j = h-i
SMKK									
1	Asuransi Kerja	Ls	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	1.00	-	7.500.000.00	-	Rp 7.500.000.00
SDJI									
Pekerjaan Bongkaran Eksisting									
1	Pek. Bongkaran Plafond	m2	Rp 40.480	Rp 40.480	531.94	528.51	21.532.931.20	21.394.084.80	Rp 138.846.40
Plafond									
1	Pek. Rangka Plafond Hollow 4/4	m2	Rp 233.030	Rp 229.070	537.17	485.04	125.176.725.10	111.108.112.80	Rp 14.068.612.30
2	Pek. Plafond Gypsum Board 9mm	m2	Rp 89.755	Rp 89.755	524.99	485.04	47.120.238.05	43.534.544.02	Rp 3.585.694.03
3	Pek. Pengecatan Plafond	m2	Rp 45.762	Rp 45.762	531.70	485.04	24.331.527.79	22.196.284.07	Rp 2.135.243.72
Pekerjaan Penutup Lantai									
1	Pekerjaan Screeding Lantai	m2	Rp 161.976	Rp 161.976	179.68	177.68	29.103.847.68	28.779.895.68	Rp 323.952.00
Pekerjaan Lain-Lain									
1	Pekerjaan Roller Blind	m2	Rp 670.106.25	Rp 670.106.25	38.93	28.61	26.087.236.31	19.171.739.81	Rp 6.915.496.50
Pekerjaan Dinding+Plesteran Ruang Pimpinan									
1	Dinding Gypsum Rangka Hollow	m2	Rp 246.036.78	Rp 246.036.78	15.55	13.48	3.825.871.93	3.316.575.79	Rp 509.296.13
ANNEX									
PEKERJAAN AREA RUANG IPT UTAMA DAN RUANG ARSIP									
Plafond									
1	Pek. Rangka Plafond Hollow 4/4	m2	Rp 233.030	Rp 229.070	107.10	106.31	24.957.513.00	24.352.431.70	Rp 605.081.30
2	Pek. Plafond Gypsum Board 9mm	m2	Rp 89.755	Rp 89.755	103.67	102.81	9.304.853.58	9.227.664.67	Rp 77.188.91
3	Pek. Pengecatan Plafond	m2	Rp 45.762	Rp 45.762	103.67	102.81	4.744.121.66	4.704.766.55	Rp 39.355.11
Pekerjaan Lain-Lain									
1	Pekerjaan Roller Blind	m2	Rp 670.106.25	Rp 670.106.25	20.00	18.50	13.402.125.00	12.396.965.63	Rp 1.005.159.38
PEKERJAAN RUANG IPT UTAMA									
Plafond									
1	Pek. Rangka Plafond Hollow 4/4	m2	Rp 233.030	Rp 229.070	67.84	41.72	15.808.755.20	9.556.800.40	Rp 6.251.954.80
2	Pek. Plafond Gypsum Board 9mm	m2	Rp 89.755	Rp 89.755	67.56	41.72	6.063.816.99	3.744.559.58	Rp 2.319.257.42
3	Pek. Pengecatan Plafond	m2	Rp 45.762	Rp 45.762	67.57	41.72	3.092.122.32	1.909.180.63	Rp 1.182.941.50
4	Pekerjaan Drop Ceiling	m	Rp 270.688	Rp 270.688	43.28	41.72	11.715.390.92	11.293.117.13	Rp 422.273.79
Total									Rp 47.080.353.28

Pembulatan Rp **47.080.355.00**

Jakarta, 22 April 2024

Pemeriksa,

 NIP.

PP

 NIP.

Pelaksana,

 PT. AISHA BANGUN RAYA

PT. AISHA BANGUN RAYA



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240502303698
Tanggal Billing : 02-05-2024 15:41:14
Tanggal Kedaluwarsa : 09-05-2024 15:41:14
Tanggal Bayar : 03-05-2024 11:07:40
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : PT. TOKOPEDIA
Channel Bayar : *Virtual Account*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara BPHN
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Total Disetor : 47.080.355 (IDR)
Terbilang : *Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **001693503525**
NTPN : **2A2DE6U8EUGJ5AUI**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 47.080.355 (IDR)
Keterangan : Pengembalian kelebihan bayar pekerjaan konstruksi renovasi lt.2 Gd annex, ruang kerja pimpinan Gd.SJDI dan ruang kerja pimpinan Gd. induk kantor BPHN



Selamat, Transaksi Penerimaan Negara Online Anda BERHASIL

1 pesan

Tokopedia <noreply@tokopedia.com>
Kepada: slowlyaditya@gmail.com

Jum, 3 Mei 2024 pukul 11.07

tokopedia

Penerimaan Negara

Bukti Penerimaan Negara - Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tanggal dan Jam Bayar	03/05/2024 11:07:40
Tanggal Buku	03/05/2024
Kode Cabang bank	020601
NTL	001693503525
NTPN	2A2DE6U8EUGJ5AUI
STAN	009272
Kode Billing	820240502303698
Nama Wajib Bayar	Bendahara BPHN
K/L	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409288
Jumlah	Rp47.080.355
Mata Uang	IDR
Terbilang	EMPAT PULUH TUJUH JUTA DELAPAN PULUH RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH
Nomor Invoice	IVR/20240503/XXIV/V/2054055895

This is a computer generated message and requires no signature. Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Bayar berbagai macam tagihan jadi mudah.
Manfaatkan fitur Langganan!



Pulsa





Paket Data



Listrik PLN



BPJS


TV Kabel
Voucher Game
Air PDAM
Pascabayar

Email ini dibuat secara otomatis. Mohon tidak mengirimkan balasan ke email ini.

Hati-hati terhadap pihak yang mengaku dari Tokopedia, membagikan voucher belanja, atau meminta data pribadi. Tokopedia tidak pernah meminta password dan data pribadi melalui email, pesan pribadi, maupun channel lainnya. Untuk semua email dengan link dari Tokopedia, pastikan alamat URL di browser sudah di alamat tokopedia.com bukan alamat lainnya. Jaga keamanan akun Anda, baca panduannya di [sini](#)

Download Aplikasi Tokopedia




Ikuti Kami



Jika butuh bantuan, gunakan halaman [Kontak Kami](#)

© 2009-2024, PT Tokopedia

Click [here](#) to unsubscribe

	BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN INTERIM ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Halaman	:	1
		Satker	:	BPHN
		Direviu Oleh	:	

Penyediaan Fasilitas Kendaraan Roda Empat dari BMN dan Sewa Tidak Sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan Standar Biaya Masukan (SBM)

Kondisi

Sesuai dengan SBSK, fasilitas kendaraan jabatan diberikan kepada pejabat setingkat menteri, wakil menteri, pejabat struktural eselon I dan eselon II. Untuk tingkat unit kerja setingkat eselon II dan III juga diberikan kendaraan operasional. Struktur organisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah sebagai berikut:

- a. Satu pejabat Eselon Ia;
- b. Lima pejabat Eselon II; dan
- c. Tiga pejabat Eselon III.

Hasil pemeriksaan atas penyediaan fasilitas kendaraan dinas jabatan dan operasional pada BPHN diketahui bahwa jumlah kendaraan BMN sebanyak 24 unit senilai Rp5.301.337.450,00 dan jumlah kendaraan sewa sebanyak 9 unit senilai Rp1.215.798.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

a. Kendaraan BMN tidak sesuai peruntukan

Meskipun jumlah BMN telah tersedia sebanyak 24 unit namun yang sesuai diperuntukkan hanya sebanyak 11 unit senilai Rp2.752.618.390,00, yaitu diperuntukkan bagi 2 kendaraan pejabat (Kepala BPHN dan satu Eselon II), serta 9 kendaraan operasional.


Sedangkan sisanya sebanyak 13 unit senilai Rp2.548.719.060,00 tidak sesuai peruntukan karena digunakan sebagai kendaraan operasional yang tidak sesuai SBSK.

b. Sewa Kendaraan Operasional melebihi Standar Biaya Masukan Tahun 2023 sebesar Rp78.228.000,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pembinaan Hukum Nasional TA 2023 menyajikan anggaran belanja barang sebesar Rp27.055.368.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.759.520.758,00 (98,91%). Realisasi tersebut salah satunya adalah untuk kegiatan belanja Pengadaan Sewa Kendaraan Pejabat Eselon I, Eselon II dan Operasional Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp1.059.798.000,00

Hasil pemeriksaan atas penyediaan fasilitas kendaraan dinas jabatan dan operasional diketahui bahwa jumlah kendaraan BMN sebanyak 24 unit senilai Rp5.301.337.450,00 dan jumlah kendaraan sewa sebanyak 9 unit senilai Rp1.215.798.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan terdapat penyediaan kendaraan melalui sewa secara kontraktual yang peruntukkan untuk kendaraan operasional yang sesuai dengan SBSK namun tarif sewanya melebihi tarif yang tercantum dalam SBM Tahun 2023 yaitu sebanyak 1 unit dengan sewa selama 12 bulan dengan harga sewa per bulan

	BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN INTERIM ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Halaman	:	2
		Satker	:	BPHN
		Direviu Oleh	:	

sebesar Rp13.209.000,00 (termasuk PPN), sedangkan menurut SBM sewa per bulan untuk kendaraan operasional sebesar Rp6.690.000,00, sehingga tarif sewa yang melebihi SBM sebesar Rp62.520.000,00 dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 1. Sewa Kendaraan Operasional Kantor Melebihi SBM

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Harga Sewa Per Bulan (Sebelum PPN)	11.900.000,00
2.	Jumlah Bulan	12 Bulan
3.	Jumlah yang dibayarkan (Sebelum PPN) (1 x 2)	142.800.000,00
4.	Harga Sewa Per Bulan Seharusnya (SBM 2023)	6.690.000,00
5.	Jumlah yang dibayarkan seharusnya (2 x 4)	80.280.000,00
	Total Selisih (3 – 5)	62.520.000,00

Kriteria

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan:

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada:
 - 1) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak;
 - 2) Pasal 53 Nomor (4) huruf b yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin;
 - 3) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara pada lampiran II yang menyatakan bahwa standar kendaraan jabatan maupun operasional pada satuan kerja Eselon I/ Kantor Pusat diberikan sesuai jumlah pejabat Eselon III dan Kendaraan Operasional dapat berasal dari Kendaraan Jabatan yang ditetapkan untuk dialihfungsikan, dengan

	BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN INTERIM ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Halaman	:	3
		Satker	:	BPHN
		Direviu Oleh	:	

ketentuan salah satunya Kendaraan Jabatan telah berumur 5 (lima) tahun sejak tanggal perolehan; dan

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 pada lampiran angka 37.3 yang menyatakan bahwa Biaya sewa kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan berupa minibus untuk wilayah DKI Jakarta sebesar Rp6.690.000,00 per bulan.

Akibat

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pembayaran sewa kendaraan yang melebihi SBM sebesar Rp62.520.000,00.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen satker terkait tidak mempedomani peraturan yang berlaku terkait penyediaan fasilitas kendaraan kepada pejabat dan pegawai Kemenkumham melalui sewa kendaraan.

Tanggapan Instansi

(Terlampir)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240515720404
Tanggal Billing : 15-05-2024 12:59:56
Tanggal Kedaluwarsa : 22-05-2024 12:59:56
Tanggal Bayar : 15-05-2024 14:28:40
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara BPHN
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Total Disetor : 62.520.000 (IDR)
Terbilang : *Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000727147**
NTPN : **7F3E561QV3UJHP6K**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 62.520.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian kelebihan pembayaran kendaraan operasional sewa TA 2023 pada kantor BPHN



Ditjen Anggaran Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	15/05/2024
Waktu Transaksi	14:28:40 WIB
Tanggal Buku	15/05/2024
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000727147
STAN	988268
Kode Billing	820240515720404
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA BPHN
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409288
Nominal Tagihan	62.520.000
Mata Uang	IDR
NTPN	7F3E561QV3UJHP6K
<hr/>	
Total Pembayaran	Rp62.520.000
Terbilang	enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	*****727

Selisih Nilai Pembayaran Biaya Tenaga Kerja/Upah dengan Nilai SP

Uraian Pembayaran	Satuan	Nilai	Jumlah	Total
Biaya Tenaga Kerja/Upah dalam SP				619.735.138,00
PPN 11%			9.863.700,00	
Manajemen fee			89.669.998,00	
Gaji/Upah per bulan			480.600.000,00	
Pakaian Kerja:				
- Seragam	2,00		-	
- Sepatu	1,00		-	
BPJS Perusahaan			27.533.065,00	607.666.763,00
Seilsih Lebih				12.068.375,00

	Detail Real Payroll		Bukti Transfer Gaji	Bukti Bayar BPJS	
	Rincian Gaji	Potongan BPJS	Potongan PPH21	BPJS KES	BPJS TK
Nov					
Des					
	-	-	-	-	-

Total Bayar BPJS	41.627.065,00
Dari Personil	14.094.000,00
Dari Perusahaan	27.533.065,00



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240327603945
Tanggal Billing : 27-03-2024 08:15:32
Tanggal Kedaluwarsa : 03-04-2024 08:15:32
Tanggal Bayar : 28-03-2024 14:44:48
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : *Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara BPHN
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Total Disetor : 12.068.375 (IDR)
Terbilang : *Dua Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **252600874623**
NTPN : **9D5EA55DF96JNTN9**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 12.068.375 (IDR)
Keterangan : Pengembalian kelebihan/selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan outsourcing Tahun 2023



Bayar

Pembayaran Berhasil

28 Mar 2024 - 15:44:48 WIB - No. Ref: 820240327603945

Periode: Jasa

Pajak/PNBP/Cukai

820240327603945

Detail Pembayaran

Nominal Pembayaran	Rp 12.068.375
Biaya Transaksi	Gratis
Total Transaksi	Rp 12.068.375

Rekening Sumber

CAROLINE NURANI CICI

Bank Mandiri -8083

Detail Tagihan

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak
NEGARA

Tanggal dan Jam Bayar 28/03/2024 14:44:48

Tanggal Buku 28/03/2024

Kode Cabang Bank 008

NTB 252600874623

NTPN  9D5EA55DF96JNTN9

STAN 874623

Kode Billing 820240327603945

Nama Wajib Bayar Bendahara BPHN

Kementerian / Lembaga 013

Unit Eselon I 10

Satuan Kerja 409288

Jumlah Setoran Rp. 12,068,375.00

Mata Uang IDR

dua belas juta enam puluh delapan ribu tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah

Informasi ini hasil cetak computer dan tidak
memerlukan tanda tangan

REKAPITULASI DATA REVISI BPHN SATKER
PERIODE S.D 30 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMOR DIPA	PAGU	REVISI KE	TANGGAL REVISI	JENIS REVISI		Nilai Revisi	KEWENANGAN				DOKUMEN PENDUKUNG	STATUS REVISI	KETERANGAN
							POK	DIPA		SATKER	ESELON I	KANWIL PERBEN	DJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
diisi nomor surat	diisi kode satker	diisi nama satker	diisi nomor DIPA satker	diisi pagu keseluruhan satker	diisi revisi yang dilakukan	diisi tanggal revisi	di ceklist	diceklist	diisi jumlah yang di revisi	di ceklist	diceklist	di ceklist	diceklist	diisi dokumen pendukung berupa surat atau nota dinas	diisi status revisi pada aplikasi OM SPAN	diisi maksud dan tujuan revisi
1	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	DIPA-013.10.1.409288/2023	Rp 42.121.767.000	1	30/01/2024		√	Rp 47.741.425.000				√	1. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-34/AG/AG.5/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Blokir <i>Automatic Adjustment</i> TA 2023 Kemenkumham 2. Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-17 Perihal Penyampaian Hasil Revisi Antar Program dan <i>Automatic Adjustment</i>	Posting	Revisi dalam rangka Blokir Automatic Adjustment , Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan pergeseran anggaran antar program sebesar Rp1.180.751.000
				Rp 42.121.767.000	2	16/02/2024		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-16 tanggal 19 Februari 2024 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi Bulan Februari	Posting	Update RPD Hal III DIPA Triwulan I TA 2024
				Rp 42.121.767.000	3	20/03/2024		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-20 tanggal 18 Maret 2024 Perihal penyampaian Usulan Revisi RKA-KL Kelompok Substansi Keuangan	Posting	Pemenuhan Anggaran Belanja PPPK Tahun 2024
				Rp 42.121.767.000	4	22/04/2024		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-31 tanggal 24 April 2024 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi Revisi Anggaran DIPA BPHN TA 2024	Posting	Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA Triwulan II TA 2024 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional
				Rp 42.121.767.000	5	21/05/2024		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-37 tanggal 22 Mei 2024 Perihal penyampaian RKAKL Revisi Anggaran kegiatan PJA TA 2024	Posting	Pemenuhan anggaran kegiatan prioritas Badan Pembinaan Hukum Nasional Paralegal Justice Award (PJA)
				Rp 42.121.767.000	6	28/06/2024		√	Rp 42.810.145.000				√	Surat Kepala Badan Pembinaan Nasional Nomor PHN-KU.01.02-03 perihal Penyampaian Data Dukung Revisi DIPA Anggaran Belanja Pegawai TA 2024	Posting	Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10, Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8091908, Faksimile : (021) 8002265
Laman : www.bphn.go.id Surel : humas@bphn.go.id

Nomor : PHN-PR.01.04-02 12 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian *Automatic Adjustment* Belanja TA 2024
Unit Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
di tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-PR.01.04-01 tertanggal 9 Januari 2024 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Data Rekapitulasi *Automatic Adjustment* Belanja TA 2023 Unit Eselon I Badan Pembinaan Hukum Nasional (terlampir);
2. Form Rekapitulasi *Automatic Adjustment* Belanja TA 2023 Menurut Program Unit Badan Pembinaan Hukum Nasional (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Widodo Ekatjahjana
NIP 197105011993031001

Tembusan:

1. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-34/AG/AG.5/2024

30 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM

- Yth. 1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat usulan revisi anggaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.KU.01.02-01 tanggal 24 Januari 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Automatic Adjustment BPHN TA 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini, Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi 9376-8136-0508-3025.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, KPA dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF *file* DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan dan Keamanan,
dan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Pudjiastuti Handayani

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM RI
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

NOTA DINAS

NOMOR : PHN.1-PR.01.04-17

Yth. : Pejabat Administrator dan Kelompok Substansi di Lingkungan Sekretariat BPHN.
Dari : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Hal : Penyampaian Hasil Revisi Antar Program dan *Automatic Adjustment* TA 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 31 Januari 2024

Sehubungan telah ditetapkannya pengesahan revisi anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional TA 2024 sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: S-34/AG/AG.5/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal sebagaimana tertuang dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan RKA-K/L hasil revisi anggaran dimaksud sebagai dasar pelaksanaan kegiatan (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
NIP. 197705092001122001

Tembusan:
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. May.jen. Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. (021) 8091908 Faximile : (021) 8002265-8011753
Website www.bphn.go.id.

Nomor : PHN.1-KU.01.02-14 15 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi DIPA dan RPD Triwulan I TA 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DKI Jakarta
di-

J a k a r t a

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-75/PB.2/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Ketentuan Batas Waktu Pemutakhiran RPD Hal III DIPA Triwulan I Tahun 2024 serta Pelaporan Target dan Capaian Output;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-013.10.1.409288/2024 tanggal 30 Januari 2024 DS: 9376-8136-0508-3025.

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tema revisi : Revisi administrasi.
- b. Mekanisme revisi :
 - Pencantuman / Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
 - Pergeseran anggaran antar KRO dalam 1 kegiatan dalam 1 satker

3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran :
 - a. Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA Triwulan I TA 2024 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
 - b. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien dilingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
4. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. DIPA Petikan sebelum Revisi;
 - c. Konsep DIPA sesudah Revisi;
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran Formil dan materil usulan revisi anggaran yang diajukan, dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NOTA DINAS
Nomor : PHN.1-KU.01.02-16

Yth : Pimpinan Tinggi Pratama
Dari : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Hal : Penyampaian Hasil Revisi Anggaran DIPA BPHN bulan Februari 2024
Lampiran : 1 (satu) set
Tanggal : 19 Februari 2024

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-1115/WPB.12/2024 tanggal 16 Februari 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini disampaikan RKAKL revisi anggaran DIPA bulan Februari Tahun 2024.

Bersama ini harapkan agar Saudara segera melaksanakan kegiatan yang telah direvisi dengan tetap berpedoman pada *disbursement plan* (RPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001

Tembusan :
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
DKI JAKARTA

JALAN OTTO ISKANDARDINATA NO. 53-55, DKI JAKARTA 13330; TELEPON (021) 8190410;
FAKSIMILI (021) 8195583; SUREL : kanwildjpb.jakarta@kemenkeu.go.id; LAMAN : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta

Nomor : S-1115/WPB.12/2024 16 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta V
2. KPA Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Sehubungan dengan surat Usulan Revisi Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Nomor PHN.1-KU.01.02-14 tanggal 15 Januari 2024 yang dokumennya diterima lengkap tanggal 16 Februari 2024, dengan ini disampaikan:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-KL DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbarui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini, Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi **0009-7857-7721-3370**.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam rangka menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkomitmen untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan dengan berprinsip pada nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Kami mohon dukungan dan partisipasi dalam rangka menjaga ZI-WBBM tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta



Ditandatangani secara elektronik
Mei Ling

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
3. Direktur Jenderal Anggaran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NOTA DINAS
Nomor: PHN.1-KU.01.02-20

Yth : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Dari : Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
Hal : Penyampaian Usulan Revisi RKA-KL Kelompok Substansi Keuangan
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 18 Maret 2024

Sehubungan dengan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan belum tersedianya anggaran untuk pembayaran gaji PPPK, dengan ini disampaikan usulan revisi anggaran guna memenuhi pembayaran gaji pada PPPK di Badan Pembinaan Hukum Nasional. (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tuyono

NIP 197006151997031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. May.jen. Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. (021) 8091908 Faximile : (021) 8002265-8011753
Website www.bphn.go.id.

Nomor : PHN.1-KU.01.02-21 19 Maret 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran DIPA

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DKI Jakarta
di-

J a k a r t a

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-013.10.1.409288/2024 tanggal 16 Februari 2024 DS:0009-7857-7721-3370.

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tema revisi : Revisi administrasi.
- b. Mekanisme revisi :
 - Pencantuman / Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
 - Pergeseran anggaran antar KRO dalam 1 kegiatan dalam 1 satker;
 - Pergeseran anggaran antar belanja pegawai untuk Gaji PPPK.

3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran :
 - a. Pemenuhan anggaran belanja PPPK Tahun 2024 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;
 - b. Percepatan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien dilingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
4. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. DIPA Petikan sebelum Revisi;
 - c. Konsep DIPA sesudah Revisi;
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran Formil dan materil usulan revisi anggaran yang diajukan, dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ortundatangi secara elektronik oleh

I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
DKI JAKARTA

JALAN OTTO ISKANDARDINATA NO. 53-55, DKI JAKARTA 13330; TELEPON (021) 8190410;
FAKSIMILI (021) 8195583; SUREL : kanwildjpb.jakarta@kemenkeu.go.id; LAMAN : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta

Nomor : S-2200/WPB.12/2024 20 Maret 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta V
2. KPA Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Sehubungan dengan surat Usulan Revisi Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Nomor PHN.1-KU.01.02-21 tanggal 19 Maret 2024 yang dokumennya diterima lengkap tanggal 20 Maret 2024, dengan ini disampaikan:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-KL DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbarui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini, Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi **2618-2068-3356-0582**.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam rangka menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkomitmen untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan dengan berprinsip pada nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Kami mohon dukungan dan partisipasi dalam rangka menjaga ZI-WBBM tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta



Ditandatangani secara elektronik
Mei Ling

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
3. Direktur Jenderal Anggaran





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
DKI JAKARTA

JALAN OTTO ISKANDARDINATA NO. 53-55, DKI JAKARTA 13330; TELEPON (021) 8190410;
FAKSIMILI (021) 8195583; SUREL : kanwildjpb.jakarta@kemenkeu.go.id; LAMAN : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta

Nomor : S-2867/WPB.12/2024 22 April 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288), Kementerian Hukum dan HAM

Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta V
2. KPA Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288)

Sehubungan dengan surat Usulan Revisi Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Nomor PHN.1-KU.01.02-28 tanggal 18 April 2024 yang dokumennya diterima lengkap tanggal 19 April 2024, dengan ini disampaikan:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-KL DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbarui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini, Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi **0140-0753-3289-2160**.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam rangka menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkomitmen untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan dengan berprinsip pada nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Kami mohon dukungan dan partisipasi dalam rangka menjaga ZI-WBBM tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta



Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Nizar

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM RI
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Direktur Jenderal Anggaran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NOTA DINAS
Nomor : PHN.1-KU.01.02-31

Yth : 1. Pejabat Administrator Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Pranata Humas Ahli Madya;
3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya.
Dari : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Hal : Penyampaian Hasil Revisi Anggaran dan Pemutakhiran RPD Triwulan II
TA 2024
Lampiran : 1 (satu) set
Tanggal : 24 April 2024

Sehubungan dengan telah terbitnya DIPA Petikan revisi ke-4 tanggal 22 April 2024 Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288), bersama ini disampaikan RKAKL hasil revisi anggaran dan pemutakhiran RPD Triwulan II Tahun 2024.

Bersama ini diharapkan agar Saudara segera melaksanakan kegiatan yang telah direvisi sesuai pada *disbursement plan* (RPD) Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan pemutakhiran data untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001

Tembusan :
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. May.jen. Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. (021) 8091908 Faximile : (021) 8002265-8011753
Website www.bphn.go.id.

Nomor : PHN.1-KU.01.02-28 18 April 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi DIPA dan RPD Triwulan II TA 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DKI Jakarta
di-

J a k a r t a

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-013.10.1.409288/2024 tanggal 20 Maret 2024 DS: 2618-2068-3356-0582.

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tema revisi : Revisi administrasi dan pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
- b. Mekanisme revisi :
 - Pencantuman / Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
 - Pergeseran anggaran antar KRO dalam 1 kegiatan dalam 1 satker

3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran :

- a. Pemutakhiran RPD Halaman III DIPA Triwulan II TA 2024 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional;

- b. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien dilingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
4. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. DIPA Petikan sebelum Revisi;
 - c. Konsep DIPA sesudah Revisi;
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran Formil dan materil usulan revisi anggaran yang diajukan, dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh:

I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. May.jen. Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. (021) 8091908 Faximile : (021) 8002265-8011753
Website www.bphn.go.id.

Nomor : PHN.1-KU.01.02-34 20 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi DIPA

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DKI Jakarta
di-

J a k a r t a

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-013.10.1.409288/2024 tanggal 19 April 2024 DS:0140-0753-3289-2160.

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tema revisi : Revisi administrasi dan pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap.
- b. Mekanisme revisi :
 - Pencantuman / Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
 - Pergeseran anggaran antar KRO dalam 1 kegiatan dalam 1 satker.

3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran :

- a. Pemenuhan anggaran kegiatan prioritas Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- b. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien.

4. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. DIPA Petikan sebelum Revisi;
 - c. Konsep DIPA sesudah Revisi;
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran Formil dan materil usulan revisi anggaran yang diajukan, dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh
I Gusti Putu Milawati
NIP. 197705092001122001

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
PER SATUAN KERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Badan Pembinaan Hukum Nasional

PROG/KEG/ OUTPUT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR
409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	42,121,767,000	960,765,000	42,121,767,000	960,765,000	0	0
013.10.BB Program Pembentukan Regulasi	3,622,164,000	0	3,622,164,000	0	0	0
1611 Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	1,633,219,000	0	1,633,219,000	0	0	0
1611.AAD Peraturan Presiden [PerPres, R.Perpres] [00]	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
Volume : 1.00 PerPres, R.Perpres			1.00 PerPres, R.Perpres		0.00 PerPres, R.Perpres	
52 BELANJA BARANG	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
A RM	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0
1611.AAG Peraturan Menteri [PerMen, Perka, RPermen] [00]	198,124,000	0	198,124,000	0	0	0
Volume : 1.00 PerMen, Perka,			1.00 PerMen, Perka,		0.00 PerMen, Perka,	
52 BELANJA BARANG	198,124,000	0	198,124,000	0	0	0
A RM	198,124,000	0	198,124,000	0	0	0
1611.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Rekomendasi Kebijakan, Kajian] [00]	935,095,000	0	935,095,000	0	0	0
Volume : 61.00 Rekomendasi Kebijakan,			61.00 Rekomendasi Kebijakan,		0.00 Rekomendasi	
52 BELANJA BARANG	935,095,000	0	935,095,000	0	0	0
A RM	935,095,000	0	935,095,000	0	0	0
1611.ADG Standarisasi Profesi dan SDM [Orang] [00]	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0
Volume : 400.00 Orang			400.00 Orang		0.00 Orang	
52 BELANJA BARANG	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0
A RM	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0
1613 Perencanaan Hukum Nasional	1,988,945,000	0	1,988,945,000	0	0	0
1613.ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Rekomendasi Kebijakan, Kajian] [00]	1,839,612,000	0	1,839,612,000	0	0	0
Volume : 13.00 Rekomendasi Kebijakan,			13.00 Rekomendasi Kebijakan,		0.00 Rekomendasi	
52 BELANJA BARANG	1,839,612,000	0	1,839,612,000	0	0	0
A RM	1,839,612,000	0	1,839,612,000	0	0	0
1613.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Lembaga, Unit Kerja, Tim] [00]	149,333,000	0	149,333,000	0	0	0
Volume : 10.00 Lembaga, Unit Kerja,			10.00 Lembaga, Unit Kerja,		0.00 Lembaga, Unit Kerja,	
52 BELANJA BARANG	149,333,000	0	149,333,000	0	0	0
A RM	149,333,000	0	149,333,000	0	0	0

Digital Stamp Sebelum : DS : 0140-0753-3289-2160

Digital Stamp Sesudah : DS : 4729-8306-1140-6938

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
PER SATUAN KERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Badan Pembinaan Hukum Nasional

PROG/KEG/ OUTPUT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR
013.10.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3,935,216,000	0	3,935,216,000	0	0	0
1610 Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1,293,206,000	0	1,293,206,000	0	0	0
1610.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Lembaga, Unit Kerja, Tim] [00]	1,098,120,000	0	1,098,120,000	0	0	0
Volume : 5.00 Lembaga, Unit Kerja,			5.00 Lembaga, Unit Kerja,		0.00 Lembaga, Unit Kerja,	
52 BELANJA BARANG	1,078,120,000	0	1,078,120,000	0	0	0
A RM	1,078,120,000	0	1,078,120,000	0	0	0
53 BELANJA MODAL	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
A RM	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0
1610.BMA Data dan Informasi Publik [layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi] [00]	195,086,000	0	195,086,000	0	0	0
Volume : 524,000.00 layanan, dokumen,			524,000.00 layanan, dokumen,		0.00 layanan, dokumen,	
52 BELANJA BARANG	195,086,000	0	195,086,000	0	0	0
A RM	195,086,000	0	195,086,000	0	0	0
1612 Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2,642,010,000	0	2,642,010,000	0	0	0
1612.ADE Akreditasi Lembaga [Lembaga, Unit Kerja] [00]	682,876,000	0	330,281,000	0	-352,595,000	0
Volume : 619.00 Lembaga, Unit Kerja			619.00 Lembaga, Unit Kerja		0.00 Lembaga, Unit Kerja	
52 BELANJA BARANG	682,876,000	0	330,281,000	0	-352,595,000	0
A RM	682,876,000	0	330,281,000	0	-352,595,000	0
1612.ADG Standarisasi Profesi dan SDM [Orang] [00]	409,672,000	0	338,923,000	0	-70,749,000	0
Volume : 450.00 Orang			450.00 Orang		0.00 Orang	
52 BELANJA BARANG	409,672,000	0	338,923,000	0	-70,749,000	0
A RM	409,672,000	0	338,923,000	0	-70,749,000	0
1612.BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat [Kelompok Masyarakat] [00]	536,271,000	0	401,409,000	0	-134,862,000	0
Volume : 155.00 Kelompok Masyarakat			155.00 Kelompok Masyarakat		0.00 Kelompok Masyarakat	
52 BELANJA BARANG	536,271,000	0	401,409,000	0	-134,862,000	0
A RM	536,271,000	0	401,409,000	0	-134,862,000	0
1612.BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan] [00]	1,013,191,000	0	1,571,397,000	0	558,206,000	0
Volume : 652.00 Lembaga, Laporan,			652.00 Lembaga, Laporan,		0.00 Lembaga, Laporan,	
52 BELANJA BARANG	1,013,191,000	0	1,571,397,000	0	558,206,000	0
A RM	1,013,191,000	0	1,571,397,000	0	558,206,000	0

Digital Stamp Sebelum : DS : 0140-0753-3289-2160

Digital Stamp Sesudah : DS : 4729-8306-1140-6938

**MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
PER SATUAN KERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Badan Pembinaan Hukum Nasional**

PROG/KEG/ OUTPUT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR
013.10.WA Program Dukungan Manajemen	34,564,387,000	960,765,000	34,564,387,000	960,765,000	0	0
1614 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	34,564,387,000	960,765,000	34,564,387,000	960,765,000	0	0
1614.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal [Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit] [00]	31,711,565,000	0	31,710,035,000	0	-1,530,000	0
Volume :	7.00 Layanan, Laporan,		7.00 Layanan, Laporan,		0.00 Layanan, Laporan,	
51 BELANJA PEGAWAI	17,404,653,000	0	17,404,653,000	0	0	0
A RM	17,404,653,000	0	17,404,653,000	0	0	0
52 BELANJA BARANG	14,306,912,000	0	14,305,382,000	0	-1,530,000	0
A RM	14,306,912,000	0	14,305,382,000	0	-1,530,000	0
1614.EBC Layanan Manajemen SDM Internal [Orang, Layanan, Rekomendasi] [00]	300,070,000	0	300,070,000	0	0	0
Volume :	239.00 Orang, Layanan,		239.00 Orang, Layanan,		0.00 Orang, Layanan,	
52 BELANJA BARANG	300,070,000	0	300,070,000	0	0	0
A RM	300,070,000	0	300,070,000	0	0	0
1614.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal [Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi] [00]	2,552,752,000	960,765,000	2,554,282,000	960,765,000	1,530,000	0
Volume :	5.00 Dokumen, Layanan,		5.00 Dokumen, Layanan,		0.00 Dokumen, Layanan,	
52 BELANJA BARANG	2,552,752,000	960,765,000	2,554,282,000	960,765,000	1,530,000	0
A RM	2,552,752,000	960,765,000	2,554,282,000	960,765,000	1,530,000	0

Digital Stamp Sebelum : DS : 0140-0753-3289-2160

Digital Stamp Sesudah : DS : 4729-8306-1140-6938

JAKARTA, 20 Mei 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I GUSTI PUTU MILAWATI
NIP 197705092001122001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
DKI JAKARTA

JALAN OTTO ISKANDARDINATA NO. 53-55, DKI JAKARTA 13330; TELEPON (021) 8190410;
FAKSIMILI (021) 8195583; SUREL : kanwildjpb.jakarta@kemenkeu.go.id; LAMAN : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jakarta

Nomor : S-3893/WPB.12/2024 21 Mei 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288), Kementerian Hukum dan HAM

Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta V
2. KPA Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288)

Sehubungan dengan surat Usulan Revisi Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Nomor PHN.1-KU.01.02-34 tanggal 20 Mei 2024 yang dokumennya diterima lengkap tanggal 21 Mei 2024, dengan ini disampaikan:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-KL DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbarui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini, Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi **4729-8306-1140-6938**.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam rangka menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkomitmen untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan dengan berprinsip pada nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Kami mohon dukungan dan partisipasi dalam rangka menjaga ZI-WBBM tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI
Jakarta



Ditandatangani secara elektronik
Mei Ling

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Direktur Jenderal Anggaran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NOTA DINAS
Nomor : PHN.1-KU.01.02-37

Yth : Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
Dari : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Hal : Penyampaian RKAKL Hasil Revisi Anggaran kegiatan PJA TA 2024
Lampiran : 1 (satu) set
Tanggal : 22 Mei 2024

Sehubungan dengan telah terbitnya pengesahan revisi anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-3893/WPB.12/2024 tanggal 21 Mei 2024, bersama ini disampaikan RKAKL hasil revisi anggaran untuk mendukung kegiatan *Paralegal Justice Award* (PJA) tahun 2024 beserta kegiatan lainnya pada Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.

Bersama ini diharapkan agar Saudara segera melaksanakan kegiatan yang telah direvisi untuk kelancaran proses pengadaan barang/jasa, pertanggungjawaban keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh
I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001

Tembusan :
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. (021) 8091908 Faximile : (021) 8002265-8011753
Website : www.bphn.go.id

Nomor : PHN-KU.01.02-05 05 Juni 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2024

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
di-
Jakarta

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 013.10.1.409288/2024 tanggal 24 November 2023 (DS:3577-7107-0394-2304);
- c. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 013.10.1.409288/2024 tanggal 21 Mei 2024 Revisi ke-5 (DS:4729-8306-1140-6938).

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tema revisi : - Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap;
- Revisi Administrasi.
- b. Mekanisme revisi : - Pergeseran Anggaran antar satuan kerja;
- Perubahan halaman III DIPA;

3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran :

- a. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS;
- b. Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023.

4. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran tersebut di atas, dilampirkan data dukung berupa :

- a. Matriks perubahan (semula-menjadi);
- b. Arsip data komputer RKA-K/L DIPA Revisi;
- c. DIPA Petikan sebelum revisi;
- d. Data dukung lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum HAM RI;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159
Laman: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK-KU.01.02-127 21 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
di Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. DIPA Induk Sekretariat Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. SP DIPA-013.01.1.404233/2022 tanggal 24 November 2023 kode *Digital Stamp* DS: 9080-7530-7407-6321;
- e. DIPA Sekretariat Jenderal (pusat) SP DIPA- 013.09.1.404233/2024 tanggal 13 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 8911-0115-4900-7703;
- f. DIPA Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-Undangan SP DIPA-013.09.1.626181/2024 tanggal 24 April 2024 kode *Digital Stamp* DS: 8911-0115-4900-7703
- g. DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional SP DIPA- 013.10.1.409288/2024 tanggal 21 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 4729-8306-1140-6938;
- h. DIPA Inspektorat Jenderal SP DIPA- 013.09.1.409241/2024 tanggal 30 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 7918-1622-0060-4587;
- i. DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM SP DIPA-013.12.1.108266/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0904-1667-4310-8488;
- j. DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual SP DIPA- 013.07.1.097102/2024 tanggal 07 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 4022-8008-6403-6075;
- k. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan SP DIPA-013.01.2.408847/2024 tanggal 20 April 2024 kode *Digital Stamp* DS: 6803-8585-0151-2300;
- l. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku SP DIPA-013.01.2.408892/2024 tanggal 28 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 2360-6277-7296-5110;
- m. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali SP DIPA-013.01.2.408870/2024 tanggal 30 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 7994-8071-7843-8497;
- n. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat SP DIPA-013.01.2.408798/2024 tanggal 30 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 6770-1557-9067-0998;

- o. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur SP DIPA-013.01.2.408855/2024 tanggal 30 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9760-1692-8983-6690;
- p. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara SP DIPA-013.01.2.409201/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 3509-3020-4250-4705;
- q. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten SP DIPA-013.01.2.648999/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0008-6380-6829-2750;
- r. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta SP DIPA-013.01.2.408720/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 3564-9230-8464-0147;
- s. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepulauan Bangka Belitung SP DIPA-013.01.2.649001/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0518-1221-3470-6308;
- t. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu SP DIPA-013.01.2.409175/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 5929-0164-4954-4067;
- u. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau SP DIPA-013.01.2.667786/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9229-3215-5048-4187;
- v. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat SP DIPA-013.01.2.667786/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9229-3215-5048-4187;
- w. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara SP DIPA-013.01.2.649022/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0520-9264-4034-6508;
- x. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara SP DIPA-013.01.2.409201/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0648-4051-2007-0398;
- y. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi SP DIPA-013.01.409169/2024 tanggal 02 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 7072-3587-0485-5790;
- z. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta SP DIPA-013.01.409181/2024 tanggal 03 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 6910-6722-3158-6169;
- aa. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung SP DIPA-013.01.408824/2024 tanggal 03 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 5658-4058-7036-7419;
- bb. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau SP DIPA-013.01.408802/2024 tanggal 03 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9112-9440-0550-2903;
- cc. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah SP DIPA-013.01.409210/2024 tanggal 03 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 3907-6942-2094-3337;
- dd. DIPA Pusat Data dan Teknologi Informasi SP DIPA-013.01.1.532413/2024 tanggal 04 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 1206-1309-7839-9006;
- ee. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat SP DIPA-013.01.2.408736/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 6992-4064-5585-5263;
- ff. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur SP DIPA-013.01.2.408751/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 2808-3489-6596-4086;
- gg. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah SP DIPA-013.01.2.408742/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 4720-3103-9305-6502;
- hh. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh SP DIPA-013.01.2408782/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 4883-9120-3354-0749;
- ii. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua SP DIPA-013.01.408906/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9010-5109-0678-3801;
- jj. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat SP DIPA-013.01.667790/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0495-2943-4000-5034;
- kk. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat SP DIPA-013.01.409226/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 8626-2688-1317-5906;
- ll. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo SP DIPA-013.01.4649018/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 7766-9730-1526-9590;

- mm. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara SP DIPA-013.01.408767/2024 tanggal 06 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 3015-7996-0647-3579;
- nn. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah SP DIPA-013.01.409190/2024 tanggal 06 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9890-7790-0153-0405;
- oo. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan SP DIPA-013.01.408773/2024 tanggal 06 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 4528-0984-0273-7455;
- pp. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur SP DIPA-013.01.408886/2024 tanggal 06 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 1082-3500-5305-8000;
- qq. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan SP DIPA-013.01.408818/2024 tanggal 07 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0099-6156-7011-8684;
- rr. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat SP DIPA-013.01.667772/2024 tanggal 07 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS 9739-1852-8601-0903;
- ss. DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah SP DIPA-013.12.2.409157/2024 tanggal 28 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS 7840-0376-6707-1457;
- tt. DIPA Politeknik Imigrasi SP DIPA- 013.12.2.108287/2024 tanggal 29 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS 3964-0016-0778-2368;
- uu. DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara SP DIPA-013.12.2.409159/2024 tanggal 30 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS 8799-1361-4458-2009;
- vv. DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau SP DIPA-013.12.2.409155/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS 5833-8469-0253-9786;
- ww. DIPA Politeknik Ilmu Pemasaryakatan SP DIPA- 013.12.2.404309/2024 tanggal 4 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS 9661-4856-6309-2047.

- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tema revisi:
 - 1) Perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - 2) Revisi Administrasi:
 - Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA;
 - Pencantuman Catatan pada Halaman IV B DIPA;
 - Penghapusan Catatan pada Halaman IV B DIPA.
 - b. Tata cara revisi berupa pergeseran anggaran antar Satuan Kerja, antar Unit Eselon I dalam 1 (satu) program anggaran pada 45 satuan kerja dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 dan antar Satuan Kerja dalam 1 (satu) program anggaran dalam rangka pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024.
 - c. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:
 - 1) Pergeseran anggaran dari Sekretariat Jenderal ke 44 Satuan Kerja dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024;
 - 2) Pergeseran anggaran antar Satuan Kerja yang dilakukan Sekretariat Jenderal dalam rangka Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal berupa Rehabilitasi Rumah Dinas yang diperuntukan untuk Rumah Singgah Menteri pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
 - 3) Pergeseran anggaran yang dilakukan menyebabkan penambahan Rincian *Output* (RO) dan penambahan volume Rincian *Output* (RO) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;

- 4) Penghapusan catatan Hutang Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2019 pada Halaman IV B DIPA Petikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau karena adanya kesalahan input pada awal DIPA. Hutang Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2019 telah diselesaikan di Tahun 2022.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, usulan Revisi Anggaran di atas dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. Arsip Data Komputer RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. Surat Persetujuan Eselon I;
 - d. Surat Pernyataan Eselon I;
 - e. Surat Pemberitahuan Perubahan RKA;
 - f. Surat Hasil Reviu (SHR); dan
 - g. Data Dukung terkait.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,


Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159
Laman: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK-KU.01.02-128
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Revisi Anggaran

21 Juni 2024

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-KU.01.02-05 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024;
- e. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor SDM-PR.01.04-115 tanggal 6 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- f. Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.1-KU.01.02-25 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai;
- g. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.1.UM.01.01 -238 tanggal 7 Juni 2024 hal Penyampaian Permohonan dan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran;
- h. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-PR.01.04-69 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- i. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Nomor W20.KU.02.01-6029 tanggal 4 Juni 2024 hal Usulan Revisi Pemenuhan Anggaran Belanja Pegawai TA 2024;
- j. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Nomor W27.PR.01.04-67 tanggal 4 Juni 2024 hal Usul Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Belanja Pegawai T.A 2024;
- k. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor W.33-KU.01.01-82 tanggal 5 Juni 2024 hal Revisi ABT Belanja Pegawai Kantor Wilayah;
- l. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Nomor W.24-KU.01.02-3040 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi DIPA Kanwil Kemenkumham Palu/Setjen (409210);
- m. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Nomor W14.KU.01.02-6836 tanggal 5 Juni 2024 hal Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran;

- n. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12-KU.01.01 - 243 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- o. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor W.10-KU.01.02 - 639 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Belanja Pegawai TA 2024;
- p. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor W.11-KU.01.02-6538 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- q. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor W.7.KU.01.01-4325 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- r. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Nomor W.32.KU.03.01-4649 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- a. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Nomor W.9-KU.01.02-4095 tanggal 5 Juni 2024 hal Usul Revisi Anggaran Belanja Pegawai Tambahan TA 2024 Satker 408824;
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor W.2-KU.01.02-20169 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- c. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Nomor W4.KU.01.02-5908 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- d. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Nomor W3.KU.01.02-100 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Pemenuhan Belanja Pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- e. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Nomor W16.KU.01.02-4883 tanggal 6 Juni 2024 hal Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran TA 2024 pada Kantor Wilayah;
- f. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Nomor W30.KU.05.01-237 tanggal 5 Juni 2024 hal Revisi Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT);
- g. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Nomor W29.KU.01.02-2874 tanggal 5 Juni 2024 hal Permohonan Pengajuan Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai TA. 2024;
- h. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Nomor W.28-PR.01.04-2336 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku (408892) Tahun 2024;
- i. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Nomor W.25-KU.01.02-3561 tanggal 06 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- j. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Nomor W.31.KU.01.02-318 tanggal 6 Juni 2024 hal Usulan ABT Belanja Pegawai;
- k. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor W.8-KU.01.02-594 tanggal 6 Juni 2024 hal Usul Revisi Anggaran;
- l. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Nomor W.5-PR.01.04-70 tanggal 6 Juni 2024 hal Usulan ABT Pegawai Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi TA. 2024 (409169);
- m. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Nomor W.18-KU.01.02-4461 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai TA 2024 DIPA Setjend (408855) Kantor Wilayah Kalimantan Timur;
- n. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Nomor W1.KU.01.02-2218 tanggal 7 Juni 2024 hal Usul Revisi Anggaran Kanwil Aceh (408782);
- o. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor W15.KU.01.02-371 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;

- p. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor W13.KU.01.04-747 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran, Pemenuhan Data Dukung Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai TA 2024;
- q. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Nomor W.6.KU.01.01-0161 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- r. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Nomor W.19-KU.01.02-3368 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- s. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Nomor W.17-KU.01.02-489 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2024 Kantor Wilayah Kalimantan Tengah;
- t. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Nomor W.6.KU.01.01-0161 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- u. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor W.23-KU.01.02-391 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
- v. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Nomor W.21-KU.01.02 –2236 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka Revisi DIPA Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2024;
- w. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Nomor W.22-KU.01.02-5760 tanggal 7 Juni 2024 hal Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran;
- x. Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor SEK.7-PR.01.04-44 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- y. Surat Direktur Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Nomor SDM.5.PR.01.04 –2942 tanggal 5 Juni 2024 Penyampaian Usulan Permintaan Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Tahun Anggaran 2024;
- z. Surat Direktur Politeknik Imigrasi Nomor SDM.6.PR.01.04 –2347 tanggal 05 Juni 2024 hal Permohonan Tambahan Pagu Belanja Pegawai Politeknik Imigrasi TA. 2024;
- aa. Surat Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Nomor W.25.SDM.SDM.1.PR.01.04-669 tanggal 5 Juni 2024 Usulan Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai;
- bb. Surat Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau Nomor W32.SDM.7.KU.01.02-724 tanggal 5 Juni 2024 Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2024;
- cc. Surat Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor W.13.SDM.1.PR.01.04- 25 tanggal 5 Juni 2024 Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkup : 1. Perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
2. Revisi Administrasi.
- b. Program : Dukungan Manajemen;
- c. Satker : Sekretariat Jenderal (404233)
 - Kegiatan : (1557) Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM
 - Satker : Badan Pembinaan Hukum Nasional (108266)
 - Kegiatan : (1614) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN

Satker : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (108266)
- Kegiatan : (1624) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Satker : Inspektorat Jenderal (409241)
- Kegiatan : (1569) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (626181)
- Kegiatan : (6233) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP

Satker : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (097102)
- Kegiatan : (6237) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali (408870)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (409201)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (667790)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (409210)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (409181)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten (648999)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (408720)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (408736)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (649001)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (667786)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung (408824)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (408830)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau (408802)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (408798)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat (408830)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua (408906)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (649022)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku (408892)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (408861)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (667772)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (409175)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi (409169)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur (408855)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh (408782)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (408751)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (408742)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (408818)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (408849)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (409190)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo (649018)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (408773)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (409226)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (408886)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Pusat Data dan Teknologi Informasi (532413)
- Kegiatan (5849) Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Politeknik Ilmu Pemasarakatan (404309)
- Kegiatan (1620) Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
- Satker : Politeknik Imigrasi (108287)
- Kegiatan (1620) Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
- Satker : Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau (409155)
- Kegiatan (5249) Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah
- Satker : Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah (409157)
- Kegiatan (5249) Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah
- Satker : Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara (409159)
- Kegiatan (5249) Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah

- d. Pergeseran anggaran antar satuan kerja antar unit eselon I dalam 1 (satu) program menyebabkan pengurangan pagu anggaran Sekretariat Jenderal (Pusat) pada 1557.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp73.998.194.000,- (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dalam rangka Pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan rincian sebagai berikut:

No	KODE SATKER	SATKER	PERUBAHAN
1	108266	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	688,378,000
2	108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	935,587,000
3	409241	INSPEKTORAT JENDERAL	439,758,000
4	097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	21,926,519,000
5	626181	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1,740,588,000
6	408870	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI	1,878,112,000
7	409201	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA	1,550,076,000

8	667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	822,242,000
9	409210	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH	1,357,271,000
10	409181	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI YOGYAKARTA	2,113,448,000
11	648999	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	1,656,372,000
12	408720	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	3,399,726,000
13	408736	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT	2,049,543,000
14	649001	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	610,068,000
15	667786	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	1,273,910,000
16	408824	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	1,361,856,000
17	408767	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	2,206,000,000
18	408802	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU	1,608,939,000
19	408798	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT	1,242,543,000
20	408830	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT	1,006,601,000
21	408906	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	487,074,000
22	649022	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	593,875,000
23	408892	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU	1,074,053,000
24	408861	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	1,745,683,000
25	667772	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	543,695,000
26	409175	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	1,129,465,000
27	409169	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	534,442,000
28	408855	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR	1,005,061,000
29	408782	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH	1,903,754,000
30	408751	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	843,963,000
31	408742	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	2,388,442,000
32	408818	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	2,224,007,000
33	408849	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN	232,988,000

34	409190	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH	1,047,845,000
35	649018	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO	308,949,000
36	408773	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN	2,919,843,000
37	409226	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT	1,795,064,000
38	408886	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR	1,009,303,000
39	532413	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	150,000,000
40	404309	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	964,120,000
41	108287	POLITEKNIK IMIGRASI	714,870,000
42	409159	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	48,502,000
43	409155	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	212,615,000
44	409157	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	253,044,000
TOTAL			73,998,194,000

- e. Pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) program menyebabkan pengurangan pagu anggaran Sekretariat Jenderal (Pusat) pada 1553.EBC.954.055 Administrasi dan Koordinasi Biro Kepegawaian sebesar Rp3.563.859.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dalam rangka Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, dengan rincian sebagai berikut:

No	KODE SATKER	SATKER	PERUBAHAN
1	404233	1553.EBC.954.055.G Dana Mutasi dan Pensiun Pegawai	(3.563.859.000),-
2	408855	1558. EBB.951. Layanan Sarana Internal	1.740.771.000,-
		1558. EBB.971. Layanan Prasarana Internal	1.823.088.000,-
TOTAL			0,-

- f. Revisi Administrasi berupa:

- 1) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA pada seluruh Satuan Kerja;
- 2) Pencantuman Catatan pada Halaman IVB DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
- 3) Penghapusan Catatan pada Halaman IVB DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini dinyatakan bahwa pergeseran anggaran antar Satuan Kerja dan antar Unit Eselon I dalam 1 (satu) program anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM T.A. 2024, antar satuan kerja dalam 1 (satu) program anggaran dalam rangka Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Revisi Administrasi tersebut **dapat disetujui**.

Demikian untuk menjadi periksa.



Sekretaris Jenderal,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above the name of the signatory.

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jalan May Jen Sutoyo No.10 - Cililitan Jakarta Timur 13640

Telp (021) 8091908-Faksimili (021) 8002265-8011752-55.

Website www.bphn.go.id

SURAT PERNYATAAN

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NOMOR: PHN-KU.01.02-04

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP : 197105011993031001

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui substansi usulan revisi anggaran yang diusulkan berupa pergeseran atau perubahan anggaran dalam hal Pagu Tetap dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024;
2. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024 tidak menyebabkan pagu minus belanja pegawai pada Badan Pembinaan Hukum Nasional sampai dengan akhir tahun;
3. Usul revisi anggaran beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar;
4. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.



Jakarta, 05 Juni 2024

Kepala Badan,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159
Laman: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK-KU.01.02-127 21 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
di Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. DIPA Induk Sekretariat Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. SP DIPA-013.01.1.404233/2022 tanggal 24 November 2023 kode *Digital Stamp* DS: 9080-7530-7407-6321;
- e. DIPA Sekretariat Jenderal (pusat) SP DIPA- 013.09.1.404233/2024 tanggal 13 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 8911-0115-4900-7703;
- f. DIPA Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-Undangan SP DIPA-013.09.1.626181/2024 tanggal 24 April 2024 kode *Digital Stamp* DS: 8911-0115-4900-7703
- g. DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional SP DIPA- 013.10.1.409288/2024 tanggal 21 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 4729-8306-1140-6938;
- h. DIPA Inspektorat Jenderal SP DIPA- 013.09.1.409241/2024 tanggal 30 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 7918-1622-0060-4587;
- i. DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM SP DIPA-013.12.1.108266/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0904-1667-4310-8488;
- j. DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual SP DIPA- 013.07.1.097102/2024 tanggal 07 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 4022-8008-6403-6075;
- k. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan SP DIPA-013.01.2.408847/2024 tanggal 20 April 2024 kode *Digital Stamp* DS: 6803-8585-0151-2300;
- l. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku SP DIPA-013.01.2.408892/2024 tanggal 28 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 2360-6277-7296-5110;
- m. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali SP DIPA-013.01.2.408870/2024 tanggal 30 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 7994-8071-7843-8497;
- n. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat SP DIPA-013.01.2.408798/2024 tanggal 30 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 6770-1557-9067-0998;

- o. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur SP DIPA-013.01.2.408855/2024 tanggal 30 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9760-1692-8983-6690;
- p. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara SP DIPA-013.01.2.409201/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 3509-3020-4250-4705;
- q. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten SP DIPA-013.01.2.648999/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0008-6380-6829-2750;
- r. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta SP DIPA-013.01.2.408720/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 3564-9230-8464-0147;
- s. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepulauan Bangka Belitung SP DIPA-013.01.2.649001/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0518-1221-3470-6308;
- t. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu SP DIPA-013.01.2.409175/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 5929-0164-4954-4067;
- u. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau SP DIPA-013.01.2.667786/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9229-3215-5048-4187;
- v. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat SP DIPA-013.01.2.667786/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9229-3215-5048-4187;
- w. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara SP DIPA-013.01.2.649022/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0520-9264-4034-6508;
- x. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara SP DIPA-013.01.2.409201/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0648-4051-2007-0398;
- y. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi SP DIPA-013.01.409169/2024 tanggal 02 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 7072-3587-0485-5790;
- z. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta SP DIPA-013.01.409181/2024 tanggal 03 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 6910-6722-3158-6169;
- aa. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung SP DIPA-013.01.408824/2024 tanggal 03 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 5658-4058-7036-7419;
- bb. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau SP DIPA-013.01.408802/2024 tanggal 03 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9112-9440-0550-2903;
- cc. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah SP DIPA-013.01.409210/2024 tanggal 03 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 3907-6942-2094-3337;
- dd. DIPA Pusat Data dan Teknologi Informasi SP DIPA-013.01.1.532413/2024 tanggal 04 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 1206-1309-7839-9006;
- ee. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat SP DIPA-013.01.2.408736/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 6992-4064-5585-5263;
- ff. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur SP DIPA-013.01.2.408751/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 2808-3489-6596-4086;
- gg. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah SP DIPA-013.01.2.408742/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 4720-3103-9305-6502;
- hh. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh SP DIPA-013.01.2408782/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 4883-9120-3354-0749;
- ii. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua SP DIPA-013.01.408906/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9010-5109-0678-3801;
- jj. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat SP DIPA-013.01.667790/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0495-2943-4000-5034;
- kk. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat SP DIPA-013.01.409226/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 8626-2688-1317-5906;
- ll. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo SP DIPA-013.01.4649018/2024 tanggal 05 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 7766-9730-1526-9590;

- mm. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara SP DIPA-013.01.408767/2024 tanggal 06 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 3015-7996-0647-3579;
- nn. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah SP DIPA-013.01.409190/2024 tanggal 06 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 9890-7790-0153-0405;
- oo. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan SP DIPA-013.01.408773/2024 tanggal 06 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 4528-0984-0273-7455;
- pp. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur SP DIPA-013.01.408886/2024 tanggal 06 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 1082-3500-5305-8000;
- qq. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan SP DIPA-013.01.408818/2024 tanggal 07 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS: 0099-6156-7011-8684;
- rr. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat SP DIPA-013.01.667772/2024 tanggal 07 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS 9739-1852-8601-0903;
- ss. DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah SP DIPA-013.12.2.409157/2024 tanggal 28 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS 7840-0376-6707-1457;
- tt. DIPA Politeknik Imigrasi SP DIPA- 013.12.2.108287/2024 tanggal 29 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS 3964-0016-0778-2368;
- uu. DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara SP DIPA-013.12.2.409159/2024 tanggal 30 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS 8799-1361-4458-2009;
- vv. DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau SP DIPA-013.12.2.409155/2024 tanggal 31 Mei 2024 kode *Digital Stamp* DS 5833-8469-0253-9786;
- ww. DIPA Politeknik Ilmu Pemasaryakatan SP DIPA- 013.12.2.404309/2024 tanggal 4 Juni 2024 kode *Digital Stamp* DS 9661-4856-6309-2047.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tema revisi:
 - 1) Perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - 2) Revisi Administrasi:
 - Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA;
 - Pencantuman Catatan pada Halaman IV B DIPA;
 - Penghapusan Catatan pada Halaman IV B DIPA.
 - b. Tata cara revisi berupa pergeseran anggaran antar Satuan Kerja, antar Unit Eselon I dalam 1 (satu) program anggaran pada 45 satuan kerja dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 dan antar Satuan Kerja dalam 1 (satu) program anggaran dalam rangka pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024.
 - c. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:
 - 1) Pergeseran anggaran dari Sekretariat Jenderal ke 44 Satuan Kerja dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024;
 - 2) Pergeseran anggaran antar Satuan Kerja yang dilakukan Sekretariat Jenderal dalam rangka Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal berupa Rehabilitasi Rumah Dinas yang diperuntukan untuk Rumah Singgah Menteri pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
 - 3) Pergeseran anggaran yang dilakukan menyebabkan penambahan Rincian *Output* (RO) dan penambahan volume Rincian *Output* (RO) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;

- 4) Penghapusan catatan Hutang Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2019 pada Halaman IV B DIPA Petikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau karena adanya kesalahan input pada awal DIPA. Hutang Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2019 telah diselesaikan di Tahun 2022.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, usulan Revisi Anggaran di atas dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. Arsip Data Komputer RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. Surat Persetujuan Eselon I;
 - d. Surat Pernyataan Eselon I;
 - e. Surat Pemberitahuan Perubahan RKA;
 - f. Surat Hasil Reviu (SHR); dan
 - g. Data Dukung terkait.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,


Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159
Laman: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK-KU.01.02-128
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Revisi Anggaran

21 Juni 2024

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-KU.01.02-05 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024;
- e. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor SDM-PR.01.04-115 tanggal 6 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- f. Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.1-KU.01.02-25 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai;
- g. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.1.UM.01.01 -238 tanggal 7 Juni 2024 hal Penyampaian Permohonan dan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran;
- h. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-PR.01.04-69 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- i. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Nomor W20.KU.02.01-6029 tanggal 4 Juni 2024 hal Usulan Revisi Pemenuhan Anggaran Belanja Pegawai TA 2024;
- j. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Nomor W27.PR.01.04-67 tanggal 4 Juni 2024 hal Usul Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Belanja Pegawai T.A 2024;
- k. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor W.33-KU.01.01-82 tanggal 5 Juni 2024 hal Revisi ABT Belanja Pegawai Kantor Wilayah;
- l. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Nomor W.24-KU.01.02-3040 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi DIPA Kanwil Kemenkumham Palu/Setjen (409210);
- m. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Nomor W14.KU.01.02-6836 tanggal 5 Juni 2024 hal Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran;

- n. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12-KU.01.01 - 243 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- o. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Nomor W.10-KU.01.02 - 639 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Belanja Pegawai TA 2024;
- p. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor W.11-KU.01.02-6538 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- q. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor W.7.KU.01.01-4325 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- r. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Nomor W.32.KU.03.01-4649 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- a. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Nomor W.9-KU.01.02-4095 tanggal 5 Juni 2024 hal Usul Revisi Anggaran Belanja Pegawai Tambahan TA 2024 Satker 408824;
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor W.2-KU.01.02-20169 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- c. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Nomor W4.KU.01.02-5908 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- d. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Nomor W3.KU.01.02-100 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Pemenuhan Belanja Pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- e. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Nomor W16.KU.01.02-4883 tanggal 6 Juni 2024 hal Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran TA 2024 pada Kantor Wilayah;
- f. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Nomor W30.KU.05.01-237 tanggal 5 Juni 2024 hal Revisi Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT);
- g. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Nomor W29.KU.01.02-2874 tanggal 5 Juni 2024 hal Permohonan Pengajuan Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai TA. 2024;
- h. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Nomor W.28-PR.01.04-2336 tanggal 5 Juni 2024 hal Usulan Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku (408892) Tahun 2024;
- i. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Nomor W.25-KU.01.02-3561 tanggal 06 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- j. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Nomor W.31.KU.01.02-318 tanggal 6 Juni 2024 hal Usulan ABT Belanja Pegawai;
- k. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor W.8-KU.01.02-594 tanggal 6 Juni 2024 hal Usul Revisi Anggaran;
- l. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi Nomor W.5-PR.01.04-70 tanggal 6 Juni 2024 hal Usulan ABT Pegawai Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi TA. 2024 (409169);
- m. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Nomor W.18-KU.01.02-4461 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai TA 2024 DIPA Setjend (408855) Kantor Wilayah Kalimantan Timur;
- n. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Nomor W1.KU.01.02-2218 tanggal 7 Juni 2024 hal Usul Revisi Anggaran Kanwil Aceh (408782);
- o. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor W15.KU.01.02-371 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;

- p. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor W13.KU.01.04-747 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran, Pemenuhan Data Dukung Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai TA 2024;
- q. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Nomor W.6.KU.01.01-0161 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- r. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Nomor W.19-KU.01.02-3368 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- s. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Nomor W.17-KU.01.02-489 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2024 Kantor Wilayah Kalimantan Tengah;
- t. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Nomor W.6.KU.01.01-0161 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- u. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Nomor W.23-KU.01.02-391 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
- v. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Nomor W.21-KU.01.02 –2236 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka Revisi DIPA Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2024;
- w. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Nomor W.22-KU.01.02-5760 tanggal 7 Juni 2024 hal Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran;
- x. Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor SEK.7-PR.01.04-44 tanggal 7 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran;
- y. Surat Direktur Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Nomor SDM.5.PR.01.04 –2942 tanggal 5 Juni 2024 Penyampaian Usulan Permintaan Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Tahun Anggaran 2024;
- z. Surat Direktur Politeknik Imigrasi Nomor SDM.6.PR.01.04 –2347 tanggal 05 Juni 2024 hal Permohonan Tambahan Pagu Belanja Pegawai Politeknik Imigrasi TA. 2024;
- aa. Surat Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara Nomor W.25.SDM.SDM.1.PR.01.04-669 tanggal 5 Juni 2024 Usulan Revisi Penambahan Anggaran Belanja Pegawai;
- bb. Surat Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau Nomor W32.SDM.7.KU.01.02-724 tanggal 5 Juni 2024 Revisi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2024;
- cc. Surat Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor W.13.SDM.1.PR.01.04- 25 tanggal 5 Juni 2024 Pemenuhan Data Dukung Revisi Penambahan Anggaran.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

- a. Lingkup : 1. Perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
2. Revisi Administrasi.
- b. Program : Dukungan Manajemen;
- c. Satker : Sekretariat Jenderal (404233)
 - Kegiatan : (1557) Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM
 - Satker : Badan Pembinaan Hukum Nasional (108266)
 - Kegiatan : (1614) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN

Satker : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (108266)
- Kegiatan : (1624) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Satker : Inspektorat Jenderal (409241)
- Kegiatan : (1569) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (626181)
- Kegiatan : (6233) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP

Satker : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (097102)
- Kegiatan : (6237) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali (408870)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (409201)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat (667790)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (409210)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (409181)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten (648999)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (408720)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (408736)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (649001)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (667786)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung (408824)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (408830)
- Kegiatan : (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau (408802)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (408798)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat (408830)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua (408906)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (649022)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku (408892)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (408861)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (667772)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu (409175)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi (409169)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur (408855)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh (408782)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur (408751)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (408742)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (408818)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (408849)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (409190)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo (649018)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (408773)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (409226)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (408886)
- Kegiatan (1558) Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Pusat Data dan Teknologi Informasi (532413)
- Kegiatan (5849) Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM
- Satker : Politeknik Ilmu Pemasarakatan (404309)
- Kegiatan (1620) Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
- Satker : Politeknik Imigrasi (108287)
- Kegiatan (1620) Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan
- Satker : Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau (409155)
- Kegiatan (5249) Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah
- Satker : Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah (409157)
- Kegiatan (5249) Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah
- Satker : Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara (409159)
- Kegiatan (5249) Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah

- d. Pergeseran anggaran antar satuan kerja antar unit eselon I dalam 1 (satu) program menyebabkan pengurangan pagu anggaran Sekretariat Jenderal (Pusat) pada 1557.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp73.998.194.000,- (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dalam rangka Pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan rincian sebagai berikut:

No	KODE SATKER	SATKER	PERUBAHAN
1	108266	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	688,378,000
2	108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	935,587,000
3	409241	INSPEKTORAT JENDERAL	439,758,000
4	097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	21,926,519,000
5	626181	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1,740,588,000
6	408870	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI	1,878,112,000
7	409201	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA	1,550,076,000

8	667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	822,242,000
9	409210	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH	1,357,271,000
10	409181	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI YOGYAKARTA	2,113,448,000
11	648999	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	1,656,372,000
12	408720	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	3,399,726,000
13	408736	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT	2,049,543,000
14	649001	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	610,068,000
15	667786	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	1,273,910,000
16	408824	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	1,361,856,000
17	408767	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	2,206,000,000
18	408802	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU	1,608,939,000
19	408798	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT	1,242,543,000
20	408830	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT	1,006,601,000
21	408906	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	487,074,000
22	649022	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	593,875,000
23	408892	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU	1,074,053,000
24	408861	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	1,745,683,000
25	667772	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	543,695,000
26	409175	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	1,129,465,000
27	409169	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	534,442,000
28	408855	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR	1,005,061,000
29	408782	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH	1,903,754,000
30	408751	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	843,963,000
31	408742	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	2,388,442,000
32	408818	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	2,224,007,000
33	408849	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN	232,988,000

34	409190	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH	1,047,845,000
35	649018	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO	308,949,000
36	408773	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN	2,919,843,000
37	409226	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT	1,795,064,000
38	408886	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR	1,009,303,000
39	532413	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	150,000,000
40	404309	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	964,120,000
41	108287	POLITEKNIK IMIGRASI	714,870,000
42	409159	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	48,502,000
43	409155	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	212,615,000
44	409157	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	253,044,000
TOTAL			73,998,194,000

- e. Pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) program menyebabkan pengurangan pagu anggaran Sekretariat Jenderal (Pusat) pada 1553.EBC.954.055 Administrasi dan Koordinasi Biro Kepegawaian sebesar Rp3.563.859.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dalam rangka Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, dengan rincian sebagai berikut:

No	KODE SATKER	SATKER	PERUBAHAN
1	404233	1553.EBC.954.055.G Dana Mutasi dan Pensiun Pegawai	(3.563.859.000),-
2	408855	1558. EBB.951. Layanan Sarana Internal	1.740.771.000,-
		1558. EBB.971. Layanan Prasarana Internal	1.823.088.000,-
TOTAL			0,-

- f. Revisi Administrasi berupa:

- 1) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA pada seluruh Satuan Kerja;
- 2) Pencantuman Catatan pada Halaman IVB DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
- 3) Penghapusan Catatan pada Halaman IVB DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini dinyatakan bahwa pergeseran anggaran antar Satuan Kerja dan antar Unit Eselon I dalam 1 (satu) program anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM T.A. 2024, antar satuan kerja dalam 1 (satu) program anggaran dalam rangka Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Revisi Administrasi tersebut **dapat disetujui**.

Demikian untuk menjadi periksa.



Sekretaris Jenderal,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, positioned above the name of the signatory.

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159
Laman: www.kemenkumham.go.id

SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR SEK-KU.01.02-129

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui substansi usulan revisi anggaran yang diusulkan oleh:
 - a. Wisnu Nugroho Dewanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal berupa pergeseran anggaran antar satuan kerja dan antar unit eselon I dalam 1 (satu) program anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 Rp73.998.194.000,-, pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) program anggaran dalam rangka Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp3.563.859.000,- dan Revisi Administrasi;
 - b. Widodo Ekatjahjana, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa pergeseran anggaran antar unit eselon I dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp688.378.000,- dan Revisi Administrasi;
 - c. Heni Susila Wardoyo, selaku Kuasa Pengguna Inspektorat Jenderal berupa pergeseran anggaran antar unit eselon I dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp439.758.000,- dan Revisi Administrasi;
 - d. Heru Dasananto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupa pergeseran anggaran antar unit eselon I dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp21.926.519.000,- dan Revisi Administrasi;
 - e. M Hilal, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berupa pergeseran anggaran antar unit eselon I dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp935.587.000,- dan Revisi Administrasi;
 - f. Ceno Hersusetio Kartiko, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan berupa pergeseran anggaran antar unit eselon I dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.740.588.000,- dan Revisi Administras;
 - g. Pramella Yunidar Pasaribu, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Bali berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.878.112.000,- dan Revisi Administrasi;

- h. Agung Rektono Seto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham DI Yogyakarta berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp2.113.448.000,- dan Revisi Administrasi;
- i. Dodot Adikoeswanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Banten berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.656.372.000,- dan Revisi Administrasi;
- j. R. Andika Dwi Prasetya, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp3.399.726.000,- dan Revisi Administrasi;
- k. Masjuno, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp2.049.543.000,- dan Revisi Administrasi;
- l. Heni Yuwono, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp843.963.000,- dan Revisi Administrasi;
- m. Tejo Harwanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp2.388.442.000,- dan Revisi Administrasi;
- n. Meurah Budiman, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.903.754.000,- dan Revisi Administrasi;
- o. Harun Sulianto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp610.068.000,- dan Revisi Administrasi;
- p. Santosa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.129.465.000,- dan Revisi Administrasi;
- q. M. Adnan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp534.442.000,- dan Revisi Administrasi;
- r. I Nyoman Gede Surya Mataram, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.273.910.000,- dan Revisi Administrasi;
- s. Sorta Delima Br Tobing, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.361.856.000,- dan Revisi Administrasi;

- t. Budi Argap Situngkir, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Riau berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.608.939.000,- dan Revisi Administrasi.
- u. Haris Sukamto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.242.543.000,- dan Revisi Administrasi.
- v. Ilham Djaya, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp2.224.007.000,- dan Revisi Administrasi.
- w. Anak Agung Gde Krisna, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp2.206.000.000,- dan Revisi Administrasi.
- x. Muhammad Tito Andrianto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.006.601.000,- dan Revisi Administrasi.
- y. Anthonius M Ayorbaba, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Papua berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp487.074.000,- dan Revisi Administrasi.
- z. Ignatius Purwanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp593.875.000,- dan Revisi Administrasi.
- aa. Taufiqurakhman, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp232.988.000,- dan Revisi Administrasi.
- bb. Joko Martanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.047.845.000,- dan Revisi Administrasi.
- cc. Hendro Tri Prasetyo, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.074.053.000,- dan Revisi Administrasi.
- dd. Piet Bukorsyom, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp543.695.000,- dan Revisi Administrasi.
- ee. Gun Gun Gunawan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.005.061.000,-, pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) program anggaran dalam rangka Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp3.563.859.000,- dan Revisi Administrasi.

- ff. Ronald Lumbun, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.745.683.000,- dan Revisi Administrasi.
- gg. Liberti Sitinjak, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp2.919.843.000,- dan Revisi Administrasi.
- hh. Marciana D. Jone, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.009.303.000,- dan Revisi Administrasi.
- ii. Silvester Sili Laba, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.550.076.000,- dan Revisi Administrasi.
- jj. Pamuji Raharja, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp822.242.000,- dan Revisi Administrasi.
- kk. Parlindungan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.795.064.000,- dan Revisi Administrasi.
- ll. Pagar Butar Butar, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp308.949.000,- dan Revisi Administrasi.
- mm. Hermansyah Siregar, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp1.357.271.000,- dan Revisi Administrasi;
- nn. Rifqi Adrian Kriswanto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp150.000.000,- dan Revisi Administrasi;
- oo. Rachmayanthi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pemasarakatan berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp964.120.000,- dan Revisi Administrasi;
- pp. Wisnu Widayat, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Imigrasi berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp714.870.000,- dan Revisi Administrasi;
- qq. Wahyu Prihandono, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp48.502.000,- dan Revisi Administrasi;

- rr. Aditya Sarsito Sukarsono, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp212.615.000,- dan Revisi Administrasi;
- ss. Toni Sugiarto, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah berupa pergeseran anggaran antar satker dalam 1 (satu) program dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024 sebesar Rp253.044.000,- dan Revisi Administrasi.

- 2. Usul revisi anggaran beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap dan benar.
- 3. Usul revisi anggaran telah diperhitungkan dengan seksama dan tidak mengakibatkan kekurangan pada Belanja Pegawai Operasional dan Dana Mutasi pada tahun anggaran berjalan.
- 4. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala resiko dan konsekuensinya sesuai dengan tugas dan wewenang saya.
- 5. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan.

Jakarta, 21 Juni 2024
Sekretaris Jenderal,



A handwritten signature in black ink, written over the stamp and extending to the right.

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222; Faksimile (021) 525 3159
Laman: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK-KU.01.02-130 21 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RKA) atas Revisi Anggaran

Yth.

1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Kepala Kantor Wilayah (terlampir)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di tempat

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker atas Revisi Anggaran telah ditetapkan dan pangkalan data RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan penetapan perubahan RKA ini, RKA Satker dimaksud berubah menjadi sebagai terlampir.
3. Bersama ini diusulkan Pengesahan Revisi Anggaran atas pergeseran anggaran antar satuan kerja, antar unit eselon I dalam 1 (satu) program anggaran dan dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2024, pergeseran anggaran antar satuan kerja dalam 1 (satu) program anggaran dalam rangka Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Revisi Administrasi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LAMPIRAN I
Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK-KU.01.02-130
Tanggal : 21 Juni 2024

No	SATKER
1	SEKRETARIAT JENDERAL
2	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
5	INSPEKTORAT JENDERAL
6	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
8	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA
9	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
10	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI YOGYAKARTA
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT
15	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
16	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
17	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
18	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
19	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
20	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT
21	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
22	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
23	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU
24	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA
25	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
26	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
27	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI
28	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
29	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
30	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
31	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
32	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN
33	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN
34	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH
35	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO
36	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN
37	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT
38	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR
39	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
40	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
41	POLITEKNIK IMIGRASI

42	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN
43	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA
44	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
45	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH



Sekretaris Jenderal,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, positioned above the name of the official.

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN
KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 9-10 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1. JAKARTA 10710. KOTAK POS 2435
TELEPON (021) 34357541 ; FAKSIMILE (021) 3452581 ; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

BERITA ACARA
RAPAT PENELAAHAN
Nomor: BA-36/AG.52/2024

Waktu : Rabu, 26 Juni 2024 Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Peserta Rapat : 1. Dit. Anggaran Bidang Polhukhankam dan BABUN
2. Kementerian Hukum dan HAM (Setjen, Itjen, Ditjen KI, Ditjen PP, BPHN dan BPSDM Hukum dan HAM)
Hal : Rapat Penelaahan Usulan Revisi Anggaran III Sekretariat Jenderal (Pemenuhan Belanja Pegawai pada 6 Unit Kemenkumham TA 2024)

Pada hari ini, Rabu, 26 Juni 2024 telah dilakukan rapat penelaahan menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.02-127 tanggal 21 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran, serta undangan Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN Nomor UND-47/AG.5/AG.52/2024. Rapat dilakukan secara *video conference* menggunakan aplikasi Microsoft Teams dan diikuti oleh perwakilan dari Kemenkumham (Setjen, Itjen, Ditjen KI, Ditjen PP, BPHN dan BPSDM Hukum dan HAM) serta Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN-Direktorat Jenderal Anggaran guna mengkonfirmasi hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah satker yang diusulkan revisi anggaran berjumlah 45 satker.
- Data dukung yang disampaikan melalui aplikasi SAKTI yaitu:
 - Surat usulan revisi;
 - Surat pernyataan eselon I;
 - ADK SAKTI;
 - Surat Reviu APIP;
 - Data dukung lainnya.
- Pembahasan mekanisme revisi sesuai dengan ADK yang disampaikan yaitu:
 - Pemenuhan belanja pegawai pada 44 satker di 6 unit, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

UNIT / SATKER	PERGESERAN
013 01 Sekretariat Jenderal	-27.923.981
SEKRETARIAT JENDERAL	-73.998.194
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (33 SATKER)	44.129.149
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	150.000
013 02 Inspektorat Jenderal	439.758
INSPEKTORAT JENDERAL	439.758
013 07 Ditjen Kekayaan Intelektual	21.926.519
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	21.926.519
013 08 Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	1.740.588
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.740.588
013 10 Badan Pembinaan Hukum Nasional	688.378
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	688.378
013 12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.128.738

UNIT / SATKER	PERGESERAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	935.587
POLITEKNIK IMIGRASI	714.870
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	964.120
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM (3 SATKER)	514.161
TOTAL	0

Pemenuhan belpege tersebut berasal dari satker Setjen sebesar Rp73.998.194.000 akan belanja gaji pokok PNS untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai antara lain belanja gaji pokok PPPK, tunjangan fungsional PNS dan uang makan PPPK pada 44 satker di 6 unit. Berdasarkan penjelasan dari perwakilan Setjen, revisi pemenuhan belpege dari satker Setjen Kemenkumham telah diperhitungkan dengan seksama dan diperkirakan tidak akan menyebabkan kekurangan alokasi belanja pegawai pada satker Setjen Kemenkumham.

- b. Pergeseran antar satker dari satker Setjen Kemenkumham sebesar Rp3.563.859.000,- untuk memenuhi Layanan Sarana dan Prasarana Internal berupa Rehabilitasi Rumah Dinas yang diperuntukan untuk Rumah Singgah Menteri beserta sarannya pada satker Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, dengan rincian:
 - o Layanan sarana internal sebesar Rp1.740.771.000,- antara lain genset, AC split, air purifier dan lain-lain. Pergeseran tersebut menyebabkan penambahan volume RO layanan sarana internal sebanyak 103 unit.
 - o Layanan prasarana internal (RO baru) sebesar Rp1.823.088.000,- untuk rehabilitasi rumah dinas yang diperuntukan untuk Rumah Singgah Menteri, serta pembangunan pos jaga. Usulan revisi untuk RO baru tersebut telah dilengkapi dengan Surat Reviu APIP serta rekomendasi biaya dari dinas PUPR setempat. Pergeseran tersebut menyebabkan penambahan volume RO layanan prasarana internal sebanyak 2 unit.
 - c. Pencantuman/penghapusan halaman IVB DIPA:
 - 1) Pencantuman catatan halaman IVB DIPA Petikan terkait renovasi rumah dinas pada satker Kanwil Kemenkumham Provinsi Kaltim;
 - 2) Penghapusan catatan halaman IVB DIPA Petikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau karena adanya kesalahan input pada awal DIPA. Hutang Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2019 telah diselesaikan di Tahun 2022.
 - d. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA.
4. Konfirmasi/hal-hal yang perlu perbaikan:
- a. Surat pernyataan eselon I pada Ditjen PP dan BPHN belum dilengkapi meterai.
 - b. Terdapat pergeseran anggaran pada 1 KRO yang sama pada Pusdatin KRO FAB Sistem Informasi Pemerintahan. Terkait hal tersebut agar dilengkapi surat pengesahan revisi POK dari KPA dan dituangkan dalam surat usulan revisi anggaran.
 - c. Belum tertuang pada surat usulan revisi anggaran:
 - 1) Pencantuman catatan halaman IVB DIPA Petikan satker Kanwil Kemenkumham Kaltim belum tertuang pada surat usulan revisi anggaran.
 - 2) Penambahan volume RO layanan sarana internal dan RO layanan prasarana internal pada Kanwil Kemenkumham Kaltim.
 - 3) Pemutakhiran revisi POK.
 - d. Surat rekomendasi PUPR atas rehabilitasi rumah dinas pada satker Kanwil Kemenkumham ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan, serta pada surat tersebut belum terdapat informasi luasan bangunan yang dilakukan rehabilitasi. Berdasarkan penjelasan dari Setjen Kemenkumham, hal tersebut dikarenakan ke depannya akan dilakukan renovasi kantor imigrasi yang akan digunakan sebagai tempat kerja sementara di IKN, sehingga berdasarkan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Kaltim, surat permintaan rekomendasi PUPR diajukan sekaligus oleh Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan. Terkait hal tersebut perlu dilengkapi surat dari Dinas PUPR yang menyatakan bahwa rekomendasi biaya PUPR tersebut peruntukannya untuk rumah dinas satker

Kanwil Kemenkumham Provinsi Kaltim, serta perlu dilampirkan rincian perhitungan rekomendasi dari Dinas PUPR setempat.

2. Berdasarkan hasil penelaahan atas usul revisi anggaran tersebut di atas, maka usulan revisi dapat diproses lebih lanjut setelah perbaikan/tambahan data dukung berupa:
 - a. Perbaikan surat usulan revisi anggaran;
 - b. Perbaikan surat pernyataan eselon I Ditjen PP dan BPHN;
 - c. Pengesahan revisi POK dari KPA satker Pusdatin;
 - d. Perbaikan surat rekomendasi dinas PUPR serta lampiran rincian biayanya.

Perbaikan tersebut diupload melalui SAKTI beserta pengantar dari pejabat eselon II **paling lambat tanggal 28 Juni 2024 pukul 12.00**.

Kesepakatan di atas hanya sebagai angka pengalokasian anggaran dalam perencanaan. Segala kebenaran/kelengkapan perhitungan dan data pendukung menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pelaksanaannya tidak boleh melebihi jumlah di atas, baik jumlah dana yang dicairkan maupun mekanismenya harus mengikuti ketentuan yang berlaku serta menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen terkait.

LAMPIRAN PERGESERAN PER UNIT / SATKER




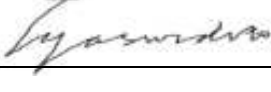
(dalam ribuan Rupiah)

NO	UNIT/SATKER	ALOKASI		
		SEMULA	MENJADI	SELISIH
013 01	Sekretariat Jenderal	5.412.211.866	5.384.287.885	-27.923.981
1.	404233 SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	4.677.407.863	4.599.845.810	-77.562.053
2.	408720 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	26.083.277	29.483.003	3.399.726
3.	408736 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT	24.559.946	26.609.489	2.049.543
4.	408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	25.018.139	27.406.581	2.388.442
5.	408751 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	25.153.474	25.997.437	843.963
6.	408767 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	24.540.820	26.746.820	2.206.000
7.	408773 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN	48.430.921	51.350.764	2.919.843
8.	408782 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH	19.094.885	20.998.639	1.903.754
9.	408798 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT	19.161.422	20.403.965	1.242.543
10.	408802 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU	16.803.245	18.412.184	1.608.939
11.	408818 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	20.390.985	22.614.992	2.224.007
12.	408824 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	21.198.645	22.560.501	1.361.856
13.	408830 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT	24.155.861	25.162.462	1.006.601
14.	408849 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN	44.104.330	44.337.318	232.988
15.	408855 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR	19.392.570	23.961.490	4.568.920
16.	408861 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	18.897.178	20.642.861	1.745.683
17.	408870 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI	19.778.860	21.656.972	1.878.112
18.	408886 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR	17.643.729	18.653.032	1.009.303
19.	408892 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU	17.957.960	19.032.013	1.074.053
20.	408906 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	21.511.722	21.998.796	487.074
21.	409169 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	17.350.114	17.884.556	534.442
22.	409175 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	17.631.170	18.760.635	1.129.465
23.	409181 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA	23.587.706	25.701.154	2.113.448
24.	409190 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH	17.229.152	18.276.997	1.047.845
25.	409201 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA	17.899.018	19.449.094	1.550.076
26.	409210 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH	16.419.947	17.777.218	1.357.271
27.	409226 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT	19.993.604	21.788.668	1.795.064
28.	532413 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	37.115.581	37.265.581	150.000
29.	648999 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	16.620.063	18.276.435	1.656.372
30.	649001 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	15.628.699	16.238.767	610.068
31.	649018 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO	15.365.439	15.674.388	308.949
32.	649022 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	14.946.572	15.540.447	593.875

NO	UNIT/SATKER	ALOKASI		
		SEMULA	MENJADI	SELISIH
33.	667772 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	15.857.960	16.401.655	543.695
34.	667786 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	20.224.630	21.498.540	1.273.910
35.	667790 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	15.056.379	15.878.621	822.242
013 02 Inspektorat Jenderal		64.267.692	64.707.450	439.758
36.	409241 INSPEKTORAT JENDERAL	64.267.692	64.707.450	439.758
013 07 Ditjen Kekayaan Intelektual		485.992.253	507.918.772	21.926.519
37.	097102 DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	485.992.253	507.918.772	21.926.519
013 08 Ditjen Peraturan Perundang-Undangan		51.761.434	53.502.022	1.740.588
38.	626181 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	51.761.434	53.502.022	1.740.588
013 10 Badan Pembinaan Hukum Nasional		42.121.767	42.810.145	688.378
39.	409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	42.121.767	42.810.145	688.378
013 12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia		307.550.792	310.679.530	3.128.738
40.	108266 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	187.400.815	188.336.402	935.587
41.	108287 POLITEKNIK IMIGRASI	43.671.020	44.385.890	714.870
42.	404309 POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	45.034.011	45.998.131	964.120
43.	409155 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	10.838.771	11.051.386	212.615
44.	409157 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	9.786.483	10.039.527	253.044
45.	409159 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	10.819.692	10.868.194	48.502
TOTAL		6.363.905.804	6.363.905.804	0

Ditandatangani pada tanggal **26 Juni 2024**

NO.	NAMA	UNIT – JABATAN	TANDA TANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM			
1.	Dina Rasmalita	Setjen Kemenkumham	
2.	Amia Cakrawarti	Setjen Kemenkumham	
3.	Ery Prawesty	Ditjen KI Kemenkumham	
4.	Nofitri Anna Maria Simandjuntak	Ditjen PP Kemenkumham	
5.	Lusi Handayani	Itjen Kemenkumham	
6.	I Nyoman Dudy Dharmawan	BPHN Kemenkumham	
7.	Dona Indra WB	BPSDM Kumham	
8.			

NO.	NAMA	UNIT – JABATAN	TANDA TANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN			
1.	Fauzi Syamsuri	Kasubdit Abid Hukum	
2.	Haryono	Plh. Kepala Seksi Abid Hukum I	
3.	Gilang Wanto Suparno	Analisis Anggaran Ahli Pertama	
4.	Hardaning Tyas Widito	Penelaah Teknis Kebijakan Tk. II	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-247/AG/AG.5/2024 28 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengesahan Usulan Revisi Pergeseran Anggaran pada Enam Unit Kemenkumham TA 2024

- Yth.
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan
 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
 4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
 5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
 6. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
 7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
 8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.02-127 tanggal 21 Juni 2024 hal Usulan Revisi Anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan pangkalan data RKA-KL DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (Digital Stamp) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Plh. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Putut Hari Satyaka

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh



5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
25. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
26. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
27. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
28. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
29. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
30. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
32. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
33. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
34. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku
35. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
36. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua

Lampiran
 Nomor : S-247/AG/AG.5/2024
 Tanggal : 28 Juni 2024

**DAFTAR PERUBAHAN *DIGITAL STAMP*
 REVISI PERGESERAN 6 (ENAM) UNIT KEMENKUMHAM**

NO	SATUAN KERJA	DIGITAL STAMP	
		SEMULA	MENJADI
013 01 Sekretariat Jenderal			
1	404233 SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	9080-7530-7407-6321	9904-4440-8030-0065
2	408720 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA	5469-2703-4361-0484	3564-9230-8464-0147
3	408736 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT	8595-1677-9299-0244	6992-4064-5585-5263
4	408742 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	4720-3103-9305-6502	4544-9093-0805-0900
5	408751 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR	2808-3489-6596-4086	0600-7501-3587-4761
6	408767 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	3015-7996-0647-3579	4544-1332-9780-0089
7	408773 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN	4528-0984-0273-7455	5678-6732-6080-5780
8	408782 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH	4883-9120-3354-0749	6835-8666-9965-6208
9	408798 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT	6770-1557-9067-0998	7984-9804-0501-8360
10	408802 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU	9112-9440-0550-2903	9098-3367-0560-3765
11	408818 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	0099-6156-7011-8684	1259-7337-7070-6807
12	408824 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	5658-4058-7036-7419	4842-8394-1934-4461
13	408830 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT	1500-3109-0534-3244	7910-0509-0087-0406
14	408849 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN	6803-8585-0151-2300	3427-1794-9155-4320
15	408855 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR	9760-1692-8983-6690	0802-8085-1077-1004
16	408861 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	0648-4051-2007-0398	7835-8873-7416-4645
17	408870 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI	4086-0156-6666-0125	8857-2721-8990-1405
18	408886 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR	1082-3500-5305-8000	7200-0081-9009-6031
19	408892 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU	2360-6277-7296-5110	3804-2200-1399-2723
20	408906 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	9010-5109-0678-3801	0699-8217-0361-3119
21	409169 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	7072-3587-0485-5790	0922-5719-0602-6639
22	409175 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	5929-0164-4954-4067	2258-2095-2151-7286
23	409181 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA	5661-5102-0544-9502	6910-6722-3158-6169
24	409190 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH	9890-7790-0153-0405	1061-8429-7400-0674
25	409201 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA	3509-3020-4250-4705	0982-0024-3014-0037
26	409210 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH	3907-6942-2094-3337	6404-565



NO	SATUAN KERJA	DIGITAL STAMP	
		SEMULA	MENJADI
27	409226 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT	8626-2688-1317-5906	2405-2412-8686-4275
28	532413 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1206-1309-7839-9006	8407-8709-2970-2451
29	648999 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN	1346-0740-9145-7724	0008-6380-6829-2750
30	649001 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0518-1221-3470-6308	0105-8590-1209-2998
31	649018 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO	7766-9730-1526-9590	0124-8662-0930-3077
32	649022 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	0520-9264-4034-6508	7084-3886-5400-7971
33	667772 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	9739-1852-8601-0903	2050-2640-1588-1303
34	667786 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	9229-3215-5048-4187	1762-7627-8560-6700
35	667790 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	0495-2943-4000-5034	4002-8423-1271-1806
013 02 Inspektorat Jenderal			
36	409241 INSPEKTORAT JENDERAL	7918-1622-0060-4587	0304-2855-6092-5407
013 07 Ditjen Kekayaan Intelektual			
37	097102 DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	4022-8008-6403-6075	3935-8412-8402-6313
013 08 Ditjen Peraturan Perundang-Undangan			
38	626181 DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8911-0115-4900-7703	1053-2958-0271-8700
013 10 Badan Pembinaan Hukum Nasional			
39	409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	4729-8306-1140-6938	8569-3580-1008-1271
013 12 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia			
40	108266 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	0904-1667-4310-8488	5403-3855-0554-2858
41	108287 POLITEKNIK IMIGRASI	3964-0016-0778-2368	8233-2560-5616-9708
42	404309 POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	9661-4856-6309-2047	3005-8963-8748-5020
43	409155 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	5833-8469-0253-9786	9647-6790-0097-8382
44	409157 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	7840-0376-6707-1457	4845-7930-9292-8942
45	409159 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	8799-1361-4458-2009	0623-9125-1009-1083

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOTA DINAS
NOMOR M.HH-PR.01.04-01

Yth : Para Pimpinan Tinggi Madya Unit Eselon I
Sifat : Sangat Segera
Hal : Automatic Adjustment Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 09 Januari 2024

Merujuk Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ikut serta melanjutkan kebijakan *Automatic Adjustment* dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan besaran *Automatic Adjustment* belanja Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada **Lampiran I** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta untuk menyampaikan usulan pemblokiran beserta Arsip Data Komputer Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembagayang telah diberikan catatan halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (blokir) **sebesar Rp1.136.145.376.000,00** (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan **sumber dana Rupiah Murni (RM)**;
2. Ketentuan dalam kebijakan *Automatic Adjustment* Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a. Belanja Barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 (sepuluh) akun belanja barang, yaitu honor (521115 dan 521213), perjalanan dinas (524111, 524113, 524211, dan 524219), paket *meeting* (524114 dan 524119), belanja barang operasional lainnya (521119), dan belanja barang non operasional lainnya (521219);
 - b. Belanja Modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda;
 - c. Kegiatan yang sudah terblokir dalam catatan halaman IV Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir semester I Tahun Anggaran 2024;
 - d. Memperhitungkan kemampuan masing-masing Unit Eselon I dalam menggunakan anggaran tahun 2023;
3. Mekanisme pelaksanaan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
 - a. Unit Eselon I mengusulkan Kegiatan/klasifikasi rincian output/rincian output/akun yang akan diblokir pada catatan halaman IV A Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan besaran *Automatic Adjustment* yang telah ditentukan dan ditandai dengan memilih kode 9 pada aplikasi SAKTI;

- b. Dalam pengusulan *Automatic Adjustment*, Unit Eselon I dapat melakukan perubahan/penyesuaian distribusi besaran per jenis belanja sebagaimana terlampir, dengan tidak mengurangi besaran *Automatic Adjustment* pada Unit Eselon I berkenaan;
- c. *Automatic Adjustment* pada Belanja Barang diutamakan pada kegiatan yang telah terblokir dan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada semester II Tahun Anggaran 2024;
- d. Setiap Unit Eselon I membuat matrik **rekapitulasi kegiatan yang diblokir sebagaimana Lampiran II dan III selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan paling lambat diterima pada tanggal 12 Januari 2024** melalui sumaker dan mengunggah data tersebut melalui https://bit.ly/AA_2024;
- e. Pengusulan sebagaimana pada angka 1 di atas, dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan. Surat usul revisi *Automatic Adjustment* disampaikan kepada Dirjen Anggaran paling lambat pada tanggal **26 Januari 2024**;
- f. Apabila sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengusulkan revisi sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran secara mandiri akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan rincian besaran dan jenis belanja sesuai lampiran.

Selanjutnya, diharapkan Saudara segera menyelesaikan proses revisi anggaran *Automatic Adjustment* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 secara tepat waktu, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan baik.



Yasonna H. Laoly

Lampiran I

Nomor : M.HH-PR.01.04-01

Tanggal : 09 Januari 2024

**BESARAN AUTOMATIC ADJUSTMENT BELANJA RUPIAH MURNI TAHUN ANGGARAN 2024
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NO	UNIT ESLEON I	BLOKIR (RM)			TOTAL PAGU BLOKIR (RM)
		B. PEGAWAI	B. BARANG	B. MODAL	
1	SETJEN	224.699.188.000	20.982.800.000		245.681.988.000
2	ITJEN		719.573.000		719.573.000
3	DITJEN AHU				
4	DITJEN PEMASYARAKATAN	44.261.019.000	337.759.329.000	292.585.915.000	674.606.263.000
5	DITJEN IMIGRASI			200.000.000.000	200.000.000.000
6	DITJEN KI		2.173.110.000		2.173.110.000
7	DITJEN PP		1.870.406.000		1.870.406.000
8	DITJEN HAM		780.438.000		780.438.000
9	BPHN		960.765.000		960.765.000
10	BSK HUKUM DAN HAM		444.614.000		444.614.000
11	BPSDM HUKUM DAN HAM		8.908.219.000		8.908.219.000
JUMLAH		268.960.207.000	374.599.254.000	492.585.915.000	1.136.145.376.000



Yasonna H. Laoly

Lampiran II

Nomor : M.HH-PR.01.04-01

Tanggal : 09 Januari 2024

REKAPITULASI AUTOMATIC ADJUSTMENT BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024

UNIT ESELON I

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/SUBKOMP/ DETIL	PAGU ALOKASI ANGGARAN	BLOKIR (RM)	PAGU DILUAR BLOKIR
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen			
1555	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja	15.246.463.000	1.620.251.000	13.626.202.000
1555.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.991.301.000	1.620.251.000	3.371.050.000
051	Penyusunan rencana program	3.099.018.000	1.163.370.000	1.935.648.000
A	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Setjen dan Unit Eselon I	2.338.875.000	1.163.370.000	1.175.505.000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.163.370.000	1.163.370.000	-
052	Penyusunan rencana anggaran	1.892.293.000	466.881.000	1.436.402.000
A	Analisis dan Supervisi Rencana Kerja	1.012.588.000	456.881.000	555.707.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	665.192.000	456.881.000	208.311.000
	dst			
	JUMLAH	4.802.856.586.000	396.199.854.000	4.407.656.732.000

Jakarta, Januari 2024

Pimpinan Tinggi Unit Eselon I

Nama
NIP



Yasonna H. Laoly

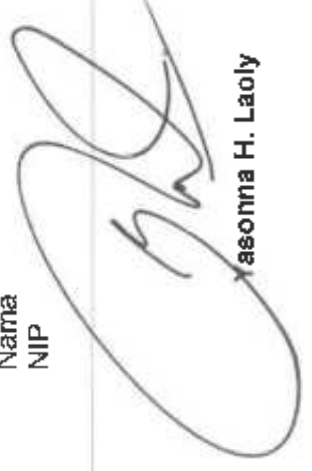
Lampiran III
Nomor : M.HH-PR.01.04-01
Tanggal : 09 Januari 2024

**FORM REKAPITULASI AUTOMATIC ADJUSTMENT BELANJA TA 2024
MENURUT PROGRAM
UNIT**

KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	RUPIAH MURNI (RM)		
		PAGU ALOKASI ANGGARAN 2022	BLOKIR	PAGU DILUAR BLOKIR
1	2	3	4	5=3-4
013.BB	Program Pembentukan Regulasi			
013. BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
013.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM			
013.WA	Program Dukungan Manajemen			

Jakarta, Januari 2024
Pimpinan Tinggi Unit Eselon I

Nama
NIP



Yasonna H. Laoly



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA PUSAT 10410; TELEPON : (021) 3448363;
3440910 FAKSMILE (021) 3448363, SUREL : kpknljakarta4@kemenkeu.go.id, LAMAN: http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-
jakarta4

NOTA DINAS
NOMOR ND-561/KNL.0704/2024

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Salinan Risalah Lelang nomor 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024
Tanggal : 8 Mei 2024

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 516/KN/2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, bersama ini kami sampaikan Salinan Risalah Lelang sebagai berikut:

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Salinan Risalah Lelang nomor 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024	1 (satu) set	Dikirim dengan hormat sebagai bahan laporan.

KPKNL Jakarta IV peraih predikat ZI WBK 2019, siap menuju WBBM untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kapabel, akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Manshur

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI



Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 178/07.04/2024-01

-----Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (06-05-2024), dimulai pukul sebelas (11:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Aska Winarta Putra., Sarjana Hukum, NIP 19950203 201801 1 004 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KM.6/2020 tanggal 29 April 2020, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-580/KNL.0704/2024 tanggal 26 April 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jalan Mayjen Sutoyo No 10 Cililitan-Jakarta Timur 13640. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan I Gusti Putu Milawati, NIP 197705092001122001, Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No 10 Cililitan-Jakarta Timur 13640, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor PHN.1-PB.05.01-05 tanggal 06 Maret 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-785/KNL.0704/2024 tanggal 26 April 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-56/MK.6/KNL.0704/2024 tanggal 27 Maret 2024 hal Persetujuan Permohonan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Anang Ardian Reza berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor PHN-01.PB.05.05 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 // PHN.1-PB.05.01-06 tanggal 6 Maret 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta IV. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) paket Eks Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat Yaitu : -----
1. Mobil Mitsubishi FE 349 Tahun 2004 Nomor Polisi B 7196 MQ, Nomor Rangka MHMFE349E4R068291 Nomor Mesin 4D34478314 -----
2. Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2006 Nomor Polisi B 2640 SQ, Nomor Rangka MHFXW42GX62065549 dan nomor Mesin ITR6242788 -----
Nilai Limit : Rp100.424.000,00 (seratus juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jalan Mayjen Sutoyo No 10 Cililitan Jakarta Timur. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran/Tempelan tanggal 30 April 2024, -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut.../Lembar Kedua

Ttd.

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi

Ttd.

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----
1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----
-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----
-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----
-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----
-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----
-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----
-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau

Ttd.

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----
-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----
-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----
-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun

Ttd.

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta IV. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Setelah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

- Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

- Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) paket Eks Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat Yaitu : -----

1.Mobil Mitsubishi FE 349 Tahun 2004 Nomor Polisi B 7196 MQ, Nomor Rangka MHMFE349E4R068291 Nomor Mesin 4D34478314 -----

2.Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2006 Nomor Polisi B 2640 SQ, Nomor Rangka MHFXW42GX62065549 dan nomor Mesin ITR6242788 -----

Harga Lelang ----- : Rp115.487.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Zaenal Arifin, NIK 3175052506850009, Karyawan Swasta,
----- beralamat di Jalan Gandaria RT/RW 001/002
----- Kelurahan/Desa Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta
----- Timur Provinsi DKI Jakarta -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp115.487.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 17 (tujuh belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd

Ttd.

Anang Ardian Riza

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 8 Mei 2024
Kepala KPKNL Jakarta IV


Rofiq Manshur
NIP 19750725 199903 1 001





BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240508931583
Tanggal Billing : 08-05-2024 07:35:58
Tanggal Kedaluwarsa : 15-05-2024 07:35:58
Tanggal Bayar : 08-05-2024 19:05:15
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta IV
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Total Disetor : 115.487.000 (IDR)
Terbilang : *Seratus Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000486776**
NTPN : **BC71D2G4VPKREJFV**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 115.487.000 (IDR)
Keterangan : RL-178/07.04/2024-01 Tgl 06 Mei 2024 BPHN



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240508932380
Tanggal Billing : 08-05-2024 07:34:24
Tanggal Kedaluwarsa : 15-05-2024 07:34:24
Tanggal Bayar : 08-05-2024 19:05:15
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta IV
Kementerian/Lembaga : **015** - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : **09** - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : **537937** - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
Total Disetor : 2.309.740 (IDR)
Terbilang : *Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000486833**
NTPN : **D88ED48VVEPK8K8S**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 2.309.740 (IDR)
Keterangan : RL-178/07.04/2024-01 Tgl 06 Mei 2024 BPHN



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409288
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-03**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	42,121,767,000	42,121,767,000	0
2	Belanja	9,617,480,607	9,617,480,607	0
3	Pengembalian Belanja	-5,682	-5,682	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	12,068,428	12,068,428	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20-APR-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409288
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-04**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	42,121,767,000	42,121,767,000	0
2	Belanja	12,719,456,976	12,719,456,976	0
3	Pengembalian Belanja	-6,105	-6,105	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	12,068,428	12,068,428	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	625,000,000	625,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	625,000,000	625,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 07-JUN-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409288
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-05**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	42,121,767,000	42,121,767,000	0
2	Belanja	15,758,970,955	15,758,970,955	0
3	Pengembalian Belanja	-6,159	-6,159	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	237,155,783	237,155,783	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-JUN-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409288
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	42,810,145,000	42,810,145,000	0
2	Belanja	20,547,020,502	20,547,020,502	0
3	Pengembalian Belanja	-6,174	-6,174	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	237,155,783	237,155,783	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	625,000,000	625,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	625,000,000	625,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JUL-24





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908 Faxes. 021-8011753, 8002265 laman www.bphn.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-10

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Monica Dhamayanti
NIP : 196901251997032002
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Yogyakarta
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.151	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Yogyakarta
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Yogyakarta

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Monica Dhamayanti
NIP 196901251997032002

Budi Hariono

NIP - 14661101487021001

PIHAK PERTAMA,



I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-11

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Max Wambrau
NIP : 197109151997121001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Tengah
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.152	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

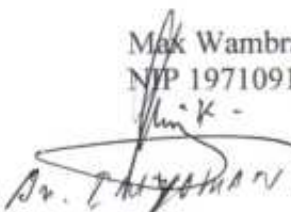
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sulawesi Tengah;
 3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Sulawesi Tengah
- Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Max Wambrau
NIP 197109151997121001


Dr. I Nyoman Sukamayasa

PIHAK PERTAMA,


I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908 Faxes. 021-8011753, 8002265 laman www.bphn.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-12**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Eva Gantini
NIP : 196906221994032001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Barat
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.153	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kalimantan Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kalimantan Barat;
 3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Kalimantan Barat
- Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Eva Gantini
NIP 196906221994032001

PIHAK PERTAMA,



I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908 Faxes. 021-8011753, 8002265 laman www.bphn.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-13**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Sasmita
NIP : 196505261989031001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :


No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.154	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kepulauan Riau;
 3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Kepulauan Riau
- Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


Sasmita
NIP 196505261989031001

PIHAK PERTAMA,


I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-14

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dulyono
NIP : 196808081993031001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.155	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kalimantan Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kalimantan Timur;
 3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Kalimantan Timur
- Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Dulyono
NIP 196808081993031001
MIA KUSUMA PITRIANA
NIP. 198302082009012005

PIHAK PERTAMA,



I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-15**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Hernadi
NIP : 197512252002121001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.156	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sulawesi Selatan;
 3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Sulawesi Selatan
- Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Hernadi
NIP 197512252002121001
An. Ad. Hary

PIHAK PERTAMA,



I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001